



ASKRINDO
Syariah



2017
Laporan Tahunan
Annual Report

**SENANTIASA BERPERAN
MENGHADAPI TANTANGAN**
Always Taking a Role in the Face of Challenges



SENANTIASA BERPERAN MENGHADAPI TANTANGAN

Always Taking a Role in the Face of Challenges

Tahun 2017 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi Askrindo Syariah sebagaimana yang tercermin dari catatan kinerja Perseroan pada tahun tersebut. Namun demikian, Perseroan melihat bahwa pada saat ini industri penjaminan pembiayaan syariah di Indonesia baru mulai berkembang. Sebagai salah satu pelopornya, Askrindo Syariah menyadari tanggung jawabnya untuk terus memperkuat perannya dalam membangun industri penjaminan pembiayaan, walaupun harus menghadapi tantangan yang tidak ringan. Tanggung jawab ini bukan hanya kepada mitra bisnis Perseroan namun juga kepada seluruh masyarakat, selaku pemangku kepentingan.

The year 2017 was a challenging one for Askrindo Syariah as reflected in the Company's performance for the year under review. However, the Company views that at present the sharia financing guarantee industry in Indonesia is still in its early stage of development. Being one of the pioneers, Askrindo Syariah realizes its responsibility to continue strengthening its role in building the financing guarantee industry, despite facing major challenges. The Company's responsibility is not only towards its business partners, but also for the entire community, as the stakeholders.

DAFTAR ISI

Contents



KINERJA PERUSAHAAN TAHUN 2017 COMPANY PERFORMANCE 2017

- 8** Ikhtisar Data Keuangan Penting
Financial Highlights
- 9** Grafik Ikhtisar Data Keuangan Penting
Financial Highlights Graphic
- 10** Trend Ikhtisar Penting
Financial Highlights Trend



LAPORAN MANAJEMEN MANAGEMENT'S REPORT

- 14** Laporan Dewan Komisaris
The Board of Commissioners Report
- 18** Laporan Direksi
The Board of Directors Report



PROFIL PERUSAHAAN COMPANY PROFILE

- 26** Data Perusahaan
Corporate Data
- 28** Sekilas Perusahaan
Company at a Glance
- 29** Visi, Misi & Tata Nilai Perusahaan
Vision, Mission, & Corporate Values
- 31** Penghargaan dan Sertifikat
Awards and Certification
- 32** Bidang Usaha
Line of Business
- 33** Struktur Organisasi
Organizational structure
- 34** Sumber Daya Manusia
Human Resources

- 35** Biaya Pengembangan Kompetensi Karyawan
Employee Competence Development Cost
- 35** Komposisi Pemegang Saham
Shareholders Composition
- 36** Daftar Entitas Anak dan/atau Asosiasi
List of Subsidiaries and/or Associations
- 36** Kronologi Penerbitan Saham
Share-Listing Chronology
- 36** Nama dan Alamat Lembaga dan/atau Profesi Penunjang
Capital Market Supporting Institutions and/or Professionals
- 37** Profil Dewan Komisaris
The Board of Commissioners Profile
- 39** Profil Direksi
The Board of Directors Profile
- 45** Dewan Pengawas Syariah
Board of Sharia Supervisory
- 46** Kepala Divisi
Head of Division



ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

- 50** Tinjauan Makroekonomi
Macroeconomic Review
- 51** Perkembangan Perbankan Syariah
Development of Sharia Banking
- 53** Tinjauan Operasional
Operational Review
- 55** Tinjauan Keuangan
Financial Review
- 58** Laporan Laba (Rugi) Komprehensif
Comprehensive Income Statement
- 61** Laporan Arus Kas
Cash Flow Statement
- 64** Aspek Pemasaran
Marketing Aspect





TATA KELOLA PERUSAHAAN CORPORATE GOVERNANCE

- 68 Laporan Tata Kelola Perseroan
The Company's Governance Report
- 68 Struktur Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Structure
- 73 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
General Meeting of Shareholders (GMS)
- 75 Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board
- 77 Dewan Komisaris
Board of Commissioners
- 91 Direksi
Board of Directors
- 105 Remunerasi Dewan Komisaris, dan Direksi
Serta DPS
*Remuneration of The Board of Commissioners,
The Board of Directors and SSB*
- 107 Remunerasi Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board Remuneration
- 108 Informasi Mengenai Pemegang Saham
Utama dan Pengendali
*Information About Principal and Controlling
Shareholders*
- 108 Hubungan Afiliasi
Affiliate Relationship
- 110 Komite Audit
Audit Committee
- 113 Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary
- 119 Satuan Pengawasan Intern (SPI)
Internal Audit Unit (IAU)
- 122 Kepatuhan
Compliance
- 122 Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System
- 123 Manajemen Risiko
Risk Management
- 125 Teknologi Informasi (TI)
Information Technology (IT)
- 127 Komite di Bawah Direksi
Committees Under The Board of Directors



LAPORAN KEUANGAN FINANCIAL REPORT

- 128 Hubungan Kerja Dengan Pihak Eksternal
Relationship With The External Parties
- 131 Keterbukaan Informasi
Disclosure of Information
- 132 Benturan Kepentingan Terkait Hubungan
Berelasi
Conflicts of Interests With Related Parties
- 132 Kode Etik
Code of Conduct
- 134 Sistem Pelaporan Pelanggaran
Whistle Blowing System
- 135 Road Map Tata Kelola Perusahaan
Roadmap of Corporate Governance
- 135 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility





01 KINERJA PERUSAHAAN
TAHUN 2017
Company
Performance 2017

02 LAPORAN MANAJEMEN
Management's Report

03 PROFIL PERUSAHAAN
Company Profile



04 ANALISIS DAN PEMBAHASAN
MANAJEMEN
Management Discussion and
Analysis

05 TATA KELOLA PERUSAHAAN
Corporate Governance

06 LAPORAN KEUANGAN
Financial Report



**KINERJA
PERUSAHAAN
TAHUN 2017**
**COMPANY
PERFORMANCE 2017**

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING FINANCIAL HIGHLIGHTS

IKHTISAR KEUANGAN FINANCIAL HIGHLIGHTS

Dalam juta rupiah/in million rupiah

Uraian/Description	2015	2016	2017
Imbal Jasa Kafalah Bruto	111.149	156.216	176.300
Ta'widh	11.698	37.298	63.633
Subrogasi	635	3.337	6.201
Pendapatan Kafalah Bersih	53.398	60.766	41.690
Pendapatan Investasi	10.728	15.613	16.965
EAT	24.036	20.484	6.226

Keterangan/Description	2015	2016	2017
Aset Investasi	305.755	327.737	318.885
Deposito	280.750	268.250	248.800
Reksadana	25.005	59.487	70.085
Aset	326.737	357.209	391.355
Liabilitas	41.994	53.033	80.719
Ekuitas	284.743	304.176	310.636

RASIO KEUANGAN FINANCIAL RATIOS

Keterangan/Description	2015	2016	2017
ROE	12	7.0	2.0
ROA	13	7.0	2.0
NPM	21.6	13.1	3.5
YOI	5.0	5.0	5.0
Likuiditas	761	657	462
Solvabilitas	778	674	485



GRAFIK IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING FINANCIAL HIGHLIGHTS GRAPHIC

Imbal Jasa Kafalah Bruto Gross Premium

dalam miliar Rupiah
in billion Rupiah



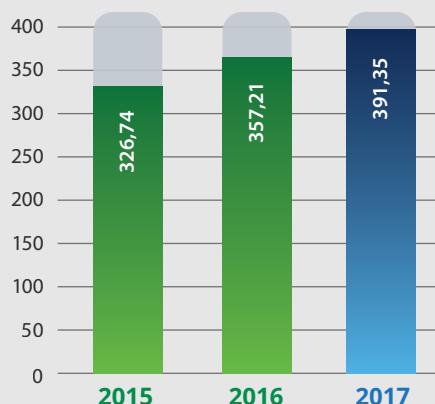
Laba Setelah Pajak dan Zakat Profit After Taxes and Zakat

dalam miliar Rupiah
in billion Rupiah



Aset Asset

dalam miliar Rupiah
in billion Rupiah



Liabilitas Liabilities

dalam miliar Rupiah
in billion Rupiah



Ekuitas Equity

dalam miliar Rupiah
in billion Rupiah



Aset Investasi Investment Asset

dalam miliar Rupiah
in billion Rupiah



TREND IKHTISAR PENTING FINANCIAL HIGHLIGHTS TREND

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Dalam jutaan rupiah/in million rupiah	Description
Imbal Jasa Kafalah Bruto	8.339	47.407	111.149	156.216	176.300	Gross Kafalah Fee Contribution	
Ta'widh	-	2.799	11.698	37.298	63.633		Ta'widh
Beban penjaminan ulang	619	6.270	22.382	38.606	46.711		Reinsurance Expenses
Subrogasi	-	15	635	3.337	6.201		Recoveries
Beban Kafalah	1.078	11.406	32.256	53.176	80.599		Kafalah Expenses
Cadangan Ta'widh	960	6.040	6.609	7.557	10.767		Ta'widh Reserve
Pendapatan Kafalah Bersih	6.263	27.911	53.398	60.766	41.690		Net Kafalah Income
Pendapatan Investasi	5.630	6.523	10.728	15.613	16.965		Investment Income
Beban Usaha	11.038	21.051	32.336	43.560	52.624		Operating Expenses
EAT	844	9.865	24.036	20.484	6.226		EAT
Aset Invetasi	97.126	111.650	305.755	327.737	318.885		Investment Assets
Total Aset	105.539	125.774	326.737	357.209	391.355		Total Assets
Total Ekuitas	100.844	110.690	284.743	304.176	310.636		Total Equities





LAPORAN MANAJEMEN

Management's Report





LAPORAN DEWAN KOMISARIS THE BOARD OF COMMISSIONERS REPORT



Budi Wisakseno
Komisaris Utama
President Commissioner



Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan para pemangku kepentingan yang kami hormati,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga Perusahaan dapat melalui tahun yang penuh tantangan ini.

Sejak tahun 2016 hingga tahun 2017, secara umum kondisi industri keuangan tidak terlalu kondusif, baik lembaga keuangan bank maupun non-bank, termasuk lembaga keuangan syariah. Hal ini tentu berdampak pada kinerja Perusahaan.

Patut disyukuri di tengah situasi bisnis yang tidak terlalu menggembirakan, namun kinerja Perusahaan masih *on the track*. Pertumbuhan ujrah tahun 2017 mencapai 13% dibandingkan dengan tahun 2016. Ujrah di 2017 sebesar Rp176.300 juta. Pencapaian *underwriting yield* di 2017 mencapai 23,6%. Hasil *underwriting* ini belum optimal, mengingat pada tahun 2017 ta'widh atas pembiayaan (terutama pembiayaan mikro) meningkat dibandingkan tahun 2016. Di samping itu, penagihan atas hasil subrogasi membutuhkan waktu relatif panjang bagi Bank Syariah.

Dewan Komisaris memberikan penghargaan dan apresiasi kepada Direksi dan Manajemen Perseroan yang telah bekerja keras untuk melewati tahun yang berat ini. Hasil asesmen GCG pada tahun 2017 ini tercatat cukup memuaskan, yakni sebesar 72,74%, atau mencapai kualifikasi "Cukup Baik". Skor tersebut meningkat dibanding tahun 2016, yakni sebesar 70,18%.

Dewan Komisaris telah memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenangnya untuk meningkatkan kinerja Perusahaan. Beberapa saran yang diberikan kepada Direksi adalah agar mengalihkan kredit dari kredit produktif ke kredit konsumtif, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dewan Komisaris juga meminta perbaikan

Dear Shareholders, members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Stakeholders,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Thank be to God the Almighty for His grace and blessing so that we were able to navigate the Company through this challenging year.

From 2016 to 2017, the condition of financial industry in general, whether banks or non-bank financial institutions, including the sharia ones, was not to conducive. Of course, such circumstances has brought some impact on the performance of the Company.

However, we should be grateful that against such an unencouraging business situation, the Company was able to keep its performance on track. In 2017, Premi grew by 13% from that of 2016, by posting Rp176,300 million. The underwriting yield in 2017 was 23.6%. Such achievement was not optimal as the Ta'widh of financing (particularly micro financing) in 2017 was higher than that of 2016. In addition, subrogation results collection period for Sharia banking is relatively longer.

The Board of Commissioners highly appreciates the Board of Directors and the Management of the Company for their hard works thought this challenging year. GCG assessment score in 2017 was quite encouraging, namely 72.74% and fell into the category of "Fairly Good". The score was higher than that of 2016, namely 70.18%.

In accordance with our duties and authorities, the Board of Commissioners has provided directives aiming improve the performance of the Company. Among the suggestions for the Board of Directors is to shift from productive loans to consumptive loans, provided that such loans should not be contradictory with the principles of Sharia. The

dalam *Credit Process Management* (CPM) dan melakukan evaluasi terhadap makul lahu yang bermasalah.

Selama tahun 2017, Dewan Komisaris telah memberikan nasihat/masukan/pengarahan kepada Direksi terhadap 4 bidang, yaitu :

Underwriting	: 12 kali
Investasi	: 4 kali
Keuangan & Umum	: 12 kali
Pengendalian Internal	: 4 kali

Pengelolaan sumber daya manusia juga menjadi perhatian serius Dewan Komisaris. Memasuki pertengahan tahun 2017 Perusahaan masuk ke era penataan organisasi sumber daya manusia dengan cara menegakkan pilar-pilar manajemen SDM yang sudah ditetapkan. Dewan Komisaris menyadari perlu waktu untuk mempersiapkan SDM yang andal setelah sekian lama terfokus pada penetrasi pasar.

Pada kesempatan ini Dewan Komisaris juga memberi penghargaan kepada Komite Audit yang telah menjadi "mata" dalam melakukan pengawasan terhadap organ bisnis Perusahaan. Komite Audit baru dibentuk pada tahun 2017 ini dan merupakan wujud komitmen Dewan Komisaris dalam rangka mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten. Komite Audit sangat membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan yang terkait dengan pengendalian internal, perencanaan dan *monitoring* investasi, penerapan manajemen risiko serta penerapan prinsip-prinsip GCG.

Terkait dengan kegiatan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) Dewan Komisaris menyarankan agar dilakukan diversifikasi dengan konsep pemberdayaan. Selama ini CSR dilakukan dengan mengunjungi yayasan atau panti sosial. Ke depannya, kegiatan CSR harus diarahkan untuk membuat masyarakat lebih produktif dalam meningkatkan taraf hidup.

Board of Commissioners also asked the Board of Directors to make improvement on Credit Process Management (CPM) and to conduct evaluation on non-performing makul lahu.

Throughout 2017, Board of Commissioners has provided the Board of Directors with advices/input/direction regarding the following four issues:

Underwriting	: 12 times
Investment	: 4 times
Financial & General Affairs	: 12 times
Internal Control	: 4 times

The Board of Commissioners also paid serious attention on Human resources management issues. Towards the mid of 2017, the Company entered into the new era in the management of the Human Resources organization by upholding the pillars of Human Resources management. The Board of Commissioners understand that it would take time for the Company to prepare reliable human resources after focusing on market penetration for quite a long time.

The Board of Commissioners would like to take this opportunity to thank the Audit Committee for being the "eyes" for the Company in conducting supervisory duties on the Company's business organ. The Audit Committee was established recently in 2017 and is the embodiment of the Board of Commissioners in consistently applying Good Corporate Governance (GCG) principles. The Audit Committee has been very helpful to the Board of Commissioners in performing supervisory function, related to internal control, planning and monitoring on investment, performing risk management as well as GCG principles.

Regarding the Corporate Social Responsibility (CSR) activities, the Board of Commissioners suggests the Board of Directors to conduct different activities with the concept of empowerment. All this time, CSR activities were conducted by visiting social foundation or institution. In the future, CSR activities should be aimed to help the community to become more productive so that they would be to improve their live standards.

Dewan Komisaris ingin menyampaikan apresiasi kepada Direksi atas kerja kerasnya, dan mengucapkan terima kasih kepada pemegang saham atas dukungannya.

Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada mitra kerja dan nasabah yang telah memberikan kepercayaan kepada Perusahaan. Dewan Komisaris juga memberi apresiasi atas dedikasi para karyawan yang telah bergandengan tangan melewati masa-masa sulit. Yakinlah bahwa Perusahaan akan tetap menjadi perusahaan penjamin berbasis syariah yang terbaik.

The Board of Commissioners would also like to express our appreciation to the Board of Directors for their hard work, and to the shareholders for their unwavering supports.

We would also wish to thank our business partners and customers for their trust upon us. The Board of Commissioners also like to extend our appreciation for the dedication exhibited by our employee who work hand in hand in the face of challenging situation. Rest assure that the Company will always be the best sharia company.

Jakarta,
Komisaris Utama
President Commissioner



Budi Wisakseno



LAPORAN DIREKSI THE BOARD OF DIRECTORS REPORT



Soegiharto
Direktur Utama
President Director



Pemegang saham yang kami hormati,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Menjalani tahun kelima sebagai pelopor perusahaan penjaminan berbasis syariah pertama di Indonesia telah memberikan tantangan tersendiri bagi Perseroan. Menjadi pelopor merupakan salah satu prestasi yang membanggakan, namun mempertahankan posisi tersebut disertai peningkatan nilai kompetitif Perseroan di mata mitra usaha merupakan tantangan yang harus kita hadapi. Hal ini terasa semakin berat di tengah kondisi perekonomian nasional dan global yang mengalami fluktuasi di sepanjang tahun 2017. Meskipun demikian kami selaku Manajemen didukung segenap pegawai, tetap optimis menatap masa depan. Seiring dengan kombinasi strategi yang dinamis, pelaksanaan yang optimal, dan pengelolaan perseroan yang cermat oleh seluruh jajaran Manajemen, Perseroan pada tahun 2017 ini kembali berhasil memperoleh kinerja Laba.

Melalui laporan pertanggungjawaban ini, perkenankan Direksi mengucapkan terima kasih kepada seluruh Pemangku Kepentingan, Dewan Komisaris, dan segenap pegawai yang telah mendukung Perseroan hingga kini. Pencapaian demi pencapaian telah berhasil kami raih dengan gemilang memantapkan posisi Perseroan sebagai perusahaan penjamin berbasis syariah terkemuka di negeri ini. Kami meyakini prestasi tersebut merupakan hasil kerja sama seluruh pihak yang terus dipertahankan. Dan lebih dari itu, prestasi terbesar yang patut kita banggakan adalah keberhasilan melayani negeri semaksimal mungkin. Oleh karenanya, mengakhiri tahun ini, selayaknya kita tidak berhenti berbenah seraya terus berjuang untuk memberikan pelayanan terbaik demi kemajuan yang lebih berarti.

Kondisi Perekonomian dan Usaha Penjaminan Syariah Tahun 2017

Di sepanjang tahun 2017, kondisi perekonomian global menunjukkan perlambatan yang cukup signifikan. Hal

Dear Shareholders,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

For the Company, undergoing its fifth year as the pioneer of the sharia-based insurance company in Indonesia, the first one ever, is a challenge in its own right. Being a pioneer is an achievement we are proud of. However, it also presented us with a challenge of maintaining that position while continuously improving the Company's competitive value in the eyes of our business partners. Such challenge is even more difficult to cope with in the midst of current national and global economic conditions that have been fluctuated throughout 2017. However, as the Management and supported by all employees, we are still optimistic about the future. Combined with dynamic strategies, optimal implementation, and careful management of the company by all Management, in 2017 the Company again managed to obtain profit.

Through this report, the Board of Directors would like to thank all the Stakeholders, the Board of Commissioners, and all employees who have been supporting the Company all this time. We successfully achieved so many, further cementing our position as the leading sharia-based insurance company in the country. We believe that this achievement is the result of the cooperation of all parties that continue to be maintained. And more than that, the biggest achievement that we should be proud of is the success of serving our country as much as possible. Therefore, ending this year, we should not stop improving while continuing to strive to provide the best services for more meaningful progress.

Economic and Sharia-based Guarantee Business Conditions in 2017

Throughout 2017, global economy showed a significant slowdown. This was mainly due to the weakening prices

ini terutama disebabkan oleh melemahnya harga dan permintaan komoditas dunia, melemahnya pertumbuhan ekonomi China, melemahnya konsumsi domestik, dan menguatnya mata uang dollar. Secara nasional, risiko perlemahan pertumbuhan ekonomi global juga memberikan dampak yang berarti. Tercatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sebesar 5.05 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu 5.06 persen.

Peningkatan *rating* utang Indonesia juga menjadi salah satu indikator mulai membaiknya perekonomian nasional. Hal ini tentu disambut baik oleh sejumlah *rating agency* yang meningkatkan status Indonesia menjadi *investment grade*. Pada Desember 2017 *Fitch Rating* menaikkan peringkat Indonesia menjadi BBB.

Strategi 2017

Di tengah berbagai tantangan yang ada, Perseroan tetap fokus pada *roadmap* perencanaan strategis Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan dapat kami laporan bahwa hingga saat ini, tahap demi tahap pelaksanaan strategi yang dijalankan oleh Perseroan senantiasa mencapai sasaran dengan pencapaian yang sangat memuaskan. Dimulai pada tahun 2013, perseroan berhasil menyelesaikan tahap awal penguatan sumber daya internal dan perluasan kerjasama bisnis. Dan pada tahun ini, kami bersyukur bahwa Perseroan kembali mencatatkan tonggak kesuksesan dalam merampungkan perjalanan implementasi tahap kedua *roadmap* perencanaan strategis, yakni aliansi bisnis untuk keragaman produk bundling berbasis syariah, layanan berbasis IT dan penguatan struktur keuangan.

Kinerja Perseroan 2017

Laba Bersih Perseroan tahun 2017 tercatat sebesar Rp6.226 juta. Kinerja Perseroan tetap positif, hal ini dikarenakan penerimaan atas IJK tahun 2017 sebesar Rp176.300 juta, meningkat 12,8% jika dibandingkan penerimaan IJK Tahun 2016. Pencapaian beban ta'widh di tahun 2017 cukup tinggi yaitu Rp63.633 juta meningkat dari tahun 2016 sebesar Rp37.298 juta. Peningkatan beban ta'widh ini merupakan salah satu bentuk komitmen kami terhadap pelayanan dan penyelesaian ta'widh kepada mitra bisnis tetap kami utamakan.

Saldo ekuitas per 31 Desember 2017 juga tercatat memuaskan sebesar Rp310.636 juta, sedangkan total

and demand for world commodities, weakening China's economic growth, weakening domestic consumption, and strengthening of US Dollar. Nationally, the risk of weakening global economic growth also has a significant impact. It is noted that Indonesia's economic growth was only 5.05 percent, increasing compared to 2016, which was 5.06 percent.

The rise in Indonesia's debt rating is also one indicator of the improving national economy and is well responded by a number of rating agencies, increasing Indonesia's status to investment grade. In December 2017. Fitch Rating raised Indonesia's rating to BBB.

The 2017 Strategy

In the midst of various challenges, the Company remains focused on the Company's Long Term Plan (RJPP) roadmap. And we can convey here that until now the implementation of the strategies carried out by the Company has always reached the target with very satisfying results. Started in 2013, the Company successfully completed the initial stages of strengthening internal resources and expanding business cooperation. And this year, we are grateful that the Company has again recorded a milestone in completing the second phase of the strategic planning roadmap, namely business alliance for diversifying sharia-based bundling products, IT-based services and strengthening financial structures.

The Company's Performance in 2017

The Company's Net Profit for 2017 was recorded at Rp6,226 million. The Company's performance remains positive, due to the revenues from IJK in 2017 amounted to Rp176,300 million, an increase of 12.8% compared to IJK revenues in 2016. Expenses from Ta'widh in 2017 were recorded quite high at Rp63,633 million, increased from 2016 amounting to Rp37,298 million. The increase in ta'widh expenses proves our commitment to our business partners to maintain our priority on services and completion of ta'widh.

The equity balance as of December 31, 2017 was also satisfactory at Rp310,636 million, while total assets

aset mencapai Rp391.355 juta. Pertumbuhan Aset dan Ekuitas Perseroan tahun 2017, masing-masing mencapai 96,4% dan 93,3% dari anggaran tahun 2017.

reached Rp391,355 million. The Assets and Equity growth in 2017 was 96.4% and 93.3% of the 2017 budget, respectively.

Penerapan Tata Kelola Yang Baik

Perseroan senantiasa berkomitmen tinggi untuk menerapkan praktik terbaik Tata Kelola Perusahaan/*Good Corporate Governance* (GCG), terutama dalam menjalankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, kewajaran, dan kesetaraan di seluruh level organisasi. Perseroan yakin bahwa penerapan CGC secara optimal akan melahirkan budaya dan etika kerja yang baik, sehingga seluruh individu Perseroan dapat memberikan kinerja lebih positif, membangun, serta bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.

Sebagai wujud komitmen Perseroan terhadap implementasi CGC, kami pada tahun 2017 menguatkan struktur organisasi dan pengawasannya mencakup unit kerja internal audit, manajemen risiko korporat, manajemen risiko transaksional, tim KPKU, tim GCG, perangkat SOP dan peraturan-peraturan lain yang terkait, serta penyusunan program kerja di Perseroan. Sebagai hasilnya, skor GCG pada tahun ini tercatat cukup memuaskan yakni sebesar 72% atau mencapai kualifikasi "Cukup Baik".

Prospek Usaha

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia dalam dekade terakhir tumbuh signifikan, namun kontribusi terhadap keuangan nasional masih pada kisaran 5 persen. Prospek dan tatanan perkembangan keuangan syariah menunjukkan tren positif dan relatif stabil.

Pangsa pasar perbankan syariah di 2017 mencapai angka 5,12 persen, tertinggi sepanjang keberadaan perbankan syariah di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Aceh yang melakukan konversi secara menyeluruh pada September 2016. Diharapkan, momentum ini terus berlanjut, mengingat masih terdapat BPD (NTB) yang sedang berproses menjadi BPD syariah dan beberapa BPD yang berpotensi untuk melakukan konversi menjadi BPD syariah.

Sejalan dengan proyeksi tersebut untuk menyambut tahun 2018 melalui penerapan langkah-langkah strategis

Implementation of Good Corporate Governance

The Company is always highly committed to implementing the best practices of Good Corporate Governance (GCG), especially in carrying out the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, fairness and equality at all levels of the organization. The Company believes that the implementation of CGC optimally will give birth to a good corporate culture and work ethic, so that all individuals of the Company can provide more positive, constructive and beneficial performance for all stakeholders.

As a manifestation of the Company's commitment to implementing the CGC, in 2017 we have strengthened our organizational structure and supervision, which include internal audit units, corporate risk management, transactional risk management, KPKU team, GCG team, SOP and other related regulations, and work program at the Company. As a result, this year's GCG score was quite satisfactory, achieving 72% or qualified as "Fairly Good".

Business Prospect

The Islamic finance industry in Indonesia in the last decade has grown significantly, but the contribution to national finance is still low at around 5 percent. While the prospects and order of development of Islamic finance show a positive trend and are relatively stable.

The Islamic banking market share in 2017 reached 5.12 percent, the highest in the history of Islamic banking in Indonesia. This is inseparable from the success of the Aceh Regional Development Bank (BPD) in carrying out an overall conversion in September 2016. This momentum is expected to continue, given that there are many BPDs (NTB) are still in the process of becoming sharia BPDs and several others have the potential to convert to become a sharia BPD.

In line with these projections, welcoming 2018, the Company undertook strategic measure to ensure readiness

juga akan memastikan kesiapan Perseroan menyongsong pertumbuhan di masa mendatang. Perseroan juga telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2018 sebagai bagian tahapan strategi jangka panjang guna meraih pertumbuhan yang lebih maksimal.

to meet future growth. The Company has also prepared the 2018 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) as part of the long-term strategy phase to achieve maximum growth.

Penutup

Direksi memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pemangku kepentingan, terutama para Pemegang Saham atas dukungan yang telah diberikan kepada kami, kepada Dewan Komisaris yang telah memberikan amanat dan pandangan yang bermanfaat, kepada mitra usaha yang telah bekerja sama dengan baik dan memberikan kepercayaan kepada kami, serta kepada seluruh pegawai yang telah melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik. Kami berharap agar pengalaman di tahun 2016 bisa menjadi pelajaran berharga untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Closing

On behalf of the Board of Directors, I would like to extend our highest appreciation to all stakeholders, especially the Shareholders, for supporting us; to the Board of Commissioners for giving us mandates and provide us with inputs, to all business partners who have worked well together and put trust upon us, and to all employees who have performed their duties and obligations properly. We hope that our experience in 2016 can be a valuable lesson to be better in the future.

Jakarta,
Atas Nama Direksi
On behalf of the Board of Directors



Soegiharto
Direktur Utama
President Director

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2017 PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH

**Statement of Board of Commissioners and Board of Directors
on the Responsibility for the 2017 Annual Report of
PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah 2017 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan ini.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned below state that all information in the Annual Report of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah for 2017 is presented in its entirety and we are fully responsible for the correctness of the contents in this Annual Report.

This statement is hereby made in all truthfulness.

Jakarta, 2018 / 2018
Dewan Komisaris / Board of Commissioners



Budi Wisakseno
Komisaris Utama/President Commissioner



Yulison Marpaung
Komisaris/Commissioner

Direksi / Board of Directors


Soegiharto
Direktur Utama/President Director

Supardi Najamuddin
Direktur Pemasaran/Director of Marketing



Subagio Istiarto
Direktur Keuangan/Director of Finance

PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile



DATA PERUSAHAAN CORPORATE DATA

Nama Perusahaan/Company Name:

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH

Tanggal Pendirian/Date of Establishment:

29 November 2012/November 29th, 2012

Bidang Usaha/Line of Business:

Penjaminan Pembiayaan, *suretyship* serta lembaga penjamin pembiayaan dalam program Kredit Usaha Rakyat

Financing Guarantee, suretyship, and Sharia guarantor for KUR

Dasar Hukum Kepemilikan/Legal Basis of Ownership:

Berdasarkan Akta No. 45 tanggal 29 November 2012 oleh Hadijah, SH., notaris di Jakarta,

Based on the Deed No. 45 November 29, 2012 by Hadijah, SH., Notary in Jakarta

Modal Dasar/Authorized Capital:

Rp400.000.000.000

Total Aset/Total Assets:

Rp391.354.537.890

Kantor Pusat/Head Office:

Gedung Prima Graha Persada Lantai 6 Jalan Gedung Kesenian No. 3-7, Jakarta Pusat.

Kantor Perwakilan/Representative Office:

No.	Kantor Office	Alamat Address
1	Cabang Jakarta 1 Branch Office Jakarta 1	Gedung Primagraha Persada Lt. 1, JL Gedung Kesenian No. 3-7 Jakarta Pusat 10710
2	Cabang Jakarta 2 Branch Office Jakarta 2	Ruko Perkantoran Tujuh, Jl. Tebet Raya No. 9D Tebet Jakarta Selatan
3	Cabang Bandung Branch Office Bandung	JL Maskumambang No. 29 Bandung
4	KPS Bekasi	Ruko CBD Bekasi Town Square Blok G No. 21 Jl. Raya Cut Meutia Bekasi
5	KPS Medan	Jl. Sei Belutu No. 93 Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kec. Medan Selayang 20131
6	KPS Palembang	Jl. Basuki Rahmat No. 897B Palembang
7	KPS Tangerang	Ruko BSD Sektor 4 Blok RG No. 10, Jl. Pahlawan Seribu, Serpong, Tangerang
8	KPS Makassar	Jl. Kakatua No. 25 Makassar 90121
9	KPS Semarang	Jl. Pamularsih No. 105 Semarang 50149
10	KPS Yogyakarta	Jl. HOS Cokroaminoto No. 146 Kav. 7 Tegalrejo Yogyakarta 55244
11	KPPS Pontianak	Jl. M. Sohor No. 29 E-F Pontianak 78121
12	KPPS Balikpapan	Jl. Achmad Yani KM. 6,9 No. 2, Banjarmasin 70249
13	KPS Denpasar	Jl. Raya Puputan No. 9 Niti Mandala Renon Denpasar Bali 80235
14	KPS Malang	Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 64 Kav. 2 Malang
15	KPS Pekanbaru	Jl. Teuku Umar No. 18 Pekanbaru
16	KPS Surabaya	Jl. Manyar Kartika No. 11 Surabaya
17	KPS Padang	Jl. Veteran No. 32 B Padang

SEKILAS PERUSAHAAN

PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah disingkat Askrindo Syariah didirikan akhir tahun 2012 oleh PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) atau Askrindo, BUMN yang bergerak di bidang asuransi kredit dan *suretyship* dan sejak tahun 2007 juga menjadi lembaga penjamin dalam program Kredit Usaha Rakyat.

Pembentukan Askrindo Syariah merupakan respon dari Askrindo atas perkembangan dunia perkreditan/pembiayaan akhir-akhir ini dimana tuntutan adanya lembaga penjaminan yang secara khusus menjamin pembiayaan berbasis syariah semakin mengemuka seiring dengan semakin pesatnya pertumbuhan industri pembiayaan, baik yang dilaksanakan perbankan syariah maupun lembaga keuangan non bank berbasis syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil dan *multifinance* syariah.

Disamping untuk memenuhi tuntutan dunia usaha, pembentukan Askrindo Syariah juga merupakan pengejawantahan dari rencana jangka panjang Askrindo sebagai upaya optimalisasi modal dan memperbesar sumbangsihnya dalam industri penjaminan nasional. Terkait dengan hal itu, maka salah satu pedoman utama dalam pengembangan usahanya Askrindo Syariah adalah berorientasi kepada pengembangan jejaring usaha Askrindo secara keseluruhan, baik yang bersifat operasional maupun non operasional.

Askrindo Syariah merupakan perusahaan yang pertama berdiri di industri penjaminan pembiayaan berbasis syariah. Namun demikian, usaha ini sesungguhnya telah dilaksanakan perusahaan lain tetapi dalam bentuk unit usaha, yaitu Perum Jamkrindo yang memiliki kesamaan posisi dengan Askrindo dalam program penjaminan KUR, yaitu sebagai penjamin. Dengan posisi demikian, maka di satu sisi Askrindo Syariah memiliki keunggulan berupa kejelasan pertanggungjawaban dalam menjalankan usaha ini.

COMPANY AT A GLANCE

PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, hereinafter referred to as Askrindo Syariah, was established at the end of 2012 by PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) or Askrindo, the SOE engaged in credit insurance and suretyship business and since 2007 has also become a guarantor institution for KUR program.

The establishment of Askrindo Syariah is a response from Askrindo, upon seeing the increasingly rapid development of Sharia-based lending/financing industries, both implemented by Islamic banking and Sharia-based non-bank financial institutions, such as Baitul Maal wat Tamwil and multifinance sharia.

The establishment of Askrindo Syariah is also an embodiment of Askrindo's long-term plan to optimize capital and increase contributions in the national guarantee industry. Related to this, then one of the main guidelines in the business development of Askrindo Syariah is oriented to the development of the overall business network, both operational and non-operational.

Askrindo Syariah is the first company in Indonesia to provide Sharia-based financing guarantees. Previously, these services were carried out by other companies in the form of business units, namely by Perum Jamkrindo which, like Askrindo, also offered a KUR guarantee program. With this position, Askrindo Syariah has the advantage of clarity of accountability in running a Sharia-based financing guarantee business.

VISI, MISI & TATA NILAI PERUSAHAAN

Visi

Menjadi perusahaan penjaminan pembiayaan berbasis syariah yang terkemuka sebagai pendukung pengembangan ekonomi nasional dan berperan dalam pasar global.

Misi

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi nasional khususnya yang berbasis syariah.
2. Memberikan akses kemudahan kepada seluruh pemangku kepentingan bisnis pembiayaan berbasis syariah.
3. Memberikan pelayanan penjaminan yang amanah dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian untuk dapat memberikan perlindungan finansial kepada para pihak terkait.
4. Melakukan pengembangan layanan dan inovasi produk secara berkesinambungan untuk meningkatkan nilai Perusahaan.
5. Melaksanakan tata kelola perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dan integritas.

Budaya Perusahaan

1. Amanah

Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran yang hakiki dalam menjalankan tanggung jawab pekerjaan dan berperilaku secara terpuji.

2. Profesional

Kompeten dan unggul di bidangnya, berdedikasi tinggi, kreatif, disiplin, berpikir positif dengan menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

3. Inovasi

Berupaya secara maksimal dan selalu melakukan terobosan dalam pelayanan.

VISION, MISSION, & CORPORATE VALUES

Vision

Becoming a prominent sharia-based financing guarantee company to support national economic development and play a role in the global market.

Mission

1. Contribute to the national economic development, especially the sharia-based.
2. Provides easy access to all stakeholders of sharia-based financing business.
3. Provides financing guarantee services by prioritizing prudential principle as to provide financial protection to all related parties.
4. Improving services and product innovation continuously to enhance company values.
5. Implementing good corporate governance that upholds professionalism and integrity principles.

Corporate Culture

1. Amanah (Reliability)

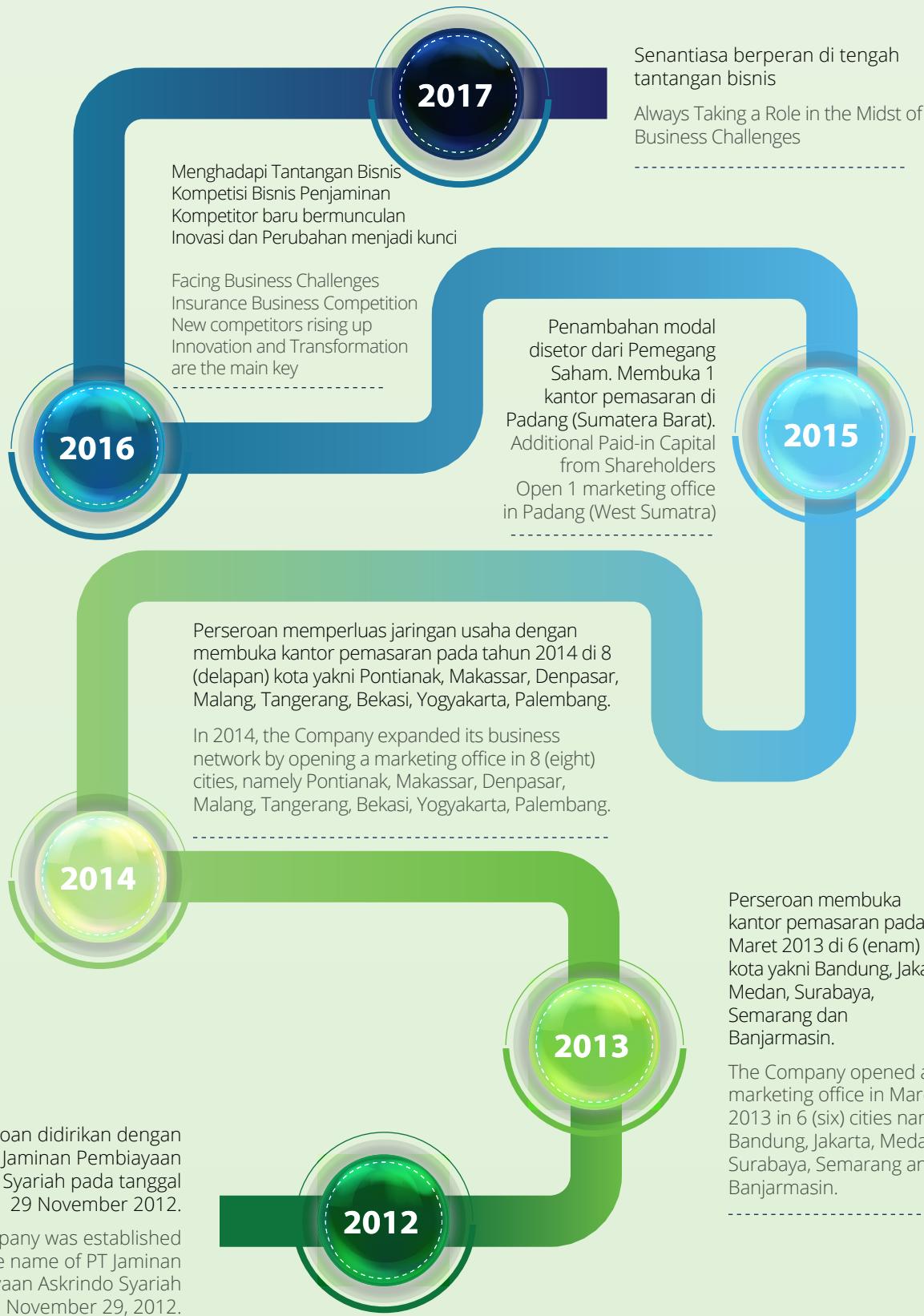
Upholding true honesty in fulfilling work responsibilities and acting truthfully.

2. Professionalism

Having competence and excellence in its field, high dedication, creativity, discipline, positive thoughts and upholding ethics and integrity of profession.

3. Innovation

The Company endeavors to always be the pioneer in providing services.



PENGHARGAAN DAN SERTIFIKAT AWARDS AND CERTIFICATION



Penghargaan Museum Rekor-Dunia Indonesia kepada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah sebagai Lembaga Penjaminan Pembiayaan Syariah Pertama pada 26 Februari 2013.

Indonesian World Record Museum awarded PT Askrindo Syariah Financing Guarantee as the First Sharia Financing Guarantee Institution on February 26, 2013.



ISO 27001:2013

Sistem Manajemen Keamanan Informasi (**Information Security Management System**). Sertifikasi oleh ACS Registrars pada 18 November 2015 hingga 17 November 2016.
ISO 27001: 2013
Information Security Management System.
Certification by ACS Registrars on November 18, 2015 to November 17, 2016.



Penghargaan **Special Award** dari Karim Consulting Indonesia kepada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah sebagai **The Best Business Model Sharia Financing Guarantee** pada 7 September 2015.
Special Award from Karim Consulting Indonesia to PT Askrindo Syariah Financing Guarantee as The Best Business Model Sharia Financing Guarantee on September 7, 2015.



ISO 9001:2015

Sistem Manajemen Mutu (**Quality Management System**). Sertifikasi oleh URS pada 16 Februari 2017 hingga 15 Februari 2020.
ISO 9001: 2015
Quality Management System. Certification by URS from February 16, 2017 to February 15, 2020.

BIDANG USAHA

Dalam menjalankan bisnis sebagai lembaga penjaminan berbasis syariah, Askrindo Syariah mempunyai beberapa produk penjaminan antara lain:

1. Kafalah Pembiayaan (Produktif dan Konsumtif)

Jasa Penjaminan Pembiayaan yang diberikan oleh Askrindo Syariah (Kafil) bagi pengusaha (Makful 'Anhu) dalam upaya memperoleh pembiayaan produktif maupun konsumtif dari Bank Syariah ataupun Lembaga Keuangan Bukan Bank (Makful Lahu), khususnya pengusaha yang tidak memenuhi persyaratan teknis Bank Syariah (kurang agunan) namun usahanya layak dibiayai (*feasible*).

2. Kafalah Bank Garansi dan Suretyship (Surety Bond)

Surety Bond dan Kafalah Bank Garansi adalah produk Suretyship berbasis syariah yang memberikan jaminan kepada Kontraktor atau Bank Penerbit Bank Garansi/ Penerima Jaminan/Makful Lahu atas kemampuan Principal/Terjamin/Makful 'Anhu dalam melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian pokok antara *Principal*/ Terjamin dan *Obligee*.

3. Kafalah Transaksi Perdagangan (Domestik dan Internasional)

Jasa Penjaminan Transaksi Perdagangan yang diberikan oleh Askrindo Syariah (Kafil) yaitu dimana pihak pertama (Penjamin/Kafil) memberikan jaminan kepada pihak kedua (Penerima Jaminan/Makful Lahu), terhadap kemungkinan gagalnya pembayaran sejumlah piutang oleh Terjamin/Makful 'Anhu sesuai dengan perjanjian berbasis syariah antara Penerima Jaminan/Makful Lahu dengan Terjamin/Makful 'Anhu akibat terjamin/ Makful "Anhu mengalami penunggakan pembayaran yang berlarut-larut.

LINE OF BUSINESS

In conducting business as a sharia-based guarantee institution, Askrindo Syariah has several guarantee products including:

1. Kafalah Financing (Productive and Consumptive)

Is a Financing Guarantee Services provided by Askrindo Syariah (Kafil) for entrepreneurs (Makful 'Anhu) in an effort to obtain productive and consumptive financing from Islamic Banks or Non-Bank Financial Institutions (Makful Lahu), especially entrepreneurs who do not meet the technical requirements of Islamic Banks (less collateral) but the business is feasible.

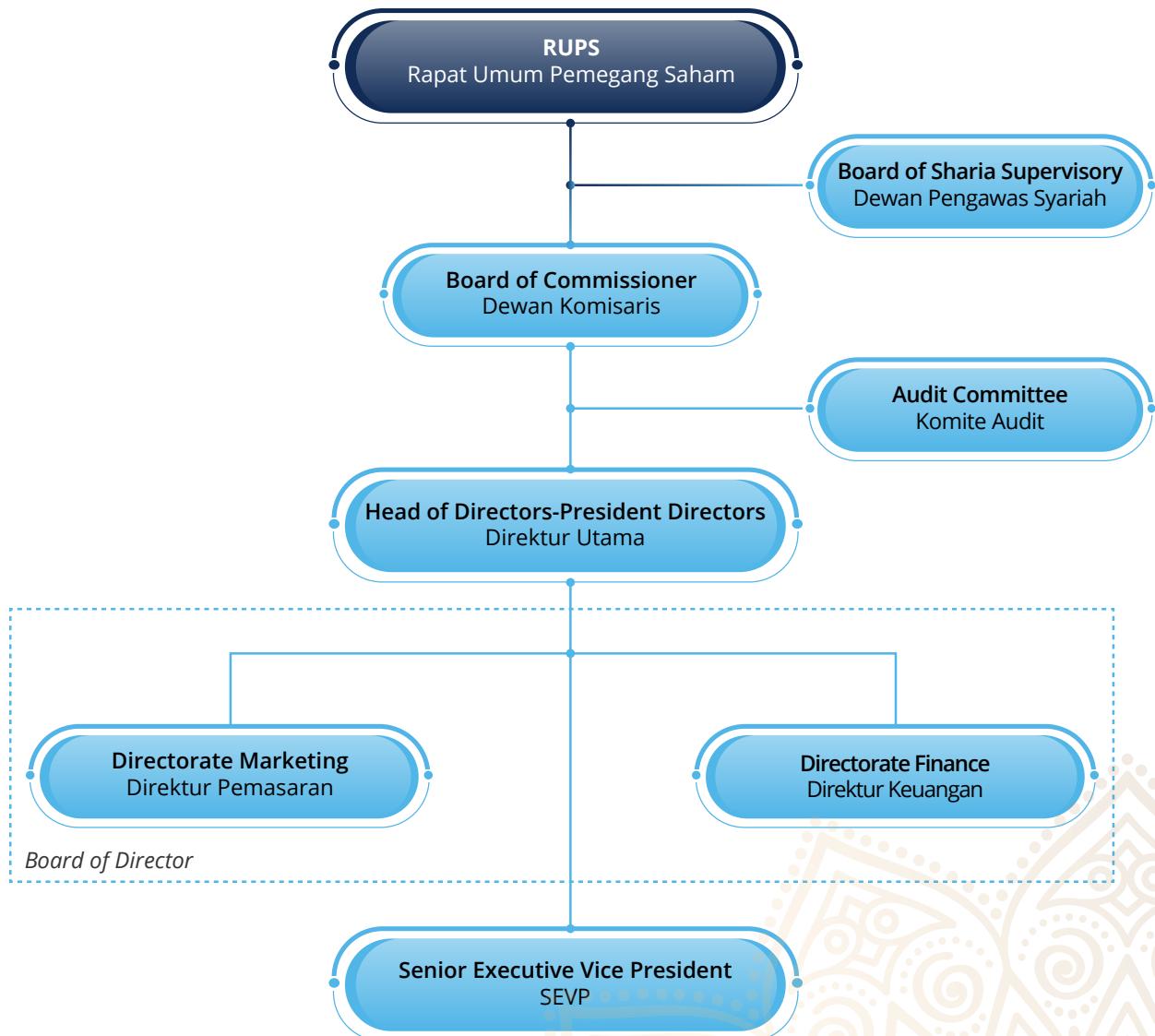
2. Kafalah Bank Guarantee and Suretyship (Surety Bond)

Surety Bond and Kafalah Bank Guarantee are Sharia-based Suretyship product that provides guarantee to Contractor or The Bank Issuing Bank Guarantee/ Obligee /Makful Lahu regarding the capability of Principal/Makful Anhu in fulfilling the obligations in accordance with the main agreement between Principal and Obligee.

3. Kafalah Trading Transactions (Domestic and International)

Trade Transaction Guarantee Services provided by Askrindo Syariah (Kafil) which is where the first party (Guarantor/Kafil) provides guarantees to the second party (Guarantee/Makful Lahu), against the possibility of payment of a number of receivables by the Guaranteed/Makful 'Anhu in accordance with the sharia based agreement between the Recipient of Guarantee/Makful Lahu with Guaranteed/Makful 'Anhu due to guaranteed/Makful "Anhu experienced delinquent protracted payments.

STRUKTUR ORGANISASI ORGANIZATIONAL STRUCTURE



SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Karyawan (komparatif 2 tahun) dan Data pengembangan Kompetensi karyawan yang mencerminkan adanya kesempatan untuk masing-masing level organisasi.

HUMAN RESOURCES

Number of Employees (in 2 years comparison) and Employee Competency development data that reflects the opportunity provided for each level of the organization.

Berdasarkan Jabatan/Level

Keterangan Note	2016	2017
Manager (Assist Manager dan Manager 1)	9	16
Supervisor	14	23
Staff (Junior Staf 1, 2, Staf & Senior Staf)	100	107
JUMLAH/TOTAL	123	146

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Keterangan Note	2016	2017
Strata 2/Post Graduate Degree	7	8
Strata 1/Under Graduate Degree	113	136
D3/Diploma 3	3	2
SMU/High School	-	-
JUMLAH/TOTAL	123	146

Data Pengembangan Kompetensi Karyawan yang telah dilakukan pada tahun buku yang terdiri dari pihak (level jabatan) yang mengikuti pelatihan, jenis pelatihan dan tujuan pelatihan:

By Level of Position

Keterangan Note	2016	2017
Strata 2/Post Graduate Degree	7	8
Strata 1/Under Graduate Degree	113	136
D3/Diploma 3	3	2
SMU/High School	-	-
JUMLAH/TOTAL	123	146

Employee Competency Development Data carried out during the fiscal year under review, consisting of the level of position of employees who attend training, type of training and training objectives:

Level Pegawai* Level of Position	Jumlah Pelatihan Number of Training
Manager	9
Staff	18
Grand Total	27

*(tidak merepresentasikan jumlah pegawai yang ikut pelatihan)

*(does not represent the number of employees participating in the training)

Tujuan Pelatihan Objective of Training	Jumlah Pelatihan Number of Training
Managerial Training	9
Non Managerial Training	8
Soft skill/competency	10
Grand Total	27

Jenis Pelatihan Type of Training	Jumlah Pelatihan Number of Training
Training for Individual	21
Inhouse Training	6
Grand Total	27

BIAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

Selama tahun 2017, Perseroan mengeluarkan biaya pengembangan kompetensi karyawan sebesar **Rp243.048.999** terdiri dari biaya *Training ISO 27001 Lead Implementer, Certified Risk Governance, Inhouse Training Akseptasi, Inhouse Training Penyusunan LPP dan Monitoring Keuangan dan Akuntansi*.

EMPLOYEE COMPETENCE DEVELOPMENT COST

During 2017, the Company's total expenses for employee competency development is **Rp243,048,999**, - consisting of the expenses for ISO 27001 Lead Implementer Training, Certified Risk Governance, Acceptance Inhouse Training, Inhouse Training for LPP Preparation and Financial and Accounting Monitoring.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta No. 45 tanggal 29 November 2012 oleh Hadijah, SH., notaris di Jakarta, modal dasar Perusahaan ini ditetapkan sebesar Rp400.000.000.000 terbagi atas 400.000 saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000.000. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% atau sejumlah 100.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp100.000.000.000.

Berdasarkan akta tersebut diatas sesuai pasal 4 ayat 2 struktur modalnya adalah sebagai berikut:

SHAREHOLDERS COMPOSITION

Based on the Deed No. 45 November 29, 2012 by Hadijah, SH., Notary in Jakarta, the authorized capital of the Company is Rp400,000,000,000, - divided into 400,000 shares, each with a nominal value of Rp1,000,000. The authorized capital that has been placed and paid are 25% or 100,000 shares with a total nominal value of Rp100,000,000,000.

Based on the aforementioned deed above, in accordance with article 4 paragraph 2, the capital structure is as follows:

Keterangan/Description	Saham (Lembar) Share (Sheet)	Saham (%) Share (%)	Nominal (Rp dalam juta/ in Million Rp)
PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia	99,999	99	99,999
Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askindo	1	1	1
JUMLAH/TOTAL	100,000	100	100,000

Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Askindo (Persero) Nomor: S-345/MBU/06/2015 tanggal 12 Juni 2015 perihal Persetujuan Penambahan Modal pada PT Jaminan Pembiayaan Askindo Syariah, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jaminan Pembiayaan Askindo Syariah memutuskan untuk menambah modal disetor sebanyak 150.000 lembar saham senilai @ Rp1.000.000 atau senilai Rp150.000.000.000. Pada tanggal 29 Juni 2015 perusahaan telah menerima setoran

Based on the Letter of the Minister of State-Owned Enterprises, as the Shareholder of PT Askindo (Persero) Number: S345/MBU/06/2015 dated June 12, 2015 concerning Agreement on Capital Addition at PT Jaminan Pembiayaan Askindo Syariah, the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Jaminan Pembiayaan Askindo Syariah, decided to add paid up capital of 150,000 shares worth @ Rp1,000,000, or Rp150,000,000,000 in total. On June 29, 2015 the Company received a deposit of Rp150,000,000,000, so that the Company's paid-up



sebesar Rp150.000.000.000 sehingga modal disetor perusahaan sampai dengan akhir tahun 2015 menjadi sebesar Rp250.000.000.000.

capital until the end of 2015 amounted to Rp250,000,000,000,

Keterangan/ <i>Description</i>	Saham (Lembar) <i>Share (Sheet)</i>	Saham (%) <i>Share (%)</i>	Nominal (Rp dalam juta/ <i>in Million Rp</i>)
PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia	249,999	99	249,999
Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo	1	1	1
JUMLAH	250,000	100	250,000

DAFTAR ENTITAS ANAK DAN/ATAU ASOSIASI

Perseroan tidak memiliki anak perusahaan sehingga tidak ada informasi terkait nama, presentase kepemilikan, bidang usaha dan status operasi terkait dengan anak perusahaan.

LIST OF SUBSIDIARIES AND/OR ASSOCIATIONS

The Company does not have a subsidiary so there is no information regarding the name, percentage of ownership, line of business and operating status associated with the subsidiary.

KRONOLOGI PENERBITAN SAHAM

Sampai dengan tahun 2016, Perusahaan belum mencatatkan saham di Bursa Saham, sehingga tidak ada informasi terkait kronologis pencatatan, perubahan jumlah saham, maupun nama bursa.

SHARE-LISTING CHRONOLOGY

As of 2016, the Company has not listed its shares in the Stock Exchange, hence there is no chronological information on share listings, changes in the number of shares, or names of exchanges.

NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG

CAPITAL MARKET SUPPORTING INSTITUTIONS AND/OR PROFESSIONALS

- **Kantor Akuntan Publik:**
KAP Mirawati, Sensi, Idris dan Rekan, Intiland Tower Lt. 7, Jl. Jend Sudirman Kav. 32, Jakarta 10220.
- **Pemeringkat Efek:**
PT Fitch Ratings Indonesia, Gedung DSB Bank Tower, Lt. 24 Ciputra World 1, Jl. Prof DR Satrio Kav 3-5, Karet Jakarta Selatan.
- **Aktuaria:**
PT Prima Aktuaria, Jl. Salemba Tengah 11, Senen Jakarta Pusat
- **Hukum:**
Kurniawan and Partners, Gedung Boulevard Apartemen Lt. 9E, Jl. Fachrudin No. 5, Tanah Abang-Jakarta Pusat.
- **Public Accountant Firm:**
KAP Mirawati, Sensi, Idris & Associates Rekan, Intiland Tower Lt. 7, Jl. Jend Sudirman Kav. 32, Jakarta 10220.
- **Rating Agency:**
PT Fitch Ratings Indonesia, Gedung DSB Bank Tower, Lt. 24 Ciputra World 1, Jl. Prof DR Satrio Kav 3-5, Karet Jakarta Selatan.
- **Actuarial:**
PT Prima Aktuaria, Jl. Salemba Tengah 11, Senen Jakarta Pusat
- **Legal:**
Kurniawan and Partners, Gedung Boulevard Apartemen Lt. 9E, Jl. Fachrudin No. 5, Tanah Abang-Jakarta Pusat.

PROFIL DEWAN KOMISARIS THE BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE



Budi Wisakseno

**Komisaris Utama/Komisaris
Independen Pengawas
President Commissioner/Independent
Commissioner Supervisor**

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta 18 Juni 1954 dan merupakan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta tahun 1980.

Beliau memulai karir sebagai Staff Clerical Operasional CITIBANK Jakarta (1979-1981), kemudian sebagai Kepala Divisi Ekspor Impor dan Devisa PT BANK UNIVERSAL Jakarta (1989-1992). Beliau juga pernah menjabat sebagai Deputy General Manager Trade Finance - FI & Correspondent Banking Division PT Bank Danamon Jakarta (1992-1994), sebagai Operation Manager Rabobank Jakarta (1993-1994), Direktur Kepatuhan, Direktur Operasi, Direktur Finance, General Manager Operasi dan General Manager SDM di PT Bank Muamalat Indonesia (1995-2002). Kemudian beliau menjabat sebagai Direktur Utama di PT Bank Tugu (2003-2007) dan sebagai Direktur Kepatuhan di PT Bank Syariah Mega (2007-2008), sebelum akhirnya menjabat sebagai Direktur Kepatuhan di PT Bank BRISyariah (2008-2014).

Indonesian citizen, born in Jakarta June 18, 1954 and graduated from the Faculty of Economics, Trisakti University, Jakarta in 1980.

He began his career as Operational Clerical Staff at CITIBANK Jakarta (1979-1981) before assuming the position of Head of the Export and Foreign Exchange Division of PT BANK UNIVERSAL Jakarta (1989-1992). He once also served as Deputy General Manager of Trade Finance - FI & Correspondent Banking Division PT Bank Danamon Jakarta (1992-1994), as Operations Manager for Rabobank Jakarta (1993-1994), Compliance Director, Operations Director, Finance Director, General Manager of Operations and General Manager of HR at PT Bank Muamalat Indonesia (1995-2002). Then he served as President Director at PT Bank Tugu (2003-2007) and as Director of Compliance at PT Bank Syariah Mega (2007-2008), before finally serving as Director of Compliance at PT Bank BRISyariah (2008-2014).



Yulison Marpaung

Komisaris
Commissioner

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta 31 Juli 1961. Merupakan lulusan Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Indonesia tahun 1986, kemudian melanjutkan pendidikan dan mendapatkan gelar Magister Manajemen Keuangan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IGI Jakarta tahun 2000.

Beliau memulai karirnya di BPKP Provinsi Lampung (1990-1993) sebagai Ajun Pengawas Keuangan, kemudian menjabat sebagai Auditor Pertama di BPKP DKI Jakarta (1996-2001), sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan Khusus, Auditor Muda dan Auditor Madya BPKP Sulawesi Tenggara (2001-2003). Beliau kemudian menjabat sebagai Kepala Bidang Akuntan Negara BPKP Kalimantan Barat (2006-2007) dan Kepala Sub Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan BPKP Pusat.

Indonesian citizen, born in Jakarta July 31, 1961. He graduated from the Faculty of Economics, Accounting Department, University of Indonesia in 1986, then continued his education and obtained a Master's Degree in Financial Management from IGI School of Economics in 2000 in Jakarta.

He began his career as Adjunct Supervisor at BPKP of Lampung Province (1990-1993), then served as First Auditor at BPKP of DKI Jakarta (1996-2001), as Head of Special Audit Section, Junior Auditor and Semi-Senior Auditor for BPKP of Southeast Sulawesi (2001-2003). He then served as the Head of State Accounting Division at BPKP of West Kalimantan (2006-2007) and the Head of the Sub Directorate of Supervision of the Financial Services Companies of BPKP.

PROFIL DIREKSI THE BOARD OF DIRECTORS PROFILE

Pribadi
Direktur Utama
President Director
(Periode 2013 s.d. Januari 2018)
(Period 2013 until January 2018)



Warga Negara Indonesia, 52 tahun. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 22 Februari 2013 berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No.S-128/MBU/2013 tentang Persetujuan Pengurus PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Teknologi Informasi di PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia pada tahun 2012.

Beliau meraih gelar S2 pada program studi Akuntansi Manajemen di Universitas Indonesia pada tahun 1989.

Indonesian citizen, 52 years old. He serves as the President Director of the Company since February 22, 2013 based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No.S-128/MBU/2013 concerning Approval on the Board of Management of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. Prior to his current position, he served as the Head of Information Technology Division at the Indonesian Credit Insurance Company in 2012.

He earned his Master's Degree in Management Accounting from the University of Indonesia in 1989.



Soegiharto

Direktur Utama

President Director

(Periode Desember 2017* s.d. saat ini)

(Period December 2017* until present)

Warga Negara Indonesia, 51 tahun. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tanggal 5 Oktober 2017 berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. SR-586/MBU/10/2017 tentang persetujuan pengangkatan anggota Direksi PT Jaminan Pembiayaan Askindo Syariah. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai *Area Managing Director* Kantor Cabang Jakarta Kemayoran sejak tahun 2016.

Beliau meraih gelar sarjana Bidang Administrasi dan Keuangan dari Universitas Pancasila dan S2 Manajemen Keuangan di STM PPM Jakarta.

Indonesian citizen, 51 years old. He serves as the President Director of the Company since October 5, 2017 based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. SR-586/MBU/10/2017 concerning Approval on the Board of Director of PT Jaminan Pembiayaan Askindo Syariah. Prior to his current position, he served as the Area Managing Director at the Branch Office Jakarta Kemayoran in 2016.

He earned a bachelor's degree in Administration and Finance from the University of Pancasila and his Master's Degree in Financial Management at STM PPM Jakarta.

* Menunggu hasil ketetapan dari OJK

* Waiting for the FSA's stipulation result

Meivyta B. Husman

Direktur Operasional

Director of Operations

(Periode 2013 s.d. Oktober 2017)
(Period 2013 until October 2017)



Warga Negara Indonesia, 44 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 22 Februari 2013 berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No.S-128/MBU/2013 tentang Persetujuan Pengurus PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. Beliau memiliki pengalaman menjabat berbagai posisi penting, diantaranya sebagai Kepala Divisi Syariah PT (Persero) Relindo pada tahun 2008 dan Kepala Departemen Pertanggungan di PT (Persero) Relindo sejak tahun 2002-006.

Meivyta B. Husman meraih gelar S2 Program Beasiswa untuk Major Health di Universitas Melbourne, Australia pada tahun 2008.

Indonesian citizen, 44 years old. She serves as Director since February 22, 2013 based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. S-128/MBU/2013 concerning Approval on the Board of Management of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. She has experience in holding various key positions, including as the Head of the Syariah Division of PT (Persero) Relindo in 2008 and the Head of the Department of Insurance at PT (Persero) Relindo since 2002-2006.

Meivyta B. Husman earned a Scholarship Program for Master's Degree in Major Health at the University of Melbourne, Australia in 2008.



Supardi Najamuddin

Direktur Pemasaran

Director of Marketing

(Periode Oktober 2017* s.d. saat ini)

(Period December 2017* until present)

Warga Negara Indonesia, 48 tahun. Lahir di Bulukamba, 4 Oktober 1970. Menjabat sebagai Direktur Pemasaran sejak 5 Oktober 2017 berdasarkan Surat Menteri BUMN No. SR-586/MBU/10/2017.

Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi Akuntansi di Universitas Hasanuddin Makassar dan meraih gelar Master bidang Perbankan Islam dari Universitas Indonesia Jakarta.

Beliau lama berkarier di BNI Syariah dan pernah menjabat sebagai Branch Manager Kantor Cabang Fatmawati (2010). Beliau kemudian ditugaskan di Bank BNI Syariah Division Head di beberapa divisi, di antaranya di Divisi Pengendalian Keuangan dan Operasional (2011), Divisi Komunikasi, Jaringan dan Logistik (2013), Network and General Affairs Division (2014)(2016), Staf Khusus Direksi (2014), Funding and Transactional Division (2015), dan Divisi Pengelolaan dan Pengadaan Aset Tetap. Pada Januari 2018 Beliau dipercaya sebagai Senior Executive Vice President di PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.

* Menunggu hasil ketetapan dari OJK

Indonesian Citizen, 48 years old. Born in Bulukamba, 4 October 1970. He serves Director of Marketing since 5 October 2017 based on Letter from the Minister of SOEs of Republic of Indonesia No. SR-586/MBU/10/2017.

He graduated with a Bachelor's Degree in Economic Accounting from the University of Hasanuddin Makassar and Master's Degree in Islamic Banking from the University of Indonesia, Jakarta.

Spent a long career in BNI Syariah and once served as Branch Manager at Branch Office Fatmawati (2010). Later, he assumed a number of positions as Division Head in Bank BNI Syariah, among others Division of Financial and Operational Control (2011), Division of Communication, Network and Logistics (2013), Network and General Affairs Division (2014)(2016), Special Staff for the Board of Directors (2014), Funding and Transactional Division (2015), and Division of Management and Procurement of Fixed Assets. In January 2018, he is appointed as the Senior Executive Vice President of PT Askrindo Syariah Financing Guarantee.

* Waiting for the FSA's stipulation result

**Muhammad Effendy
Nasution**

Direktur Keuangan

Director of Finance

(Periode 2013 s.d. Oktober 2017)

(Period 2013 until October 2017)



Warga Negara Indonesia, lahir di Medan 29 November 1964. Merupakan lulusan Sarjana Akuntansi Universitas Satya Negara Indonesia tahun 1996, kemudian melanjutkan pendidikan S2 Akuntansi di PPM Manajemen dan lulus tahun 2002.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Keuangan Askrindo Syariah sejak tahun 2013, beliau memulai karir di PT Askrindo pada tahun 1990 sebagai Pelaksana Dinas. Kemudian beliau juga menjabat sebagai Kepala Seksi Akuntansi (2000-2007) dan sebagai Kepala Kantor Cabang Medan Desember (2007-2010). Beliau kemudian menjabat sebagai Pj. Kepala Bagian Akuntansi dan Anggaran PT (Persero) Askrindo (2010-2011) dan kemudian sebagai Kepala Bagian Akuntansi & Anggaran PT (Persero) Askrindo (2011-2013).

Indonesian citizen, born in Medan November 29, 1964. Graduated with a Bachelor's Degree in Accounting from the University of Satya Negara Indonesia in 1996, then continued his education to Master's Degree in Accounting at PPM Manajemen and graduated in 2002.

Prior to begin serving as the Financial Director of Askrindo Syariah in 2013, he started his career at PT Askrindo in 1990 as Executive. Then he served as the Head of Accounting Section (2000-2007) and the Head of Medan Branch Office in December (2007-2010), prior to serving as Acting Head of Accounting and Budget Section of PT (Persero) Askrindo (2010-2011) and later as Head of Accounting & Budget Section of PT (Persero) Askrindo (2011-2013).



Subagio Istiarno

Direktur Keuangan

Director of Finance

(Periode Oktober 2017 s.d. saat ini)

(Period October 2017 until present)

Warga Negara Indonesia, 54 tahun. Lahir di Solo 4 November 1962. Menyelesaikan studi Diploma 3 (D3) Akuntansi di STAN Jakarta tahun 1984, kemudian melanjutkan pendidikannya dan mendapat gelar Sarjana Akuntansi STIE Swadaya Jakarta tahun 1993. Pada tahun 2001 meraih gelar Magister Manajemen di STIE IPWI Jakarta.

Beliau mulai menjabat sebagai Direktur Keuangan Askrindo Syariah pada Oktober 2017. Sebelumnya berkarir di PT Reasuransi Nasional Indonesia sebagai Kepala SPI (2012-2017), dan sebagai Kepala Divisi SDM dan Umum (2010-2012).

Beliau mengawali karier sebagai Auditor di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan (1984-1996), dan pernah bertugas di BPKP pada Deputi Pengawasan BUMN di Direktorat Pengawasan Lembaga-Lembaga Keuangan-Subdit Was Asuransi dan LKBN. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi (2004-2010), dan Kepala Bagian Akuntansi/Administrasi Keuangan di PT Reasuransi Nasional Indonesia (1996-2004).

Indonesian Citizen, 54 years old. Born in Solo, 4 November 1962. Graduated with Diploma 3 (D3) in Accounting from STAN Jakarta in 1984, then obtained a Bachelor's Degree in Accounting from STIE Swadaya Jakarta in 1993. In 2001 he graduated with a Master's Degree in Management from STIE IPWI Jakarta.

He is appointed as the Director of Finance of Askrindo Syariah in October 2017. Prior to this, he served at PT Reasuransi Nasional Indonesia as Head of SPI (2012-2017), and Head of HR and General Affairs Division (2010-2012).

Started career as Auditor at the Representative Office of BPKP at the Province of South Sulawesi (1984-1996), and once served in BPKP at SOEs Supervision Deputy of Directorate of Supervision of Financial Institutions – Sub Directorate of Supervision of Insurance and LKBN. He once served as the Head of the Finance and Accounting Division (2004-2010), and the Head of the Accounting/Financial Administration Division at PT Reasuransi Nasional Indonesia (1996-2004).

DEWAN PENGAWAS SYARIAH BOARD OF SHARIA SUPERVISORY



DAUD RASYID

**Anggota Dewan Pengawas/
Member of Sharia Supervisory Board**

Warga Negara Indonesia, 54 tahun. Ditetapkan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan sejak 10 Desember 2012 berdasarkan rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. U-448/DSN-MUI/XII/2012. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah pada unit usaha asuransi syariah PT Askrida.

An Indonesian citizen, aged 54 years old. He was appointed Member of Sharia Supervisory Board on December 10, 2012 in accordance with recommendation from National Islamic Councils of Indonesian Councils of Ulama No. U-448/DSN-MUI/XII/2012. Currently he also serves as Member of Sharia Supervisory Board for sharia insurance unit of PT Askrida.



MUHAMMAD ZUBAIR

**Anggota Dewan Pengawas/
Member of Sharia Supervisory Board**

Warga Negara Indonesia, 54 tahun. Ditetapkan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan sejak 10 Desember 2012 berdasarkan rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. U-448/DSN-MUI/XII/2012. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BSNP) periode 2011–2016.

An Indonesian citizen, aged 54 years old. He was appointed Member of Sharia Supervisory Board on December 10, 2012 in accordance with recommendation from National Islamic Council of Indonesian Council of Ulama No. U-448/DSN-MUI/XII/2012. He previously served as a member of National Institution for Professional Certification from 2011–2016.



KEPALA DIVISI HEAD OF DIVISION



1. Shakti Agustono (Kepala Divisi SDM Umum/Head of HR and General Affairs Division)
2. Heddy Fachradi (Kepala Divisi Akseptasi dan Penjaminan/Head of Acceptance and Guarantee Division)
3. Khairul Fata (Kepala Divisi Pemasaran dan Pengembangan Produk/
Head of Product Marketing and Development Division)
4. Agung H Budi (Kepala SPI/Head of IAU)



2

3

4



01 KINERJA PERUSAHAAN
TAHUN 2017
Company
Performance 2017

02 LAPORAN MANAJEMEN
Management's Report

03 PROFIL PERUSAHAAN
Company Profile

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Management Discussion and Analysis





TINJAUAN MAKROEKONOMI

Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan. Pada kuartal II 2017 perekonomian tumbuh tercatat berada di level 5.01%, tidak bergerak dari posisi pada kuartal I yang juga berada pada level 5.01%. Secara *year on year* (yoY), bahkan pertumbuhan di kuartal II 2017 lebih kecil dibandingkan dengan tahun lalu yang tercatat sebesar 5.18%. Bila melihat kondisi saat ini, maka cukup sulit bagi Pemerintah untuk mengejar target pertumbuhan domestik bruto (PDB) tahun 2017 yang sebesar 5,2%.

Melemahnya kondisi perekonomian Indonesia ditandai dengan perlambatan pada sektor konsumsi yang selama ini menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan sektor konsumsi tercatat sebesar 4,95%, lebih rendah dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu, yakni sebesar 4,93%. Hal ini ditengarai terjadi karena melemahnya daya beli masyarakat sebagai imbas faktor psikologis melihat kondisi ekonomi global saat ini.

Sementara itu, sektor investasi dan perdagangan mengalami kenaikan yang signifikan. Sektor investasi tumbuh sebesar 5,35%, lebih tinggi dibandingkan kuartal I yang sebesar 4,78% dan kuartal II *year on year* yang sebesar 4,18%. Sektor investasi tumbuh karena ditopang proyek infrastruktur pemerintah dan sektor konstruksi swasta. Di sektor perdagangan, ekspor tumbuh sebesar 3,36% dan impor tumbuh 0,55%. Pertumbuhan di sektor perdagangan ini lebih baik dibandingkan dengan periode kuartal II tahun lalu, dimana ekspor tercatat negatif 2,2% dan impor negatif 3,2%.

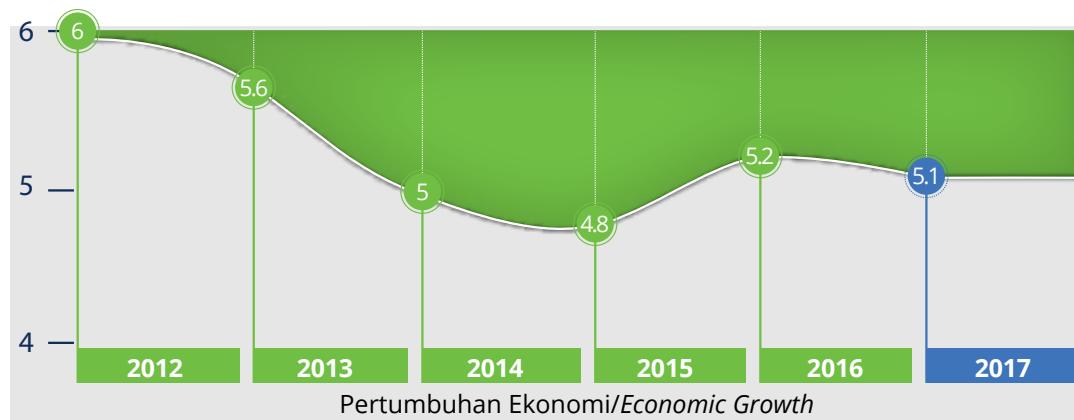
MACROECONOMIC REVIEW

In 2017, the Indonesian economic growth experienced a slowdown. In the second quarter of 2017, the economy grew at a level of 5.01%, unmoving from the position in the first quarter which was also at the level of 5.01%. Year on year (yoY), the growth in the second quarter of 2017 was even smaller than the last year which was recorded at 5.18%. Taking the current circumstance into consideration, it is quite difficult for the Government to pursue the 2017 gross domestic product (GDP) target of 5.2%.

The weakening of the Indonesian economy is marked by a slowdown in the consumption sector which has been supporting national economic growth. The growth of the consumption sector was recorded at 4.95%, lower than the same quarter last year, which was 4.93%. This was allegedly due to the weakening of people's purchasing power as a result of psychological factors upon seeing the current global economic conditions.

Meanwhile, the investment and trade sectors experienced a significant increase. The investment sector grew by 5.35%, higher than the first quarter of 4.78% and the second quarter of the year which amounted to 4.18%. The investment sector grew because it was sustained by government infrastructure projects and the private construction sector. In the trade sector, exports grew by 3.36% and imports grew 0.55%. Growth in the trade sector was better than last year's second quarter period, where exports were recorded negative 2.2% and negative imports 3.2%.

Trend Pertumbuhan Ekonomi 2012-2017





Pertumbuhan ekonomi pada semester II 2017 diproyeksikan mencapai 5,2% dengan asumsi pertumbuhan investasi di Indonesia meningkat menyusul pulihnya harga komoditas. Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan perekonomian pada semester II 2017 bisa tercapai 5,2-5,3%. Pertumbuhan perekonomian diharapkan akan tumbuh dengan adanya pertumbuhan ekspor di tahun 2017 yang lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya. Selain itu perbaikan investasi dan infrastruktur yang menjadi kunci peningkatan produktivitas.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi sampai dengan Juli 2017 sebesar 0,22% *month to month* (mtm), sedangkan secara tahunan sebesar 3,88% secara *year on year* (yo). Inflasi terjadi karena kenaikan harga pada sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, seperti kelompok bahan makanan sebesar 0,21%, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,57%, kelompok perumahan, air listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,06%. Sementara kelompok sandang naik sebesar 0,06%, kelompok kesehatan sebesar 0,15% dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,62%. Sementara itu, untuk kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks adalah kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,08%.

Dari 82 kota IHK, ada 59 kota yang mengalami inflasi dan 23 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di kota baubau yang sebesar 2,4% (*month to month*) dan terendah di kota Meulaboh sebesar 0,01%. Sementara untuk kota yang mengalami deflasi yang tertinggi yakni di kota Merauke sebesar 1,5% dan Probolinggo sebesar 0,07%.

PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH

Perbankan syariah nasional menunjukkan pertumbuhan positif dalam dekade terakhir, sebagaimana yang tercermin dari pertumbuhan volume usaha, dana investasi dan dana titipan masyarakat yang terus berlanjut, begitu pula dengan penyaluran pembiayaan. Sampai dengan semester I tahun 2017, pertumbuhan bisnis perbankan syariah didorong oleh penyaluran pembiayaan segmen korporasi, salah satunya adalah sektor infrastruktur.

Target pemerintah untuk meningkatkan pangsa keuangan Syariah hingga mencapai sebesar 10% pada tahun 2020 memerlukan strategi. Pertama, strategi pengelolaan

Economic growth in the second semester of 2017 is projected to reach 5.2% assuming investment growth in Indonesia has increased following the recovery in commodity prices. The government projects the economic growth in the second semester of 2017 to reach 5.2-5.3%. Economic growth is expected to grow along with higher export growth in 2017 compared to the previous period. In addition, improvements in investment and infrastructure are key to increasing productivity.

The Central Statistics Agency (BPS) recorded inflation up to July 2017 at 0.22% month to month (mtm), while on an annual basis it was 3.88% year on year (yo). Inflation occurs due to price increases in most expenditure group indices, such as foods by 0.21%, processed food, beverages, cigarettes and tobacco by 0.57%, housing, electricity, gas and fuel by 0.06%. While the clothing group rose by 0.06%, the health group by 0.15% and the education, recreation and sports group by 0.62%. Meanwhile, the expenditure group that experienced a decrease in index was the transportation, communication and financial services group of 0.08%.

Out of 82 consumer price index (IHK) cities, 59 cities experienced inflation and 23 cities experienced deflation. The highest inflation is in the city of Baubau which amounted to 2.4% (month to month), while the lowest is in the city of Meulaboh by 0.01%. Cities experiencing highest deflation are Merauke city at 1.5% and Probolinggo at 0.07%.

DEVELOPMENT OF SHARIA BANKING

National sharia banking recorded a positive growth in the past decade, as reflected in the continuing growth of business volume, investment funds, public deposit funds and financing disbursements. Until the first semester of 2017, the growth of the sharia banking business is driven by the distribution of corporate segment financing, one of which is the infrastructure sector.

The government's target to increase the share of Islamic finance by up to 10% by 2020 requires a strategy. First, risk management strategy. Islamic banking needs to pay

risiko. Perbankan syariah perlu memperhatikan dua kunci pengelolaan risiko, yakni potensi terjadinya risiko dan dampak dari risiko tersebut. Kedua, strategi pengelolaan infrastruktur dalam mendukung kegiatan operasional bank. Bagi bank syariah yang terafiliasi dengan bank konvensional, prinsip *platform sharing* akan sangat membantu dalam meminimalkan biaya operasional sehingga kinerja bank syariah akan menjadi lebih efisien. Ketiga, pengelolaan likuiditas. Perbankan syariah perlu mengambil langkah lebih agresif dalam mendapatkan dana jangka panjang untuk mengelola likuiditas.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2016, keberadaan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dalam mengembangkan potensi keuangan dan ekonomi syariah di Indonesia, diharapkan dapat memicu industri keuangan syariah, termasuk perbankan syariah. Inklusi keuangan dan ekonomi syariah ke dalam arus-utama strategi nasional akan membantu pemerintah mencapai tujuan pembangunan, dengan enam pilar sebagai berikut:

- Mengundang investasi asing untuk mendanai proyek infrastruktur, pendidikan dan pertanian. Investasi tersebut dapat berasal dari negara-negara muslim yang kaya akan minyak dan gas, investor konvensional internasional dan investor dari ASEAN yang mencari aset baru untuk memperluas portofolio investasi dalam instrumen syariah.
- Mendorong tumbuhnya tabungan domestik untuk mendanai proyek-proyek nasional dan mendukung iklim investasi yang lebih baik.
- Mendiversifikasi sumber dana dari pemerintah dan sektor korporasi untuk manajemen risiko yang lebih baik.
- Memperluas jangkauan dan penetrasi fasilitas keuangan bagi semua segmen masyarakat.
- Meningkatkan daya saing industri keuangan melalui persaingan yang sehat antara institusi keuangan konvensional dan Syariah, dengan berfokus pada inovasi produk, kualitas layanan dan efisiensi melalui skala ekonomi yang adil.
- Menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kemandirian ekonomi dan mampu menghadapi tantangan yang timbul dari integrasi ASEAN di masa mendatang.

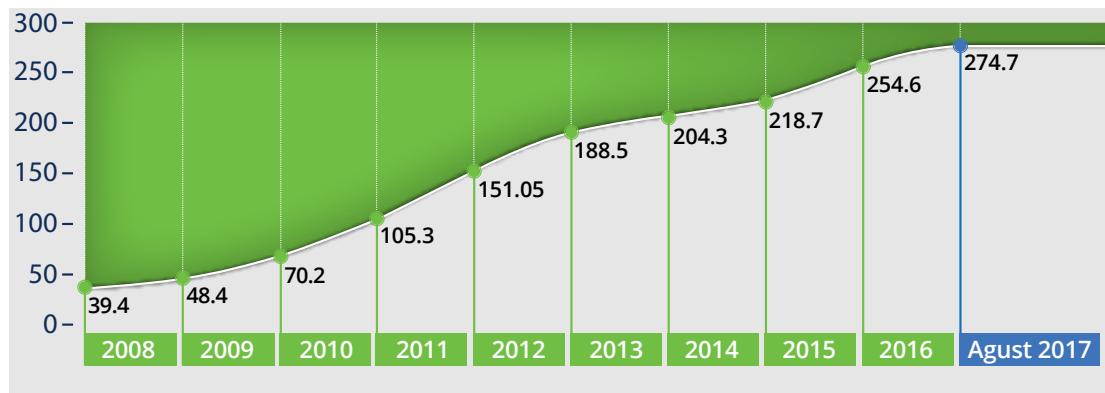
attention to the two keys to risk management, namely the potential occurrence of risks and the impact of these risks. Second, strategy to manage infrastructure in supporting bank operations. For Islamic banks affiliated with conventional banks, the principle of platform sharing will greatly help minimize operational costs so that the performance of Islamic banks will be more efficient. Third, managing liquidity. Islamic banking needs to take more aggressive steps in obtaining long-term funds to manage liquidity.

Through Presidential Regulation Number 91 of 2016, the existence of the National Islamic Finance Committee (KNKS) in developing Islamic financial and economic potential in Indonesia, is expected to trigger the Islamic finance industry, including Islamic banking. Islamic financial and economic inclusion into the mainstream of national strategies will help the government achieve development goals, with the following six pillars:

- Invite foreign investment to fund infrastructure, education and agriculture projects. Such investment can be from Muslim countries rich in oil and gas, conventional investors from all over the world and ASEAN investors, who seeks for new assets to expand their investment portfolios in Islamic instruments.
- Encouraging the growth of domestic savings to fund national projects and support a better investment climate.
- Diversifying sources of funds from the government and the corporate sector for better risk management.
- Extending the reach and penetration of financial facilities for all segments of society.
- Increasing the competitiveness of financial industries through healthy competition between conventional financial institutions and Sharia, focusing on product innovation, service quality and efficiency through a fair scale of economics.
- Making Indonesia economically independent and is capable to face the challenges arising from ASEAN integration in the future.



Sharia Banking Financing Trend



TINJAUAN OPERASIONAL

Tinjauan kinerja operasional Perseroan 2017 disusun dengan memperhatikan perkembangan usaha, realisasi kegiatan perusahaan sampai dengan bulan September 2017, serta dengan berdasarkan asumsi atas kondisi perekonomian pada Semester II tahun 2017. Jumlah pengguna jasa seluruh produk di tahun 2017 mencapai 106.462 Debitur. Informasi debitur menurut per-KC & KPS dapat dilihat pada tabel berikut ini:

OPERATIONAL REVIEW

The review on the Company's operational performance in 2017 is prepared by analyzing business development, realization of business activities up to September 2017, and is based on the assumptions on economic conditions in the second semester of 2017. The number of service users for all products in 2017 is recorded at 106,462 Debtors. Debtor information by KC & KPS can be seen in the following table:

Jumlah Informasi Debitur Per-KC & KPS

No.	Kantor Cabang/ <i>Branch Office</i>	Jumlah Debitur/ <i>Total of Debtor</i>	DEB
1	ADC KANTOR PUSAT	7,728	325
2	KC BANDUNG	9,776	666
3	KC JAKARTA 01	8,740	666
4	KC JAKARTA 02	22,304	1,482
5	KPS BALIKPAPAN	2,822	239
6	KPS BEKASI	3,922	317
7	KPS MAKASSAR	3,116	252
8	KPS MALANG	2,604	191
9	KPS MATARAM	4,417	352
10	KPS MEDAN	5,918	519

No.	Kantor Cabang/ Branch Office	Jumlah Debitur/ Total of Debtor	DEB
11	KPS PADANG	5,791	542
12	KPS PALEMBANG	5,331	458
13	KPS PEKANBARU	2,900	226
14	KPS PONTIANAK	1,259	90
15	KPS SEMARANG	3,576	306
16	KPS SURABAYA	5,723	365
17	KPS TANGERANG	5,693	399
18	KPS YOGYAKARTA	4,842	317
GRAND TOTAL		106,462	7,712

Perolehan Ujrah secara keseluruhan pada tahun 2017 sebesar Rp176.300 juta, sebagaimana yang tersaji dalam tabel di bawah ini:

Total Premi received in 2017 amounted to Rp176,300 million as presented in the table below:

Ujrah Per-Produk

Premi Per-Product

(Dalam Jutaan Rupiah/in Million Rupiah)

No.	Jenis Produk Type of Product	Nilai Ujrah Amount of Premi
1.	Kafalah Pembiayaan/Kafalah for Financing	174.708
2.	Kafalah Bank Garansi/Kafalah for Bank Guarantee	1.557
3.	Kafalah Surety/Kafalah for Surety	35
Jumlah/Total		176.300

Kafalah Pembiayaan

Perusahaan menjamin segala jenis pembiayaan, baik pembiayaan skala kecil maupun skala menengah, seperti Pembiayaan Mikro, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Konsumsi, Pembiayaan Kepemilikan Emas dan Penjaminan Proyek-Proyek, yang sifatnya berkelanjutan, dengan skema *stand by loan* yang menggunakan *terms of condition* dan proses *underwriting* yang berhati-hati.

Dari pelaksanaan operasional usaha pada tahun 2017, total pendapatan Ujrah dari kafalah pembiayaan mencapai Rp174.708 juta.

Outstanding Kafalah

The Company guarantees all kind of financing, be it small or medium scale financing, such as Micro Financing, Working Capital Financing, Investment Financing, Consumption Financing, Gold Ownership Financing and Guarantee Projects, which are of a sustainable nature, with a stand-by loan scheme, under a prudent Terms of Condition and Underwriting process.

From the business operation in 2017, total Premi from Kafalah for financing amounted to Rp174,708 million.





Kafalah Bank Garansi dan Surety

Dari total nilai kafalah tahun 2017 tersebut diperoleh total Ujrah sebesar Rp1.557 juta. Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan penggunaan produk Bank Garansi oleh perbankan syariah nasional.

Pada tahun 2017, dari total nilai kafalah tersebut diperoleh total ujrah sebesar Rp35,4 juta. Produk Kafalah Surety belum memberikan kontribusi yang maksimal karena pangsa pasarnya belum luasnya untuk produk surety di perbankan syariah.

Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Lembaga Keuangan Syariah

Pada tahun 2017, Perseroan melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan sebagian besar Lembaga Keuangan Bank dan Bukan Bank Syariah.

TINJAUAN KEUANGAN

Uraian mengenai kinerja keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan yang disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku umum di Indonesia. Laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati, Sensi, Idris dan Rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material, yakni posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas, sesuai standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kinerja keuangan perusahaan ini dibahas dengan memperhatikan penjelasan dari pihak auditor eksternal mengenai catatan Laporan Keuangan perusahaan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan ini.

Laporan Posisi Keuangan

Kafalah Bank Guarantee and Surety Bond

From the total kafalah in 2017, total Premi generated was Rp1,557 million, indicating an increase in the use of Bank Guarantee products provided by national Islamic banking.

In 2017, out of the total value of kafalah above, the amount of premi generated was Rp35.4 million. Kafalah Surety has yet to provide maximum contribution since the market for surety products in Islamic banking has not grown.

Cooperation Agreement (PKS) with Islamic Financial Institutions

In 2017, the Company entered into a Cooperation Agreement (PKS) with most of the Bank's Financial Institutions and Non-Islamic Banks.

FINANCIAL REVIEW

The description of this financial performance for the year ended December 31, 2017, is based on the Company's Financial Statements presented in accordance with the Financial Accounting Standards (PSAK) generally accepted in Indonesia. The said financial statements have been audited by the Public Accountant Firm Mirawati, Sensi, Idris and Partners with fair opinions in all material respects, namely the financial position, financial performance and cash flow, in accordance with Indonesian Financial Accounting standards.

The Company's financial performance is discussed by taking into account the explanations from external auditor regarding the records of the Company's financial statements, as an integral part of this annual report.

Balance Sheet

Keterangan	Tahun/Year		Pertumbuhan/ Growth
	2017	2016	
Kas dan Bank/Cash and Bank	35,762,042,033	7,427,003,051	382%
Piutang Ujrah /Ujrah Receivables	5,913,042,609	9,671,534,114	-39%
Piutang Ta'widh/Ta'widh Receivables	8,379,785,803	1,606,427,204	422%
Piutang Investasi/Investment Receivables	153,183,255	155,903,945	-2%

Keterangan	Tahun/Year		Pertumbuhan/ Growth
	2017	2016	
Piutang Lain-Lain/Other Receivables	-	29,476,969	-100%
Biaya dibayar dimuka/Prepaid Expenses	3,545,500,568	767,781,534	362%
Pajak dibayar dimuka/Prepaid Tax	3,962,957,690	1,097,457,811	261%
Investasi/Investment	318,884,943,750	327,737,433,372	-3%
Aset Pajak Tangguhan/Deferred Tax Assets	2,080,512,450	116,110,886	1692%
Aset Tetap/Fix Assets	10,288,978,961	4,824,308,773	113%
Biaya Tangguhan/Deferred Expenses	1,934,340,771	2,688,119,779	-28%
Aset Lain/Other Assets	449,250,000	1,087,690,465	-59%
TOTAL ASET/TOTAL ASSETS	391,354,537,890	357,209,247,903	10%

Berikut adalah penjabaran dari tabel di atas:

The description of the table above are as follows:

Total Aset

Total aset perseroan per 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp391.354 juta atau meningkat 10% dari realisasi total aset di 2016 yang hanya sebesar Rp357.209 juta. Aset di 2017 terdiri dari aset lancar yang didominasi oleh aset investasi yang meliputi Deposito dan Reksadana, sebesar Rp318.884 juta.

Total Assets

The Company's total assets as of December 31, 2017 were recorded at Rp391,354 million grew 10% from the realization of total assets in 2016 of only Rp357,209 million. Assets in 2017 consist of current assets which was dominated by investment assets including time-deposits and mutual funds, amounting to Rp318,884 million.

Aset Tetap

Aset tetap per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp10.288 juta, meningkat 113% dari realisasi aset tetap tahun 2016, yakni sebesar Rp4.824 juta. Aset tetap terdiri dari peralatan computer dan non computer, perabot kantor, renovasi dan gedung. Kenaikan aset tetap di 2017 disebabkan oleh pembelian gedung Kantor Cabang sebagai penunjang kegiatan operasional perusahaan.

Fixed assets

Fixed assets as of December 31, 2017 amounted to Rp10,288 million, an increase of 113% from the realization in 2016, which was Rp4,824 million. Fixed assets consist of computer and non-computer equipment, office furniture, renovations and buildings. The increase in fixed assets in 2017 was caused by the purchase of Branch Office buildings to support the Company's operational activities.

Investasi

Investasi per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp318.884 juta, menurun 3% dari total nilai investasi di 2016, yakni Rp327.737 juta. Investasi Perseoran terdiri dari Deposito dan Reksadana, Sebagian besar portofolio Deposito ditempatkan pada mitra perbankan syariah yang memiliki perjanjian resiprokal. Nilai investasi pada Deposito di 2017 adalah sebesar Rp248.800 juta, dan nilai investasi reksadana sebesar Rp70.084 juta.

Investment

As of December 31, 2017, the Investment amounted to Rp318,884 million, 3% lower from the total investment value in 2016, which was Rp327,737 million. Business investment consists of time deposits and mutual funds. Most portfolios of time deposits are placed on Islamic banking partners who have reciprocal agreements. The investment value in Deposits in 2017 is Rp248,800 million, and the investment value of mutual funds is Rp70,084 million.

LIABILITAS DAN EKUITAS

Total liabilitas dan ekuitas perseroan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp391.354 juta atau meningkat sebesar 10% dari periode 31 Desember 2016 yang sebesar Rp357.209 juta. Jumlah ini terdiri dari Liabilitas sebesar

LIABILITIES AND EQUITIES

The Company's total liabilities and equity as of December 31, 2017 amounted to Rp391,354 million or an increase of 10% from December 31, 2016 which was Rp357,209 million. It consists of Liabilities of Rp80,718 million and



Rp80.718 juta dan Ekuitas sebesar Rp310.635 juta.

Equities of Rp310,635 million.

Liabilitas

Berdasarkan Laporan Keuangan (*Audited*), perseroan, kewajiban lancar Perseroan periode 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp80.718 juta.

Liabilities

Based on the Financial Statements (*Audited*), of the Company, its current liabilities as of December 31, 2017 amounted to Rp80,718 million.

Jenis Produk/Product	2017	2016
Utang Ta'widh/Ta'widh Payables	8,318,944,590	2,368,985,673
Utang Penjaminan Ulang/Reinsurance Payables	6,419,384,348	54,800,615
Pendapatan Ujrah diterima dimuka/Unearned Ujrah Revenues	12,036,803,894	12,769,248,738
Utang Zakat/Zakat Payables	227,653,357	511,851,756
Utang Pajak/Tax Payables	473,594,157	196,461,562
Beban Akrual/Accrued Expenses	1,434,168,447	4,662,392,745
Estimasi Ta'widh Retensi Sendiri/Ta'widh Self Retention Estimation	31,933,923,726	21,167,300,621
Estimasi Ujrah yang belum merupakan pendapatan/Unearned Ujrah Revenues Estimation	16,810,740,881	9,372,950,892
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang/Long Term Employee Benefits Liabilities	2,282,340,604	1,273,612,176
Utang lain-lain/Other Payables	781,442,271	655,164,061
TOTAL LIABILITAS/TOTAL LIABILITIES	80,718,996,275	53,032,768,839

Berikut adalah penjabaran dari tabel di atas:

The description of the table above are as follows:

Total Liabilitas

Total kewajiban Perseroan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp80.718 juta, meningkat 52% dari total kewajiban per 31 Desember 2016 yakni Rp53.032 juta. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan realisasi ta'widh di tahun 2017, yang mencapai 251% dari realisasi ta'widh per 31 Desember 2016, serta peningkatan utang reasuransi secara signifikan di 2017, yakni sebesar Rp6.419 juta.

Total Liabilities

The total liabilities of the Company as of December 31, 2017 amounted to Rp80,718 million, an increase of 52% from the total liabilities as of December 31, 2016, which was Rp53,032 million. This increase was due to an increase in realization of ta'widh in 2017, which reached 251% from the realization of ta'widh as at December 31, 2016, as well as a significant increase in reinsurance payables in 2017, which amounted to Rp6,419 million.

Utang Ta'widh

Utang Ta'widh per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp8.318 juta atau meningkat 251% dari Rp2.368 juta per 31 Desember 2016. Kenaikan utang ta'widh didominasi oleh pembiayaan produktif (mikro) yang disebabkan kegagalan (*default*) nasabah perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Ta'widh Payable

Ta'widh payables as of December 31, 2017 amounted to Rp8,188 million or an increase of 251% from Rp2,368 million as of December 31, 2016. The increase in debt was dominated by the increase in productive financing (micro) due to default of sharia banking customers in carrying out its business activities.

Utang Penjaminan Ulang

Utang Penjaminan Ulang per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp6.419 juta meningkat signifikan dari realisasi periode 31 Desember 2016 yang hanya sebesar Rp54,8 juta.

Reinsurance Payables

Reinsurance payables as of December 31, 2017 amounted to Rp6,419 million, a significant increase from the realization of the December 31, 2016 period which was only Rp54.8 million.

ESTIMASI TA'WIDH RETENSI SENDIRI

Estimasi Ta'widh Retensi Sendiri (Cadangan ta'widh) pada tahun 2017 mengalami peningkatan jika dibandingkan cadangan ta'widh di 2016 menjadi Rp10,7 miliar. Kenaikan tersebut disebabkan oleh karena adanya perubahan metode perhitungan cadangan ta'widh sesuai ketentuan dari POJK tentang Penyelenggaraan Usaha Penjaminan.

EKUITAS

Berdasarkan Laporan Keuangan (*Audited*) Perseroan, Ekuitas pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp310.635 juta, atau sebesar 93% dari RKAP Rp332.714 juta dengan rincian Modal Disetor pada 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp250.000 juta, dan Cadangan Umum sebesar Rp55.229 juta.

ESTIMATED OWN TA'WIDH RETENTION

Estimated Own Ta'widh Retention (Reserverd Ta'widh) in 2017 increased from that of 2016 to become Rp10.7 billion. The increase was due to a change in the calculation method for reserved ta'widh in accordance with the provisions of POJK concerning the Implementation of the Guarantee Business.

EQUITY

Based on the Company's Financial Statements, Equity as of December 31, 2017 amounted to Rp310,635 million, or 93% of the RKAP of Rp332,714 million, consisting of Paid-up Capital as of December 31, 2017 which was recorded at Rp250,000 million, and General Reserves of Rp55,229 million.

EKUITAS/EQUITIES	Dalam jutaan rupiah/in million rupiah	
	2017	2016
Modal Setor/Paid-in Capital	250.000	250.000
Cadangan Umum/General Reserves	55.229	34.745
Saldo Laba/Retained Earnings	5.321	19.939
Kenaikan (Penurunan) Surat Berharga yang belum direalisasi/Increase (Decrease) in Unrealized Earnings from Securities	85	(508)
TOTAL EKUITAS/TOTAL EQUITIES	310.636	304.176

LAPORAN LABA (RUGI) KOMPREHENSIF

Berdasarkan Laporan Keuangan (*Audited*) Perseroan, Laporan Laba (Rugi) Komprehensif untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

COMPREHENSIVE INCOME STATEMENT

Based on the Company's Audited Income Statement, the Comprehensive Income Statement for the years ended December 31, 2017 and December 31, 2016 are as follows:

URAIAN/DESCRIPTION	Dalam jutaan rupiah/in million rupiah	
	2017	2016
Pendapatan Kafalah/Kafalah Revenues	122.290	113.942
Beban Kafalah/Kafalah Expenses	80.599	53.176
Pendapatan Kafalah Bersih/Net Kafalah Revenues	41.690	60.766
Pendapatan Investasi/Investment Incomes	16.965	15.613
Beban Usaha/Operating Expenses	52.624	43.560
Laba Usaha/Operating Incomes	6.032	32.819
Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak/Zakat/Net Incomes (Losses) before Tax/Zakat	6.784	25.263
Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak/Zakat/Net Incomes (Losses) after Tax /Zakat	6.226	20.484
Laba (Rugi) Komprehensif/Comprehensive Incomes (Losses)	6.459	19.434



Perseroan menunjukkan penurunan kinerja yang dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Perseroan membukukan laba setelah pajak dan zakat sebesar Rp6.226 juta atau turun 70% dari realisasi sebelumnya di 2016 yang sebesar Rp20.484 juta.

Imbal Jasa Kafalah Bruto

Imbal Jasa Kafalah Bruto selama tahun 2017 mencapai Rp176.300 atau 84% dari anggaran sebesar Rp210.000 juta. Pendapatan ujrah tersebut terdiri dari ujrah pembiayaan produktif sebesar Rp123.450 juta, ujrah pembiayaan konsumtif sebesar Rp51.257 juta, ujrah Bank Garansi sebesar Rp1.556 juta dan ujrah *surety* sebesar Rp35 juta.

Jumlah Pendapatan kafalah adalah selisih dari imbal jasa kafalah bruto dengan beban penjaminan ulang, cadangan ujrah dan pendapatan kafalah lain. Beban penjaminan ulang (*netto*) selama 2017 sebesar Rp46.710 juta atau sebesar 104% dari anggarannya yang sebesar Rp45.000 juta. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Ujrah sebesar Rp7.437 juta atau sebesar 38% dari anggarannya yang sebesar Rp19.455 juta dan penerimaan kafalah lain sebesar Rp138 juta.

Beban Kafalah

Beban kafalah terdiri dari beban ta'widh, beban komisi, Kenaikan (Penurunan) Estimasi Ta'widh Retensi Sendiri, Pendapatan Subrogasi dan beban kafalah lain. Beban Kafalah tercatat sebesar Rp80.599 juta dengan rincian sebagai berikut :

- Ta'widh Bersih selama tahun 2017 adalah sebesar Rp63.632 juta atau 144% dari anggarannya yang sebesar Rp44.100 juta dan meningkat 71% dibandingkan dengan realisasi di 2016 yang sebesar Rp37.298 juta.
- Beban komisi tahun 2017 adalah Rp9.987 juta, atau 42% dari anggaran, yakni Rp23.520 juta dan meningkat 7% dari realisasi di 2016 yang tercatat sebesar Rp9.326 juta.
- Pendapatan Subrogasi selama tahun 2017 adalah Rp6.201 juta, atau 80% dari anggaran sebesar Rp7.718 juta dan meningkat 86% dari perolehan tahun 2016 sebesar Rp3.337 juta.
- Pembentukan cadangan ta'widh di 2017 tercatat sebesar Rp10.766 juta atau 182% dari anggarannya yang sebesar Rp5.905 juta.

The Company showed a decline in performance compared to the realization of the previous year. The Company posted profit after tax and zakat in total of Rp6,226 million or down 70% from the previous realization in 2016 which amounted to Rp20,484 million.

Gross Premi

The Gross Premi in 2017 reached Rp176,300 or 84% of the budget of Rp210,000 million. The premi income consisted of Rp123,450 million in productive financing, Rp51,257 million in consumer financing, Rp1,556 million in premi Bank Guarantee and Rp35 million in premi surety.

Total kafalah income is the difference between gross premi and the sum of reinsurance expenses, premi reserves and other kafalah incomes. The net guarantee expenses in 2017 amounted to Rp46,710 million or 104% of the total budget of Rp45,000 million. Increase (Decrease) of the Premi reserves amounting to Rp7,437 million or 38% of the budget amounting to Rp19,455 million and other kafalah receipts of Rp138 million.

Kafalah Expenses

Kafalah expenses consist of ta'widh expenses, commission expenses, Increase (Decrease) Estimated Ta'widh Own Retention, Subrogation Revenues and other expenses. Kafalah expenses are recorded at Rp80,599 million with details as follows:

- Net Ta'widh in 2017 amounted to Rp63,632 million or 144% of the budget of Rp44,100 million and an increase of 71% compared to the realization in 2016 of Rp37,298 million.
- Commission expenses in 2017 are Rp9,987 million, or 42% of the budget of Rp23,520 million, an increase of 7% from the realization in 2016 which was recorded at Rp9,326 million.
- Subrogation revenue in 2017 is Rp6,201 million, or 80% of the budget of Rp7,718 million and an increase of 86% from the 2016 revenue of Rp3,337 million.
- The allocation for ta'widh reserves in 2017 was recorded at Rp10,766 million or 182% of the budget of Rp5,905 million.

Pendapatan Kafalah Bersih

Pendapatan Kafalah Bersih pada tahun 2017 adalah sebesar Rp41.690 juta, atau 54% dari yang dianggarkan, yakni sebesar Rp77.587 juta dan menurun 31% dari realisasi di 2016 yang sebesar Rp60.766 juta.

Pendapatan Investasi

Investasi pada tahun 2017 adalah sebesar Rp16.955 juta atau 87,4% dari anggaran yang tercatat sebesar Rp19.400 juta dan meningkat 8,7% dari realisasi di 2016 yang sebesar Rp15.613 juta.

Beban Usaha

Jumlah Beban Usaha selama tahun 2017 adalah sebesar Rp52.624 juta atau 86% dari anggarannya yang sebesar Rp61.320 juta dan meningkat 21% dari realisasi di 2016 yang sebesar Rp43.561 juta. Beban Usaha di 2017 terdiri dari Beban Pemasaran sebesar Rp4.270 juta, Beban Umum sebesar Rp32.203 juta, Beban Administrasi sebesar Rp12.638 juta dan Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp3.513 juta.

Laba (Rugi) Usaha

Laba (Rugi) Usaha yang diperoleh selama 2017 merupakan selisih antara Pendapatan Kafalah Bersih ditambah Hasil Investasi (Nisbah Investasi) dikurangi dengan Jumlah Beban Usaha. Laba (Rugi) Usaha yang diperoleh selama 2017 adalah sebesar Rp6.031 juta atau 16% dari anggarannya yang sebesar Rp35.667 juta atau menurun jika dibandingkan dengan realisasi di 2016 yang sebesar Rp32.818 juta.

Pendapatan (Beban) Lain-lain

Pendapatan (Beban) lain-lain sepanjang tahun 2017 adalah sebesar Rp752 juta. Pendapatan (Beban) lain-lain diperoleh dari pendapatan giro, pendapatan lainnya, Beban Administrasi Bank, Beban Penyisihan Penghapusan Piutang dan Beban Lainnya.

Laba (Rugi) Sebelum Pajak dan Zakat

Perolehan Laba (Rugi) Sebelum Pajak dan Zakat selama tahun 2017 adalah sebesar Rp6.784 juta atau 19,2% dari anggarannya yang sebesar Rp35.317 juta atau menurun 73% jika dibandingkan dengan realisasi di 2016 yang sebesar Rp25.262 juta. Laba (Rugi) Sebelum Pajak dan Zakat merupakan selisih antara Laba (Rugi) Usaha dan Pendapatan (Beban) Lain-lain.

Underwriting Income

Underwriting Income in 2017 was Rp41,690 million, or 54% of the budgeted amount of Rp77,587 million and 31% lower from the realization in 2016 of Rp60,766 million.

Investment Income

Investment in 2017 is Rp16,955 million or 87.4% of the budget, which was recorded at Rp19,400 million, and an increase of 8.7% from the realization in 2016 which amounted to Rp15,613 million.

Operating Expenses

Total Operating Expenses in 2017 amounted to Rp52,624 million or 86% of budget of Rp61,320 million, a 21% increase = from the realization in 2016 which amounted to Rp43,561 million. Operating Expenses in 2017 consisted of Marketing Expenses of Rp4,270 million, General Expenses of Rp32,203 million, Administrative Expenses of Rp12,638 million and Depreciation and Amortization Expenses of Rp3,513 million.

Operating Income

Operating income in 2017 is the difference between Net Kafalah Incomes plus Investment Results (Investment Ratio) net of Total Operating Expenses. Operating incomes obtained during 2017 amounted to Rp6,031 million or 16% of budget which amounted to Rp35,667 million or decreased compared to the realization in 2016 which amounted to Rp32,818 million.

Other Income (Expenses)

Other incomes (expenses) in 2017 is Rp752 million. Other incomes (expenses) consists of current accounts incomes, other incomes, Bank Administration Expenses, Allowance for Bad Debts and Other Expenses.

Earning Before Taxes and Zakat

Profit (Loss) Before Taxes and Zakat in 2017 amounted to Rp6,784 million or 19.2% of the budget of Rp35,317 million, or a 73% decrease compared to the realization in 2016 of Rp25,262 million. Profit (Loss) Before Taxes and Zakat is the difference between Business Profit (Loss) and Other Income (Expenses).





Pajak dan Zakat

Kewajiban pajak pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp388 juta, sedangkan zakat tercatat sebesar Rp169 juta.

Laba (Rugi) Komprehensif

Laba (Rugi) Komprehensif pada tahun 2017 adalah sebesar Rp6.459 juta atau 22% dari anggaran sebesar Rp29.051 juta, menurun dibandingkan dengan realisasi 2016 yang sebesar Rp29.051 juta.

LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas Selama Tahun 2017 menunjukan Saldo Kas Bersih sebesar Rp35.672 juta. Pengeluaran Kas sampai akhir tahun 2017 adalah sebesar Rp185.176 juta, sedangkan penerimaan kas selama 2017 adalah sebesar Rp204.658 juta.

Penerimaan kas didominasi oleh penerimaan Imbal jasa Kafalah sebesar Rp180.059 juta, atau 91% dari anggaran. Penerimaan kas dari Hasil Investasi tercatat sebesar 89% dari RKAP 2017. Sedangkan pengeluaran kas didominasi oleh pengeluaran terkait Beban Kafalah antara lain beban Ta'widh dan Beban Penjaminan Ulang (reas). Beban Ta'widh mencapai 146% dari anggarannya sedangkan beban Penjaminan Ulang mencapai 89% dari anggarannya. Jumlah Beban Kafalah pada tahun 2017 sebesar Rp117.203 juta atau mencapai 102% dari anggarannya.

Jumlah Arus Kas Bersih yang masuk dari hasil Pencairan Investasi tercatat sebesar Rp8.852 juta. Sedangkan yang dikeluarkan untuk Pengadaan Barang Modal mencapai Rp7.585 juta. Dengan demikian, saldo akhir kas pada tanggal 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp35.762 juta.

Taxes and Zakat

The tax liability as of December 31, 2017 was Rp388 million, while zakat was recorded at Rp169 million.

Comprehensive Income

Comprehensive Income in 2017 amounted to Rp6,459 million or 22% of the budget of Rp29,051 million, a decrease compared to the realization of 2016 which amounted to Rp29,051 million.

CASH FLOW STATEMENT

The Cash Flow Statement of the 2017 shows a Net Cash Balance of Rp35,672 million. Cash Expenditures until the end of 2017 amounted to Rp185,176 million, while cash receipt amounted to Rp204,658 million.

The majority of Cash Receipt came from Premi Kafalah of Rp180,059 million, or 91% of the budget. Cash receipts from investments were recorded at 89% of the 2017 RKAP. Whereas cash expenditure is dominated by expenses related to Kafalah Expenses, including expenses for Ta'widh and Reinsurance (reinsurance). Ta'widh's expenses reached 146% of its budget while the reinsurance expense reached 89% of its budget. Total Kafalah Expenses in 2017 amounted to Rp117,203 million or 102% of the budget.

The total Net Cash Flow that came from the proceeds of Disbursement of Investment was recorded at Rp8,852 million. Whereas those issued for the procurement of capital goods reached Rp7,585 million. Accordingly, the final cash balance as of December 31, 2017 was recorded at Rp35,762 million.

URAIAN <i>Description</i>	ANGGARAN 2017 <i>2017 Budget</i>	REALISASI 2017 <i>Realization 2017</i>	PENCAPAIAN <i>Achievement</i>
1	2	3	4 (3 : 2)
Interior/Interior	2.500	1.786	71%
Inventaris Kantor/Office Inventories	300	253	84%
Mesin Kantor/Office Machines	150	99	66%
Hardware/Hardware	4.488	335	7%
Software/Software	2.912	713	24%
Bangunan Kantor/Office Buildings	6.000	4.399	73%
JUMLAH/TOTAL	16.350	7.585	46%



Tingkat Kesehatan Perusahaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomer PER-10/MBU/2014 tanggal 25 Juli 2014, mengenai Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pada tahun 2017, Perseroan berhasil mencatat nilai skor 76 dengan predikat tingkat **"A" (Sehat)**.

Risk Based Company Rating

Based on the State Minister of SOE Regulation Number PER-10/MBU/2014 dated July 25, 2014, regarding the Indicators for the Assessment of the State-Owned Enterprise (SOE) Soundness Level, in 2017, the Company managed to reach the score of 76, or fallen into the category of **"A" (Satisfactory)**.

No.	ASPEK PENILAIAN <i>EVALUATION ASPECT</i>	NILAI PERHITUNGAN <i>EVALUATION SCORE</i>	BOBOT <i>QUALITY</i>	SKOR <i>SCORE</i>
ASPEK KEUANGAN/FINANCIAL ASPECT				
1	Rentabilitas/ <i>Profitability</i> ROE (%)	2	5	2
	ROA (%)	2	5	2
2	Solvabilitas (%)/ <i>Solvency (%)</i>	485	15	15
3	Likuiditas (%)/ <i>Liquidity (%)</i>	200	10	10
ASPEK OPERASIONAL/OPERATIONAL ASPECT				
1	YOI (%)	5	10	8
2	BOPO (%)	6	8	7,5
3	Pertumbuhan premi /iuran IJP %/ <i>Premium Growth %</i>	13	8	4,5
4	Gearing Rasio (kali)/ <i>Gearing Ratio (times)</i>	30	10	8
5	Rasio Efektivitas Operasi (%)/ <i>Operational Effectiveness Ratio (%)</i>	3	8	2
6	Rasio Efektivitas Subrogasi (%)/ <i>Subrogation Effectiveness Ratio (%)</i>	10	8	2
ASPEK ADMINISTRATIF/ADMINISTRATIVE ASPECT				
1	Laporan perhitungan tahunan/ <i>Annual calculation report</i>	Disampaikan pada tanggal 28 Februari 2018 / <i>Submitted on February 28, 2018</i>	5	5
2	Rancangan RKAP/ <i>Corporate Business Plan</i>	Disampaikan pada Januari 2018 / <i>Submitted in January 2018</i>	5	5
3	Laporan Periodik (bulanan)/ <i>Periodic (Monthly) Report</i>	Disampaikan setiap tanggal 5/ <i>Submitted on the fifth date of every month</i>	5	5
Total		100	76	
Predikat Penilaian/<i>Evaluation Predicate</i>				
		SEHAT / <i>SATISFACTORY</i>	A	

Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

Evaluasi kinerja operasional perusahaan berdasarkan perhitungan laba rugi tahun 2017 dibandingkan dengan RKAP terealisasi sebesar Rp6.226 juta atau 21,4% dibandingkan anggaran yang ditetapkan sebesar Rp29.051 juta.

Implementation of Strategic Planning and Budgeting

The evaluation of the Company's operational performance is based on the 2017 profit and loss calculation compared to the realized RKAP amounted to Rp6,226 million or 21.4% compared to the set budget of Rp29,051 million.



Laba setelah Pajak di tahun 2017 tercatat sebesar Rp6.226 juta atau 21,4% dibandingkan anggaran yang ditetapkan sebesar Rp29.051 juta.

Pertumbuhan Imbal Jasa Kafalah (IJK)

Ujrah pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp176.300 juta, meningkat 13% dibandingkan dengan tahun 2016, namun hanya mencapai 84% dari Anggaran 2017.

Rasio Ta'widh

Ta'widh ratio tahun 2017 sebesar 36%, lebih besar jika dibandingkan dengan target yang terdapat dalam Aspirasi Pemegang Saham. Realisasi ta'widh ratio tidak mencapai target yang ditetapkan.

Recoveries

Realisasi pemulihan (subrogasi) pada 2017 hanya mencapai 10% dari realisasi Ta'widh. Sedikit lebih tinggi dari tahun 2016 yang mencapai 9%. Pencapaian tersebut tidak optimal karena proses eksekusi jaminan yang berkepanjangan.

Pendapatan Kafalah Bersih

Pencapaian underwritting yield di 2017 mencapai 23,6%. Pencapaian Hasil underwritting belum optimal, mengingat pada tahun 2017 ta'widh atas pembiayaan (terutama pembiayaan mikro) meningkat dibandingkan tahun 2016. Di samping itu, penagihan atas hasil subrogasi membutuhkan waktu relatif panjang bagi Bank Syariah.

Pendapatan Hasil Investasi

Pendapatan investasi (YOI) di 2017 hanya sebesar 5,2%, tidak mencapai dari target yang diharapkan yakni 5,7%. Pencapaian YOI relatif stabil walaupun trendnya sama jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pendapatan investasi diperoleh dari hasil investasi resiprokal deposito dan juga ditambah dengan pendapatan dari kupon surat berharga syariah (Reksadana Syariah).

Beban Usaha

Realisasi beban usaha pada tahun 2017 mencapai Rp52,6 Miliar, atau hanya sebesar 86% dari anggarannya sebesar Rp61,3 Miliar. Ratio BOPO di tahun 2017 berada pada angka 30% dan dengan demikian tidak mencapai target sebagaimana yang ditetapkan pemegang saham.

Profit after tax in 2017 was recorded at Rp6,226 million or 21.4% compared to the budget set at Rp29,051 million.

Premi Growth

Premi in 2017 was recorded at Rp176,300 million, an increase of 13% compared to 2016 but only reached 84% of the 2017 Budget.

Ta'widh Ratio

Ta'widh ratio in 2017 was recorded at 36%, higher than the target stated in the Shareholders Aspiration. However, the achievement is still fall short of target.

Recoveries

The realization of recoveries (subrogation) in 2017 was only 10% from the realization of Ta'widh. Slightly higher than that of 2016 which reached 9%. Such achievement was not optimal due to the prolonged process of the execution of collateral warranties.

Underwriting Income

The underwritting yield in 2017 reached 23.6%. It was not optimal, considering that in 2017 ta'widh on financing (especially micro financing) increased compared to 2016. Besides that, collection for subrogation results requires a relatively long time for Islamic banks.

Investment Income

The investment income (YOI) in 2017 was only 5.2%, fallen short of the expected target of 5.7%. YOI achievement is relatively stable even though the trend is quite similar when compared to the previous year. Investment income is obtained from reciprocal investment deposits and also from sharia securities coupons (Sharia Mutual Funds).

Operating Expenses

The realization of operating expenses in 2017 reached Rp52.6 billion, or only 86% of the budget of Rp61.3 billion. The BOPO ratio in 2017 is at 30% and thus failed to meet the target as determined by the shareholders.



Laba Bersih Setelah Pajak

Realisasi laba setelah pajak (EAT) tahun 2017 mencapai Rp6,2 Miliar, atau hanya mencapai 21,4% dari anggarannya yang sebesar Rp29,0 Miliar.

ASPEK PEMASARAN

Seiring dengan visi dan misi, Divisi Pemasaran Perseroan telah menyusun sejumlah target untuk meningkatkan pertumbuhan Perseroan, dan untuk mencapai target tersebut, sejumlah program kerja telah dilaksanakan untuk mencapai hasil optimal antara lain:

- a. Meningkatkan kerjasama dengan mitra bisnis asuransi umum dan asuransi jiwa untuk memperkaya ragam *bundling product* yang kompetitif.
- b. Membina Kerjasama dan peran aktif dalam asosiasi asuransi, perbankan dan kegiatan lembaga regulasi (OJK).
- c. Melaksanakan studi kelayakan pembukaan KPS.
- d. Mengevaluasi PKS atas asuransi/penjaminan pembiayaan yang berisiko tinggi dan proses akseptasi yang menerapkan prinsip kehati-hatian secara konsisten, khususnya untuk kredit dengan nilai pertanggungan/penjaminan serta berisiko tinggi.
- e. Mengoptimalkan jejaring usaha dan hubungan dengan mitra usaha.
- f. Penyelesaian ta'widh dengan cara dan waktu yang tepat.

Informasi Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi atau Restrukturisasi Utang/Modal

Pada 2017 Perseroan tidak melakukan aksi korporasi apapun.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/ atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Pada 2017, tidak ada Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi yang dapat disajikan oleh Perseroan.

Earning After Tax (EAT)

The realization of Earning After Tax (EAT) in 2017 was Rp6.2 billion, or only 21.4% of its budget of Rp29.0 billion.

MARKETING ASPECT

In line with its vision and mission, the Marketing Division has set a number of targets aiming to boost the Company's growth. And to achieve those targets, a number of work program implemented in order to reach optimum results are:

- a. Promoting partnership with general or life insurance providers in order to enrich the variety of competitive bundling products.
- b. Entering collaboration and playing active role in the association of insurance providers, banking and FSA activities.
- c. Conducting feasibility studies on the opening of KPS.
- d. Evaluating PKS regarding the large exposure risk financing and the process of acceptance that consistently adopting the prudent principles, especially for large exposure loans.
- e. Optimizing business networks and relationships with business partners.
- f. Proper settlement of ta'widh in timely manner.

Information on Investment, Expansion, Divestment, Merger, Acquisition, or Debt/ Capital Restructuring.

In 2017, no corporate action was carried out by the Company.

Information on Material Transactions Containing Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliates

In 2017, no information on material transaction that contains conflicts of interest and/or transactions with affiliated parties that can be presented by the Company.



Kebijakan Dividen

Pembagian dividen ditetapkan dari laba bersih yang diperoleh oleh Perseroan dan diberikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. Pada tahun 2017, berdasarkan keputusan RUPS tanggal 16 Mei 2018 tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Tahun Buku 2017, dividen tidak dibagikan dan penggunaan laba setelah pajak dan zakat tahun buku 2016 seluruhnya dibukukan sebagai cadangan umum.

Perubahan Peraturan Perundang- Undangan yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perusahaan

Sepanjang 2017, tidak ada perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Perseroan.

Dividend Policy

Dividend distribution is determined from the net income obtained by the Company and given to shareholders registered in the Register of Shareholders of the Company. In 2017, based on the resolution of the GMS on May 16, 2018 Approval of the Annual Report and Ratification of the Annual Calculation for Fiscal Year 2017, dividends will not be distributed and the use of profit after tax and zakat for the 2016 financial year will be recorded as general reserves.

Changes in Laws and Regulations That Have Significant Impact on the Company

Throughout 2017, there were no changes in laws and regulations that significantly impacted the Company.



01 KINERJA PERUSAHAAN
TAHUN 2017
Company
Performance 2017

02 LAPORAN MANAJEMEN
Management's Report

03 PROFIL PERUSAHAAN
Company Profile





TATA KELOLA PERUSAHAAN *Corporate Governance*

LAPORAN TATA KELOLA PERSEROAN

Perseroan senantiasa berkomitmen tinggi untuk menerapkan praktik terbaik Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*), terutama dalam menjalankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, kewajaran, dan kesetaraan di seluruh level organisasi.

Perseroan yakin bahwa penerapan GCG secara optimal akan melahirkan budaya dan etika kerja yang baik, sehingga seluruh individu Perseroan dapat memberikan kinerja lebih positif, membangun, serta bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.

Sebagai wujud komitmen Perseroan terhadap implementasi GCG, kami pada tahun 2017 menguatkan struktur organisasi dan pengawasannya mencakup unit kerja internal audit, manajemen risiko, tim ISO, tim KPKU, tim GCG, perangkat SOP dan peraturan-peraturan lain yang terkait, serta penyusunan program kerja di Perseroan.

Sebagai hasilnya, skor asesmen GCG pada tahun 2017 ini tercatat cukup memuaskan yakni sebesar 72,74% atau mencapai kualifikasi "Cukup Baik". Skor tersebut meningkat dibanding tahun 2016 sebesar 70,18%.

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* (GCG) merupakan salah satu butir pernyataan Misi Perseroan. Oleh karena itu, telah menjadi komitmen bagi seluruh Insan Perseroan dari tingkat puncak hingga staf pelaksana untuk senantiasa mengupayakan implementasinya secara konsisten dan menyeluruh sesuai dengan *standard international best practices*.

Pada tahun 2017, Perseroan memasuki usia kelima sebagai perusahaan penjaminan syariah pertama di Indonesia. Pada tahun ini Perseroan kembali meningkatkan infrastruktur dan penerapan tata kelola Perseroan, diantaranya dengan menguatkan struktur organisasi dan pengawasannya mencakup unit kerja internal audit, manajemen risiko korporat, manajemen risiko transaksional, kepatuhan, Tim ISO tim KPKU, tim GCG, perangkat SOP dan peraturan-peraturan lain yang terkait, serta penyusunan program kerja di Perseroan.

THE COMPANY'S GOVERNANCE REPORT

The company always maintains its high commitment to the implementation of good corporate governance best practices, particularly in upholding the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, fairness and equality at all levels of the organization.

The Company believes that optimally implementing GCG will give birth to the excellent corporate culture and work ethics, encouraging every individual in the Company to deliver more positive and constructive contribution to the Company's performance and to be of benefit to all stakeholders.

To embody the Company's commitment towards the implementation of GCG, in 2017 we strengthened our organizational structure and its supervision, which include internal audit unit, risk management unit, ISO team, KPKU team, GCG team, SOP and other relevant regulations, as well as the Company's work program development.

As the result, the Company's GCG score in 2017 was quite satisfactory, namely to 72.74%. receiving a "Fairly Good" qualification. Such score was higher than that in 2016, which was 70.18%.

CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE

The implementation of good corporate governance (GCG) is one of the points stated in the Company's mission statement. Therefore, it has become the commitment of all Company Personnels, from top level to executive staff, to constantly strive to consistently and comprehensively apply it in accordance with international best practices.

The year 2017 marked the fifth year of the Company's journey as the first sharia guarantee company in Indonesia. In that year, the Company again improved its infrastructure and implementation of corporate governance, among others by strengthening its organizational structure and supervision including internal audit work units, corporate risk management, transactional risk management, compliance, the KPKU Team ISO team, GCG teams, SOPs and regulations other related regulations, as well as the preparation of work programs at the Company.

Terkait komitmen pelaksanaan GCG, Direksi telah menetapkan Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) dan Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi (*board manual*) sebagai pedoman Perseroan melalui Surat Keputusan nomor 067/Kep-Dir/XII/2015 dan Surat Keputusan nomor 069/KEP-DIR/XII/2015 pada tanggal 23 Desember 2015.

Selain berdasarkan Pedoman tersebut diatas, penerapan GCG Perseroan juga merujuk antara lain pada ketentuan-ketentuan berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Lembaga Penjamin;
10. Anggaran Dasar Perusahaan berdasarkan Akta Notaris nomor 45, tanggal 29 November 2012 yang dibuat oleh Notaris Hadijah, SH dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-61610.AH.01 tahun 2012 tanggal 29 November 2012;
11. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang

Regarding the commitment to GCG implementation, the Board of Directors has set guidelines for Good Corporate Governance (GCG) and manual boards as guidelines for the Company based on Decree number 067/Kep-Dir/XII/2015 and Decree number 069/KEP-DIR/XII/2015 on December 23, 2015.

In addition to the aforementioned Guidelines, the application of GCG in the Company also refers to the following provisions:

1. Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016 concerning Guarantees
2. Law of the Republic of Indonesia Number 14 of 2008 concerning Information Disclosure;
3. Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions;
4. Law of the Republic of Indonesia Number 19 Year 2016 concerning Amendments to Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions;
5. Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
6. Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (BUMN);
7. Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Amendment to Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption;
8. Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition;
9. Regulation of the President of the Republic of Indonesia Number 2 of 2008 concerning Guarantor Institutions;
10. The Company's Articles of Association, based on the Notarial Deed number 45, November 29 of 2012 made by Notary Hadijah, SH and ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU-61610.AH.01 2012 dated November 29, 2012 ;
11. Regulation of the State Minister of SOE Number: PER-01/MBU/2012 concerning Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises;
12. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-09/MBU/2012 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State-Owned

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;

13. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anak Perusahaan BUMN;
14. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-07/MBU/2012 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN;
15. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
16. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN;
17. POJK No. 1/POJK.05/2017 Tentang Perizinan Usaha & Kelembagaan Lembaga Penjamin;
18. POJK No. 2/POJK.05/2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin;
19. POJK No. 3/POJK.05/2017 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin;
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Lembaga Penjaminan;
21. POJK No. 27/POJK.05/2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransi, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan;
22. POJK No 10/POJK.05/2014 tanggal 27 Agustus 2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank ;
23. POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
24. POJK No. 56/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;
25. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 74/DSN-MUI/I/2009 Tentang Penjaminan Syariah.

Untuk menjamin pelaksanaan GCG yang fokus dan terarah, Perseroan telah memiliki struktur GCG yang meliputi struktur organ dan kebijakan Perseroan, yaitu: Rapat

Enterprises Number: PER-01/MBU/2011 concerning Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises;

13. Regulation of the State Minister of SOE Number: PER-03/MBU/2012 concerning Guidelines for Appointment of Members of the Board of Directors and SOE Subsidiaries;
14. Regulation of the State Minister of SOE Number: PER-07/MBU/2012 concerning Guidelines for Determining Income of the SOE's Board of Directors, Board of Commissioners and Supervisory Board;
15. Regulation of the State Minister of SOE Number: PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises;
16. Regulation of the Minister of SOE Number: PER-15/MBU/2012 concerning Amendment to the Regulation of the Minister of SOE Number: PER-05/MBU/2008 concerning General Guidelines for the Implementation of Goods and Services Procurement FOR SOE;
17. FSA Regulation No. 1/POJK.05/2017 Concerning Business Licensing & Guarantor Institutions;
18. FSA Regulation No. 2/POJK.05/2017 concerning the Business Implementation of Guarantor Institution;
19. FSA Regulation No. 3/POJK.05/2017 concerning Good Corporate Governance for Guarantor Institutions;
20. FSA Regulation Number 7/POJK.05/2014 concerning Inspection of Guarantee Institutions;
21. FSA Regulation No. 27/POJK.05/2016 concerning Capability and Compliance Assessment for Main Parties in Insurance Companies, Pension Funds, Financing Companies, and Guarantee Companies;
22. FSA Regulation 10/POJK.05/2014 dated 27 August 2014 concerning Assessment of the Risk Level of Non-Bank Financial Services Institutions;
23. FSA Regulation No. 55/POJK.04/2015 concerning Establishment and Work Guidelines of the Audit Committee;
24. FSA Regulation No. 56/POJK.04/2015 concerning Establishment and Guidelines for Preparation of the Internal Audit Unit Charter;
25. Fatwa of the National Sharia Council Number: 74/DSN-MUI/I/2009 Concerning Sharia Guarantee.

To guarantee the implementation of focused and directed GCG, the Company has a GCG structure that includes the organizational structure and policies of the Company,

Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Sekretaris Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengawasan Intern dan Manajemen Risiko & Kepatuhan.

namely: General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, Board of Directors, Secretary of the Board of Commissioners, Corporate Secretary, Unit Internal Audit and Risk Management & Compliance.

Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan

Komitmen Perseroan untuk senantiasa menerapkan GCG diimplementasikan berlandaskan prinsip-prinsip GCG melalui peningkatan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran.

Penerapan GCG yang dilandasi prinsip-prinsip yang jelas akan memudahkan implementasi sekaligus mendorong pengelolaan bisnis Perseroan ke arah yang lebih profesional, transparan, dan efisien.

- **Transparansi (Transparency)**

Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Lembaga Penjamin, yang mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

- **Akuntabilitas (Accountability)**

Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Lembaga Penjamin sehingga kinerja penyelenggaraan usaha Lembaga Penjamin dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien.

- **Pertanggungjawaban (Responsibility)**

Kesesuaian pengelolaan Lembaga Penjamin dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

- **Kemandirian (Independency)**

Keadaan Lembaga Penjamin yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari Benturan Kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

Corporate Governance Principles

The Company's commitment to always implementing GCG is based on the principles of GCG, through efforts to increase transparency, accountability, accountability, independence and fairness.

GCG implementation based on clear principles will help facilitate its implementation, while encouraging business management in a more professional, transparent and efficient manner.

- **Transparency**

Openness in the decision-making process as well as in the disclosure and provision of relevant information regarding the Guarantor Institution, which can be accessed by Stakeholders, in accordance with the laws and regulations in the field of guarantees as well as the standards, principles and practices of conducting a sound business.

- **Accountability**

Clarity of functions and implementation of the guarantor institution's accountability, so that the performance of the Guarantor Institution's business operations can run transparently, fairly, effectively and efficiently.

- **Responsibility**

Conformity of management of the Guarantor Institution with the provisions of laws and regulations in the field of guarantees and ethical values as well as the standards, principles and practices of conducting a sound business.

- **Independency**

The state of the Guarantor Institution that is managed independently and professionally and is free from Conflict of Interest and not to be influenced nor under any pressure of any party that is not in accordance with the laws and regulations in the field of guarantee business and ethical value as well as standards, principles and practices of sound business operations.

• **Kewajaran (Fairness)**

Kesetaraan dan keseimbangan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

• **Fairness**

Equality and balance in fulfilling the Stakeholders' rights arising from the agreement, the provisions of laws and regulations in the field of guarantee business, and ethical values as well as standards, principles, and practices of conducting a sound business

Hasil Asesmen GCG

Proses asesmen terhadap GCG Perseroan pada tahun 2017 dilakukan melalui *self assessment* yang dilangsungkan pada tanggal 1 Februari 2018. Asesmen GCG Perseroan dilakukan oleh Tim evaluator asesmen GCG PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero).

Proses penilaian ini meliputi aspek *Good Corporate Governance* (GCG). Metode penilaian menggunakan kriteria penilaian berdasarkan format ASEAN CG Scorecard, dengan prinsip OECD yang berstandart ASEAN, meliputi:

1. Komitmen penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
2. Pemegang saham dan RUPS;
3. Dewan Komisaris;
4. Direksi;
5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi; dan
6. Aspek lainnya.

Berdasarkan *self assessment* oleh internal atas penerapan GCG yang telah dilakukan tahun 2017, Perseroan memperoleh nilai sebesar 72,74% atau mencapai kualifikasi "Cukup Baik". Skor tersebut meningkat dibandingkan tahun 2016 sebesar 70,18%. Hasil capaian penerapan GCG Perseroan berdasarkan aspek pengujian selengkapnya sebagai berikut:

GCG Assessment Scores

Assessment of the Company's GCG in 2017 was carried out through self assessment on 1 February 2018. The assessment was carried out by the GCG assessment evaluator team of PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero).

This assessment covers aspects of Good Corporate Governance (GCG) and the method uses the criteria based on the ASEAN CG Scorecard format, using OECD principles that are in accordance with ASEAN standards, which include:

1. Commitment to the implementation of good corporate governance;
2. Shareholders and GMS;
3. Board of Commissioners;
4. Board of Directors;
5. Information Disclosure and Transparency; and
6. Other aspects.

Based on the self assessment of the implementation of GCG carried out internally in 2017, the Company obtained a score of 72.74%, achieving the qualification of "Fairly Good". This score was higher when compared to that of 2016 of 70.18%. The score of the Company's GCG are based on the assessment aspects as follows:

Tabel Hasil Asesmen GCG

No.	Aspek Penilaian <i>Assessment Aspect</i>	Nilai/ <i>Score (%)</i>	
		2017	2016
1	Komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan Commitment to the implementation of good corporate governance	74,10	73,91
2	Pemegang Saham & RUPS/Pemilik Modal Shareholders and GMS	94,61	94,62
3	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Board of Commissioners/Supervisory Board	80,28	77,98
4	Direksi Board of Directors	72,83	65,51

Table of GCG Assessment Results

No.	Aspek Penilaian <i>Assessment Aspect</i>	Nilai/ <i>Score (%)</i>	
		2017	2016
5	Pengungkapan informasi dan transparansi Information Disclosure and Transparency	60,50	68,51
6	Aspek lainnya Other aspects.	00,00	00,00
Total		72,74	70,18

Perseroan telah menindaklanjuti atas rekomendasi atas penerapan GCG tahun 2016 dari Tim evaluator GCG tahun 2016 untuk perbaikan tata kelola yang meliputi tindakan korektif yang diperlukan dan waktu penyelesaian serta kendala/hambatan penyelesaiannya, apabila masih terdapat kekurangan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

The Company has followed up the recommendations for the implementation of GCG from the 2016 GCG Evaluator Team, regarding the governance improvements which include necessary corrective actions and time of settlement, along with the obstacles, should there be shortcomings in the implementation of Good Corporate Governance.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tata kelola Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS sebagai organ Perseroan merupakan wadah bagi para Pemegang Saham untuk mengambil keputusan strategis berkaitan dengan modal yang ditanam dalam Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan yang diambil dalam RUPS didasari kepentingan usaha Perseroan jangka pendek, menengah, dan panjang yang dilakukan secara wajar dan transparan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Tanpa mengurangi kewenangan RUPS untuk menjalankan hak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan, Pemegang Saham tidak melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi, serta Dewan Pengawas Syariah.

Mekanisme dan Penyelenggaraan RUPS Perseroan

RUPS Tahunan diselenggarakan setiap tahun, meliputi:

- Persetujuan Laporan Tahunan;
- Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

The General Meeting of Shareholders (GMS) is a corporate governance organ that holds the highest and all the authority that cannot be transferred to the Board of Directors and Board of Commissioners. GMS is the forum where Shareholders exercise their rights in making strategic decisions relating to the capital invested in the Company, by observing the Articles of Association and applicable laws and regulations.

The resolutions made at the GMS should be based on the short, medium and long term business interests of the Company, which are carried out fairly and transparently, as stipulated in the Limited Liability Company Law Number 40 of 2007. Without prejudice to the rights of the GMS in accordance with the Articles of Association and Legislation, the Shareholders should not intervene in the duties, functions and authority of the Board of Commissioners and Directors, and the Sharia Supervisory Board.

Mechanism and Implementation of GMS in the Company

Annual GMS is held annually and includes:

- Approval of Annual Reports;
- Approval of Corporate Work Plan and Budget (RKAP);

- c. Penunjukan Akuntan Publik;
- d. Putusan hal-hal lain yang diusulkan oleh Dewan Komisaris dan atau seorang atau lebih Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar

- c. Appointment of Public Accountant;
- d. Resolution of other matters as proposed by the Board of Commissioners and/or one or more Shareholder in accordance with the provisions of the Articles of Association

Risalah Hasil RUPS Perseroan

Setelah dilakukan pembahasan dan tanya jawab atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Tahun Buku 2016 serta memperhatikan tanggapan Dewan Komisaris, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016

Menunjuk pada Pasal 21 Anggaran Dasar PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Tahun Buku 2016, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan perseroan selama Tahun Buku 2016 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau tidak melanggar ketentuan/prosedur hukum yang berlaku dan telah dilaporkan kepada Pemegang Saham serta tercatat dan dilaporkan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2016.

2. Penggunaan Laba Tahun Buku 2016

Menetapkan penggunaan Laba Setelah Pajak dan Zakat Tahun Buku 2016 sebesar Rp20.484.036.491 (dua puluh miliar empat ratus delapan puluh empat juta tiga puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) yang diperoleh dari tahun buku 2016 seluruhnya sebagai Cadangan Umum dan tidak dibagikan dividen.

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Untuk General Audit Tahun Buku 2017

Penunjukan Kantor Akuntan Publik (**KAP**) untuk general audit tahun buku 2017 akan ditentukan kemudian dengan memperhatikan kesamaan Kantor

Minutes of GMS

After the discussion and question and answer session regarding the Annual Report and Financial Statements of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah for Fiscal Year 2016 and taking into account the Board of Commissioners' response, the General Meeting of Shareholders (GMS) came to the following resolutions:

1. Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Financial Statements for the Year 2016

Referring to Article 21 of the Articles of Association of PT Askrindo Syariah Financing Guarantee, the General Meeting of Shareholders (GMS) hereby approved the Annual Report and ratified the Financial Statement of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah for Fiscal Year 2016, as well as granted full release and discharge of responsibility (*volledig acquit et decharge*) to the Board of Directors for the management of the Company and the Board of Commissioners for the Company's supervisory actions during the Fiscal Year 2016 in so far as the aforementioned actions and supervision do not constitute a criminal act or violates the prevailing regulation(s) and legal procedures, and as long as recorded in the Annual Report and Financial Statements for Fiscal Year 2016.

2. The Appropriation of the Earning After Taxes from Year 2016

Determine the appropriation of Profit After Taxes and Zakat for the Fiscal Year of 2016 amounting to Rp20,484,036,491,- (twenty billion four hundred eighty four million thirty six thousand four hundred ninety one rupiah) obtained from the 2016 financial year entirely as General Reserves and hence not to be distributed as dividends.

3. Appointment of the Public Accountant Firm (KAP) for the 2017 General Audit Year

The appointment of the Public Accountant Firm (KAP) to conduct a general audit for the 2017 fiscal year will be determined later by taking into consideration the

Akuntan Publik (KAP) yang akan melakukan general audit laporan keuangan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) tahun buku 2017 yang akan ditetapkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara selaku Pemegang Saham serta mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 17/ PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik.

4. Penghasilan Direksi, Honorarium Dewan Komisaris, dan Tantiem

Penghasilan berupa gaji untuk Direksi dan honorarium untuk Dewan Komisaris serta Sekretaris Dewan Komisaris tahun buku 2017 dan tantiem tahun buku 2016 akan ditetapkan dalam Surat Keputusan Pemegang Saham tersendiri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

appointment of the Public Accountant Firm (KAP) to conduct financial statement audit of PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) for the 2017 fiscal year, which will be determined by the Ministry State-Owned Enterprises as Shareholders, and in accordance with the prevailing laws and regulations, in particular the Minister of Finance Regulation (PMK) No. 17/ PMK.01/2008 concerning Public Accountant Services.

4. Income of the Board of Directors, Board of Commissioners Honorarium, and Tantiem

Income, in the form of salary for the Board of Directors and honorarium for the Board of Commissioners as well as the Secretary of the Board of Commissioners for the year 2017 and the tantiem for the year 2016, will be stipulated in separate Shareholders' Decree by taking into account the applicable laws and regulations.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah sebagai organ perusahaan memiliki fungsi sebagai pengawas atas kegiatan usaha Perseroan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

Komposisi Dewan Pengawas Syariah

Komposisi Dewan Pengawas pada 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel Susunan Dewan Pengawas Shariah

Nama Name	Jabatan Position	SK Pengangkatan Appointment Letter	Tanggal Pengangkatan Appointment Date
Daud Rasyid	Anggota Dewan Pengawas Member of the Supervisory Board	Rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. U-448/DSN-MUI/XII/2012 Based on the Recommendation from National Sharia Councils of Indonesian Councils of Ulama No. U-448/ DSN-MUI/XII/2012	10 Desember 2012 December 10, 2012
Muhammad Zubair	Anggota Dewan Pengawas Member of the Supervisory Board	Rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. U-448/DSN-MUI/XII/2012 Based on the Recommendation from National Sharia Councils of Indonesian Councils of Ulama No. U-448/ DSN-MUI/XII/2012	10 Desember 2012 December 10, 2012

SHARIA SUPERVISORY BOARD

The Sharia Supervisory Board serves as the Company's organ overseeing the compliance of the Company's business activities with sharia principles

Composition of the Sharia Supervisory Board

The composition of the Supervisory Board as of 31 December 2017 is as follows:

Composition of the Sharia Supervisory Board

Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas dan wewenang, antara lain sebagai berikut:

- 1) Dewan Pengawas Syariah berfungsi melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat serta saran kepada Direksi agar kegiatan Perusahaan Penjaminan Syariah sesuai dengan Prinsip Syariah
- 2) Memastikan pemenuhan prinsip syariah atas akad, kegiatan operasional dan produk yang dikeluarkan Perseroan;
- 3) Mengawasi proses pengembangan produk baru Perseroan;
- 4) Meminta fatwa Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Perseroan yang belum ada fatwanya;
- 5) Melakukan reviu secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme kegiatan usaha tugasnya.
- 6) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek dari satuan kerja Perseroan dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Anggota DPS berhak memperoleh informasi dari Direksi mengenai Perusahaan Penjaminan secara lengkap dan tepat waktu.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas di 2017

Dewan Pengawas terdiri dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Komisaris. Dewan Pengawas melaksanakan fungsi pengawasan termasuk terhadap prinsip-prinsip dasar atas penyelenggaraan penjaminan pembiayaan dengan prinsip syariah.

Rapat Dewan Pengawas Syariah

Rapat Dewan Pengawas Syariah wajib diselenggarakan secara berkala per tiga bulan, atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau atas permintaan dari satu orang atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

Berdasarkan Laporan Dewan Pengawas Syariah tahun 2017, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya:

- 1) Rapat koordinasi antara Dewan Pengawas Syariah dengan Manajemen Perseroan secara berkala sebanyak 2 (dua) kali pertemuan; dan

Duties and Authorities of the Sharia Supervisory Board

The Sharia Supervisory Board has the following duties and authorities, among others:

- 1) The Sharia Supervisory Board carries out the supervisory function and provision of advice to the Board of Directors so that the Company activities are in accordance with Sharia Principles
- 2) Ensuring the Company's contracts (akad), operational activities and products are in compliance with sharia principles;
- 3) Supervising the process of developing the Company's new products;
- 4) Requesting the fatwa of the National Sharia Council for new products of the Company which has yet receive fatwa;
- 5) Periodically reviewing the compliance of sharia principles on the Company business activities.
- 6) Requesting relevant data and information from the Company's work units in order to carry out its duties.

Members of Sharia Supervisory Board are entitled to obtain complete and timely information of the Company from the Board of Directors.

Implementation of Duties and Responsibilities of the Supervisory Board in 2017

The Supervisory Board consists of the Sharia Supervisory Board (DPS) and the Board of Commissioners. The Supervisory Board carries out the supervisory function including on the basic principles of implementing financing guarantees under sharia principles.

Sharia Supervisory Board Meeting

Sharia Supervisory Board meetings are held on regular basis every three months, or upon written request by one or more members of the Board of Commissioners, or upon request by one or more shareholders with voting rights.

Based on the 2017 Report by the Sharia Supervisory Board, several activities carried out include:

- 1) Coordination meetings between the Sharia Supervisory Board and the Management of the Company, conducted 2 (two) times; and

- 2) Pemberian rekomendasi atas seluruh perjanjian kerjasama dan pengembangan produk baru dalam tahun 2017.

Adapun tingkat kehadiran masing-masing anggota DPS dan agenda rapat sepanjang tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel Rapat Dewan Pengawas Syariah Tahun 2017

Nama Name	Jabatan Position	Target Target	Kehadiran Attendance	Percentase Persentase
Daud Rasyid	Anggota Dewan Pengawas Member of the Supervisory Board	4	2	50%
Muhammad Zubair	Anggota Dewan Pengawas Member of the Supervisory Board	4	2	50%

Pelatihan Dewan Pengawas Syariah

Pada tahun 2017, Perseroan mengikutsertakan DPS dalam pelatihan untuk *update* terkait regulasi dan kompetensi yang membantu dalam pengawasan syariah kepada Perseroan. Realisasi pelaksanaan pelatihan DPS adalah sebagai berikut:

Tabel Informasi Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah

No	Nama Komisaris Name of the Commissioner	Pelatihan Training	Waktu Date	Penyelenggara Organizer	Lokasi Location	Biaya Cost Incurred (Rp)
1	Daud Rasyid, M. Zubair	Legal and Compliance Risk Management	02-03/11/2017	-	Jakarta	600,000
Jumlah Total						600,000

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dewan Komisaris bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap kinerja Direksi, memberikan nasihat atau saran, serta memastikan bahwa Direksi telah menjalankan tugas-tugasnya untuk kepentingan stakeholders. Dewan Komisaris bertanggung jawab

- 2) Providing recommendations on all cooperation agreements and the development of new products in 2017.

The attendance of each DPS member and meeting agenda throughout 2017 are as follows:

Table of Sharia Supervisory Board Meeting in 2017

Nama Name	Jabatan Position	Target Target	Kehadiran Attendance	Percentase Persentase
Daud Rasyid	Anggota Dewan Pengawas Member of the Supervisory Board	4	2	50%
Muhammad Zubair	Anggota Dewan Pengawas Member of the Supervisory Board	4	2	50%

Training for the Sharia Supervisory Board

In 2017, the Company's Sharia Supervisory Board enrolled into training program intended update them with the latest regulations and competencies that are useful for conducting sharia-based supervision over the Company's activities. The realization of DPS training are as follows:

Table on Information about Training and Competence Development Program of the Sharia Supervisory Board

No	Nama Komisaris Name of the Commissioner	Pelatihan Training	Waktu Date	Penyelenggara Organizer	Lokasi Location	Biaya Cost Incurred (Rp)
1	Daud Rasyid, M. Zubair	Legal and Compliance Risk Management	02-03/11/2017	-	Jakarta	600,000
Jumlah Total						600,000

BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners is the Company's organ that has the duty of conducting general and/or special supervision in accordance with the Articles of Association and to provide advice to the Board of Directors as stipulated by the Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

The Board of Commissioners is responsible for overseeing the performance of the Board of Directors, providing advice, and ensuring that the Board of Directors has carried out their duties for the interests of stakeholders. The Board of Commissioners is responsible for submitting

memberikan laporan kepada RUPS serta memberikan rekomendasi remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta nominasi auditor eksternal perusahaan.

Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan *fit & proper test* dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pemegang Saham dan/atau Kementerian BUMN, serta memenuhi ketentuan dalam UU Perseroan Terbatas serta prinsip-prinsip GCG. Perseroan mewajibkan Dewan Komisaris untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik saham di Perseroan maupun di perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri dalam suatu laporan yang harus diperbaharui setiap tahunnya.

Dewan Komisaris tidak mengambil dan atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang memadai.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggung Jawaban kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Kinerja Dewan Komisaris dievaluasi berdasarkan unsur-unsur penilaian kinerja yang disusun oleh Komite Audit.

Pelaksanaan penilaian dilakukan pada tiap akhir periode tutup buku. Hasil Penilaian kinerjanya disampaikan dalam RUPS.

Komposisi Dewan Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris Perusahaan telah sesuai undang undang Nomor 40 2007 tentang Perseroan Terbatas, POJK No. 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin dan Anggaran Dasar Perusahaan yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama. Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen. Komposisi Dewan Komisaris Perusahaan periode 31 Desember 2017 sebagai berikut:

reports to the GMS and providing recommendations on the remuneration of members of the Board of Commissioners and Board of Directors and the nomination of the Company's external auditor.

The Board of Commissioners has met the fit & proper test by the Financial Services Authority (OJK) and Shareholders and/or the Ministry of SOES, as well as met the provisions in the Law of Limited Liability Company and the principles of GCG. The Company requires the Board of Commissioners to disclose their shares ownership, both in the Company and in other companies domiciled at home and abroad in a report that must be renewed annually.

The Board of Commissioners shall not take and or receive any personal benefits from the Company other than the remuneration and other facilities stipulated by the GMS. All members of the Board of Commissioners have the integrity, competence and adequate reputation.

In carrying out their duties, the Board of Commissioners answers directly to the GMS. It is the realization of accountability of the Board of Commissioners in conducting supervisory function over the management of the Company in the context of implementing the principles of GCG. The Board of Commissioners' performance is evaluated based on the criteria of performance prepared by the Audit Committee.

Assessment is carried out at the end of each book closing period. The results of the appraisal are to be submitted to the GMS.

Composition of the Board of Commissioners

The composition of the Company's Board of Commissioners complies with the Law Number 40 2007 concerning Limited Liability Companies, FSA Regulation No 3/POJK.05/2017 concerning Good Corporate Governance for Guarantor Institutions and the Company's Articles of Association which states that the Board of Commissioners consists of at least 2 (two) persons and one of them was appointed as the President Commissioner. The President Commissioner also serves as the Independent Commissioner. The composition of the Company's Board of Commissioners as of 31 December 2017 is as follows:

Tabel Komposisi Dewan Komisaris

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	SK Pengangkatan <i>Appointment Letter</i>	Tanggal Pengangkatan <i>Date of Appointment</i>
Budi Wisakseno	Komisaris Utama/Komisaris Independen Pengawas President Commissioner/Independent Commissioner/Supervisor	164/DIR/2016	25 Januari 2016 25 January, 2016
Yulison Marpaung	Komisaris Commissioner	No.37/KEP/DIR/II/2013	25 Februari 2013 February 25, 2013

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mempunyai tugas dan atau kewajiban untuk:

- a. Meminta keterangan secara tertulis kepada Direksi terhadap suatu permasalahan yang terjadi;
- b. Memberikan pendapat atau arahan dalam rapat Dewan Komisaris dengan Direksi atau rapat-rapat lain yang dihadiri oleh Dewan Komisaris;
- c. Kunjungan ke Divisi/Kantor Cabang tertentu dalam rangka memastikan pelaksanaan operasional perusahaan seperti *underwriting*, pembayaran klaim, pemasaran, sumber daya manusia keuangan dan aspek lainnya berjalan secara efektif;
Dalam hal Dewan Komisaris akan melakukan kunjungan kerja ke Divisi/Kantor Cabang dan Unit Pemasaran, prosedur yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:
 - 1) Dewan Komisaris menyampaikan rencana kunjungan kerja secara tertulis kepada Direksi dengan mencantumkan maksud dan tujuan, lokasi serta waktu kunjungan kerja yang akan dilakukan;
 - 2) Direksi mempersiapkan kunjungan kerja tersebut termasuk menyediakan fasilitas yang diperlukan sesuai ketentuan tentang perjalanan dinas Dewan Komisaris;
 - 3) Dalam hal kunjungan kerja dilakukan bersama sama dengan Direksi, prosedur tersebut di atas tidak diperlukan.
- d. Memberikan tanggapan atas laporan berkala yang diberikan oleh Direksi;
- e. Tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan dan keputusan RUPS;
- f. Beritikad baik, berhati-hati dan bertanggung-jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

Table of Composition of the Board of Commissioners

Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners has the duty and or obligation to:

- a. Request written information from the Board of Directors regarding problems that occurred;
- b. Provide opinions or directive during the Board of Commissioners meeting with the Board of Directors, or during other meetings attended by the Board of Commissioners;
- c. Visit certain Division/Branch Offices in order to ensure that the Company's operational activities, such as underwriting, claim settlement, marketing, human resources development, financial, and other aspects are carried out effectively.
The procedures in the event that the Board of Commissioners to conduct a visit to the Division/Branch Office and Marketing Unit are as follows:
 - 1) The Board of Commissioners to submit a written plan of visit to the Board of Directors by stating the intention, purpose, location and time of the visit;
 - 2) The Board of Directors to prepare the necessary facilities for the visit in accordance with the provisions regarding the official tip of the Board of Commissioners;
 - 3) In the event that the work visit is carried out together with the Board of Directors, then the above procedure is not required.
- d. Provide responses to periodic reports provided by the Board of Directors;
- e. Comply with applicable legislation, the Company's Articles of Association and GMS decisions;
- f. Having good faith, careful and responsible in carrying out supervision and giving advice to the Board of Directors, only for the interests and in accordance with the purposes and objectives of the Company;

- g. Pengawasan untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS;
- h. Melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan termasuk ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku, pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Bisnis serta ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS;
- i. Melakukan pengawasan terhadap Direksi untuk memastikan Direksi mematuhi tata urutan peraturan internal Perseroan;
- j. Memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;
- k. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi dan segenap jajarannya berkaitan dengan pengurusan Perseroan;
- l. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi dan segenap Jajarannya berkaitan dengan penyusunan visi, misi serta rencana-rencana strategis Perseroan lainnya seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar;
- m. Memberikan pendapat dan saran serta pengesahan mengenai RJPP dan RKAP yang diusulkan Direksi. Pengesahan untuk RJPP selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak penyampaian rancangan oleh Direksi dan 30 (tiga puluh) hari sejak tahun buku baru dimulai untuk pengesahan RKAP;
- n. Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam Perseroan;
- o. Melakukan penelitian dan penelaahan atas laporan laporan dari Direksi dan segenap jajarannya, terutama yang berkaitan dengan tugas-tugas spesifik yang telah diputuskan bersama;
- p. Meneliti dan menelaah laporan-laporan dari komite-komite yang ada di bawah Dewan Komisaris;
- q. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan baik dari informasi-informasi internal yang disediakan oleh Perusahaan maupun dari informasi-informasi eksternal yang berasal dari media maupun dari sumber-sumber lainnya;
- r. Bila dipandang perlu, menghadiri rapat-rapat kerja/koordinasi dengan Direksi dan segenap jajarannya;
- s. Melakukan usaha-usaha untuk memastikan bahwa Direksi dan jajarannya telah mematuhi ketentuan Perundang-undangan serta peraturan-peraturan lainnya dalam mengelola Perusahaan;
- g. Supervision is carried out for the interests of the Company by taking into account the interests of the Shareholders and being accountable to the GMS;
- h. Carry out oversight duties on the policies of the Board of Directors in implementing Company management including compliance with applicable laws and regulations, implementation of the Company's Long Term Plan (RJPP), Corporate Work Plan and Budget (RKAP), Business Plans and provisions of the Articles of Association and GMS decisions;
- i. Supervise the Board of Directors to ensure the Board of Directors adheres to the Company's internal rules;
- j. Provide advice to the Board of Directors in implementing the management of the Company;
- k. Provide opinions and suggestions to the Board of Directors and all staff related to the management of the Company;
- l. Provide opinions and suggestions to the Board of Directors and all of its Staff regarding the preparation of the Company's vision, mission and strategic plans as stipulated in the Articles of Association;
- m. Provide opinions and suggestions as well as ratifying the RJPP and RKAP proposed by the BOD. Ratification of the RJPP should be no later than 60 (sixty) days from the submission of the draft by the Board of Directors and 30 (thirty) days since the new fiscal year begins for the ratification of the RKAP;
- n. Monitor the openness and effectiveness of communication within the Company;
- o. To go over and review the reports from the Board of Directors and all staff, especially those related to specific tasks that have been jointly decided;
- p. To go over and to review reports from the Committees under the Board of Commissioners;
- q. Keep updated with the development of the Company's activities both from internal information provided by the Company and from external information originating from the media as well as from other sources;
- r. If deemed necessary, attending the work/coordination meetings with the Board of Directors and all staff;
- s. Ensure that the Board of Directors and staff are in compliance with laws and other regulations in managing the Company;

- t. Menyusun rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris untuk periode tahun berjalan;
- u. Melakukan pembagian kerja diantara para Anggota Dewan Komisaris yang diatur oleh mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan;
- v. Melakukan *self assessment* atas kinerja Dewan Komisaris secara periodik;
- w. Menerapkan GCG secara konsisten; dan
- x. Memantau efektivitas praktik GCG antara lain dengan mengadakan pertemuan berkala antara Dewan Komisaris dengan Direksi untuk membahas implementasi GCG di Perseroan.
- t. Prepare the work plan and budget of the Board of Commissioners for the current year period;
- u. Managing the division of duties among the members of the Board of Commissioners, and to support their duties, the Board of Commissioners is assisted by the Secretary of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners at the expense of the Company;
- v. Conduct periodic self-assessments on the performance of the Board of Commissioners;
- w. Implement GCG consistently; and
- x. Monitor the effectiveness of GCG practices, among others, by holding regular meetings with the Board of Directors to discuss the GCG implementation in the Company.

Hak dan Kewenangan Dewan Komisaris

Hak Dewan Komisaris

- a. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu berhak memasuki bangunan bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perusahaan;
- b. Memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;
- c. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris atas biaya Perusahaan untuk jangka waktu terbatas dapat meminta bantuan ahli-ahli untuk melakukan pemeriksaan sesuai tugas dan wewenangnya;
- d. Anggota Dewan Komisaris berhak meminta penjelasan dan menanyakan segala hal yang berhubungan dengan tugas-tugas Dewan Komisaris dan Direksi maupun yang berkaitan dengan Perusahaan, dan Direksi wajib menyampaikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris;
- e. Pembagian kerja dan keanggotaan komite diantara para Anggota Dewan Komisaris diatur oleh Dewan Komisaris, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perusahaan;
- f. Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak untuk menerima honorarium dan tunjangan lain sesuai

The Rights and Authority of the Board of Commissioners

The Rights of the Board of Commissioners

- a. Members of the Board of Commissioners, both jointly and individually, at all time have the right to enter buildings and premises or other places that are used or under the Company's control;
- b. Checking books, letters of evidence, inventory, checking and matching the cash (for purposes of verification) and other securities and to be acknowledged of all actions taken by the Board of Directors;
- c. Whenever deemed necessary, the Board of Commissioners at the Company's expense, for a limited period of time, may request the assistance of experts to carry out inspections according to their duties and authorities;
- d. Members of the Board of Commissioners have the right to ask for an explanation and all matters relating to the duties of the Board of Commissioners and the Board of Directors as well as those relating to the Company, and the Board of Directors must submit an explanation of all matters asked by the Board of Commissioners;
- e. Division of work and committee membership among the members of the Board of Commissioners is regulated by the Board of Commissioners, and for the smooth functioning of the Board of Commissioners can be assisted by a Secretary appointed by the Board of Commissioners at the Company's expense;
- f. Each Member of the Board of Commissioners has the right to receive honorarium and other benefits in

dengan ketentuan yang berlaku yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- g. Mendapatkan sarana dan fasilitas Perusahaan sesuai dengan hasil penetapan RUPS yang penyediaannya disesuaikan dengan kondisi keuangan Perusahaan, azas kepatutan dan kewajaran serta tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Wewenang Dewan Komisaris

- 1. Dewan Komisaris berwenang untuk menyetujui atau menolak secara tertulis rencana Direksi untuk Mengagunkan aktiva tetap untuk:
 - a. Penarikan kredit jangka menengah/panjang;
 - b. Mendirikan Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan;
 - c. Melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain, Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan;
 - d. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran Anak Perusahaan
 - e. Mengadakan kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, kerjasama operasi dan perjanjian kerjasama lainnya yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - f. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (*borgatau avalist*) yang mempunyai akibat keuangan yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - g. Mengalihkan, melepaskan atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan yang jumlahnya kurang dari 50% (lima puluh per seratus) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak;
 - h. Menghapus-bukukan piutang macet dan persediaan barang mati yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - i. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perseroan dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya lebih dari 5 (lima) tahun;
 - j. Menetapkan *blue print* organisasi Perusahaan;
 - k. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan;
 - l. Melakukan tindakan-tindakan lain yang belum ditetapkan dalam RKAP namun masih diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dalam

accordance with the applicable provisions whose amount is determined by the GMS and the applicable laws and regulations;

- g. Obtain Company facilities in accordance with the GMS resolution, the provision of which is adjusted to the Company's financial conditions, propriety and fairness principles and should not be conflict with the prevailing laws and regulations.

Authority of the Board of Commissioners

- 1. The Board of Commissioners has the authority to approve or to deny in writing the plan of the Board of Directors to pledge fixed assets as collateral for:
 - a. Medium/long term loan;
 - b. Establishing subsidiary and/or joint venture company;
 - c. Conducting equity sharing with other companies, subsidiaries and joint ventures;
 - d. Conducting merger, consolidation, expropriation, separation and dissolution of Subsidiary;
 - e. Conducting licensing cooperation, management contracts, leasing assets, joint operations and other cooperation agreements that exceed certain values set by the Board of Commissioners;
 - f. Binding the Company as a guarantor (*borg* or *avalist*) with financial consequences exceeding the specified limit set by the Board of Commissioners.
 - g. Transferring, disposing or pledging the Company's assets whose amount are less than 50% (fifty per hundred) of the Company's net worth in 1 (one) transaction or more, whether related or not related to each other;
 - h. Writing off non-performing loan and assets whose values exceeding a certain number set by the Board of Commissioners;
 - i. Disposing and writing off fixed assets whose economic age exceeding 5 (five) years, a common practice in the industry.
 - j. Preparing the blue print of the Company's organization;
 - k. Determining and changing the Company's logo;
 - l. Performing other actions not specified in the RKAP but are stipulated in the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations. In the event that within 30 (thirty) days of receipt

waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan keputusan tertulis, maka Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi.

2. Memberhentikan untuk sementara Anggota Direksi dari jabatannya apabila anggota Direksi bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi melakukan kerugian pada Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris;
 - b. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi tersebut disertai dengan alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi dan disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut;
 - c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan;
 - d. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara dimaksud harus diselenggarakan RUPS Luar Biasa oleh Dewan Komisaris yang akan memutuskan apakah mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut;
 - e. Dalam RUPS Luar Biasa, anggota Direksi diberikan kesempatan untuk membela diri;
 - f. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari RUPS Luar Biasa tidak diselenggarakan atau RUPS Luar Biasa tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan wajib melakukan tugas kembali sebagaimana mestinya;
 - g. Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara dinyatakan batal sebagaimana dimaksud poin f.

of the request or explanation and documents from the Board of Directors, the Board of Commissioners does not provide a written decision, the Board of Commissioners is deemed to have approved the Board of Directors' proposal.

2. Temporarily dismissing member of the Board of Directors from his/her position in the event that the said person acted in contrary to the Articles of Association or showed an indication of causing loss to the Company or neglecting his/her obligations or under urgent circumstances, with due observance to the following provisions:
 - a. The decision of the Board of Commissioners regarding the temporary dismissal of members of the Board of Directors carried out in accordance with the procedures for decision making at the Board of Commissioners' Meeting;
 - b. The said temporary termination must be notified in writing to the member of the Board of Directors accompanied by the reasons for such action with a copy for the Board of Directors submitted within no later than 2 (two) days after the stipulation of the temporary dismissal;
 - c. Members of the Board of Directors who are temporarily dismissed are not authorized to carry out the management action for the Company or to represent the Company both inside and outside the court of justice;
 - d. Within a period of no later than 30 (thirty) days after the said temporary dismissal, an Extraordinary GMS must be held by the Board of Commissioners to decide whether to revoke or strengthen the decision on the said temporary dismissal;
 - e. During the Extraordinary GMS, the said member of the Board of Directors has the chance to defend themselves;
 - f. In the event that an Extraordinary GMS is not held within a period of 30 (thirty) days or cannot come to a decision, then the temporary dismissal should be annulled and void and hence the member of the Board of Directors concerned is obliged to carry out the assignment as it should;
 - g. Temporary dismissal cannot be extended or re-defined for the same reason, after declared annulled and void as referred to in point f.

3. Mengurus Perseroan untuk sementara dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris;
4. Dapat mengusulkan kepada Direksi untuk melaksanakan RUPS jika dianggap perlu dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan;
5. Memberikan persetujuan atas penunjukkan Kepala Satuan Pengawasan Intern;
6. Memberikan persetujuan bahwa kepentingan salah seorang Anggota Direksi akan diwakili oleh Anggota Direksi lainnya dalam hal terjadi benturan kepentingan salah seorang Anggota Direksi yang diwakili tersebut. Dalam hal terjadi benturan kepentingan oleh seluruh Anggota Direksi maka Perusahaan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau oleh seorang yang ditunjuk Dewan Komisaris.

Uraian Tugas dan Tanggungjawab Anggota Dewan Komisaris

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011, dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau Anggaran Dasar Perusahaan serta membuat pembagian tugas yang diatur oleh Dewan Komisaris. Tugas Komisaris Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris. Kemudian, untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian Perseroan secara maksimal, Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

Tabel Pembagian Tugas Dewan Komisaris

3. In the event all members of the Board of Directors are temporarily dismissed, or in the event the Company has no Board of Directors, the Board of Commissioners has the right authorize one or more members of the Board to run the Company on behalf of the Board of Commissioners.
4. Whenever deemed necessary, proposing to the Board of Directors to implement the GMS by stating the matters to be discussed.
5. Giving approval for the appointment of the Head of the Internal Audit Unit;
6. Giving approval in the event a member of the Board of Directors is to be represented members by another member of the Board of Directors, due to conflict of interest. In the event that all members of the Board of Directors have conflict of interest than the Company will be represented by the Board of Commissioners or by a person appointed by the Board of Commissioners.

Duties and Responsibilities of Members of the Board of Commissioners

As stipulated by the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises number PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011, in carrying out their duties, the Board of Commissioners shall comply with the legislation and/or the Articles of Association of the Company and make distribution and make division of duties. As primus inter pares, the duty of the President Commissioner is to coordinate the activities of the Board of Commissioners. Then, to carry out the Company's supervisory and controlling functions to the fullest, the Board of Commissioners distributes the tasks to each member of the Board of Commissioners as follows:

Table of Distribution of Duties of the Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Uraian Tugas Job Description
Budi Wisakseno	Komisaris Utama/ Komisaris Independen Pengawas President Commissioner/ Independent Commissioner Supervisor	<ul style="list-style-type: none"> · Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan fungsi Dewan Komisaris sebagai organ Perseroan; · Melakukan pengawasan secara umum atas kepengurusan Perseroan oleh Direksi dan Manajemen; · Pengawasan atas kepengurusan Perseroan oleh Direksi dan Manajemen yang terkait dengan bidang Akuntansi dan Keuangan; · Mewakili pelaksanaan hubungan organ Dewan Komisaris dengan pihak internal dan eksternal Perseroan; · Koordinator pelaksanaan tugas anggota Dewan Komisaris lainnya; · Menunjuk anggota Komisaris untuk bertindak atas nama Dewan Komisaris; · Menetapkan pembagian tugas anggota Dewan Komisaris; dan · Menetapkan tugas Sekretaris Dewan Komisaris

Nama Name	Jabatan Position	Uraian Tugas Job Description
		<ul style="list-style-type: none"> · Performing duties related to the functions of the Board of Commissioners as the Company's organs; · Conducting general supervision over the management of the Company performed by BOD and management staff; · Supervising the Company's Accounting and Financial management performed by BOD and management staff; · Representing the relationship between the Board of Commissioners and internal as well as external parties of the Company; · Coordinating duties of other members of Board of Commissioners; · Appointing a member of Board of Commissioners to act on behalf of Board of Commissioners; · Distributing the duties of members of Board of Commissioners; and · Determining the duties of Board of Commissioners' Secretary.
Yulison Marpaung	Komisaris Commissioner	<ul style="list-style-type: none"> · Pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan fungsi Dewan Komisaris sebagai organ Perseroan; · Pengawasan atas kepengurusan Perseroan oleh Direksi dan Manajemen yang terkait dengan bidang GCG, Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Intern dan Transportasi Budaya Kerja; · Pelaksanaan tugas lain yang disepakati oleh Dewan Komisaris.
		<ul style="list-style-type: none"> · Fulfilling duties related to the functions of Board of Commissioners as an organ of the Company; · Supervising the management of the Company by the Board of Directors and Management, related to GCG, Risk Management, Internal Control System and Work Culture Transformation; · Fulfilling other duties agreed by the Board of Commissioners.

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan Anggaran Dasar Perusahaan adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dan RUPS belum menetapkan penggantinya, maka tugas-tugas Dewan Komisaris yang lowong tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengisian jabatan Dewan Komisaris yang lowong untuk sementara. RUPS dapat memberhentikan Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya, demi kepentingan dan tujuan Perseroan.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

1. Meninggal dunia;
2. Masa jabatannya berakhir;
3. Tidak lagi memenuhi persyaratan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; dan
5. Mengundurkan diri.

Terms of Office of the Board of Commissioners

The terms of office of the Board of Commissioners as stipulated in the Company's Articles of Association is 5 (five) years and can be reappointed for 1 (one) terms of office. In the event that the terms of office of the Board of Commissioners ends while the GMS has yet determined the replacement, then the vacant duties shall be carried out in accordance with the provisions on the temporary vacant position of the Board of Commissioners. The GMS can dismiss the Board of Commissioners at any time by stating the reasons, for the interests and objectives of the Company.

Terms of office of member of the Board of Commissioners ends when the said person:

1. Demised;
2. The term of office ended;
3. Failed to meet the requirements of applicable law;
4. Dismissed based on GMS decision; and
5. Resigned.

Independensi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris wajib menjaga independensinya sehingga dapat bertugas sebaik-baiknya untuk kepentingan Perseroan. Perseroan menetapkan beberapa ketentuan untuk menjaga independensi Dewan Komisaris di antaranya:

1. Selain Dewan Komisaris, pihak lain tidak diperkenankan campur tangan dalam kepengurusan Perseroan;
2. Dewan Komisaris harus dapat mengambil keputusan secara obyektif, tanpa benturan kepentingan dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun;
3. Direksi tidak diperkenankan melakukan aktivitas yang dapat mengganggu independensi Dewan Komisaris dalam mengurus Perseroan; dan
4. Dewan Komisaris wajib menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk komitmennya dalam melaksanakan kegiatan Perseroan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris tahun 2017

Dewan Komisaris secara proaktif melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada Direksi. Pengawasan dilakukan secara langsung termasuk melakukan *monitoring* tindak lanjut atas rekomendasi dari Dewan Komisaris kepada Direksi, maupun melalui Komite. Selama tahun 2017, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dan *monitoring* terhadap:

1. Kinerja Perseroan bidang Keuangan bulanan, triwulan dan semesteran.
2. Memberikan nasehat/saran untuk bidang underwriting, Investasi, Akuntansi & Keuangan, Organisasi & SDM, GCG, Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern, Visi, Misi dan Budaya Kerja, TI dan lainnya (Reasuransi, Piutang, Aktiva Tetap, Recoveries).
3. Tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan audit/temuan auditor.
4. *Monitoring/evaluasi Kinerja Kantor Cabang.*

Dewan Komisaris juga telah menyampaikan beberapa rekomendasi yang disampaikan kepada Direksi melalui Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris (Radikom) yang meliputi:

1. Memberikan pengarahan kepada Direksi mengenai RKAP 2017 dan memantau pencapaiannya;
2. Mengevaluasi dan memberikan pengarahan terkait kinerja keuangan perusahaan secara bulanan;

Independence of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners shall stay independent in order to perform their duties at the best way possible for the interests of the Company. The Company stipulates several provisions to maintain the independence of the Board of Commissioners including:

1. In addition to the Board of Commissioners, no other party is permitted to interfere in the management of the Company;
2. The Board of Commissioners must be able to make decisions objectively, without conflicts of interest and free from any pressure from any party;
3. The Board of Directors is not permitted to carry out activities that could interfere with the independence of the Board of Commissioners in managing the Company; and
4. The Board of Commissioners must sign the Integrity Pact as a form of its commitment in carrying out the Company's activities which can lead to a conflict of interest.

Supervision and Recommendation of the Board of Commissioners in 2017

Proactively, the Board of Commissioners supervises and provides input to the Board of Directors. The supervisory function is carried out directly, among others by monitoring follow-up actions on recommendations from the Board of Commissioners to the Board of Directors, as well as through the Committee. During 2017, the Board of Commissioners supervised and monitored:

1. The Company's monthly, quarterly and half yearly financial performance.
2. Providing advice for underwriting, investment, accounting & finance, organization & HR, GCG, Risk Management and Internal Control Systems, Vision, Mission and Corporate Culture, IT and others (Reinsurance, Accountable Receivables, Fixed Assets, Recoveries).
3. Follow-up on the audit report/auditor's findings.
4. Monitoring/evaluation of Branch Office Performance.

The Board of Commissioners has also submitted several recommendations from the Board of Directors through the Board of Directors and Board of Commissioners Meeting (Radikom) which includes:

1. Providing direction to the Board of Directors regarding the 2017 RKAP and monitoring its achievements;
2. Evaluating and providing guidance regarding the Company's financial performance on a monthly basis;

3. Memberi perhatian mengenai RUPS dan RUPS LB;
4. Mengevaluasi dan menyetujui keputusan Manajemen dan tindakan strategis yang diusulkan oleh Direksi;
5. Memantau penerapan manajemen risiko, memantau dan memperkuat kepatuhan;
6. Mengevaluasi tindak lanjut temuan audit internal dan eksternal; dan
7. Memantau pelaksanaan GCG serta evaluasi kinerja Direksi.

Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2017, rapat Dewan Komisaris diselenggarakan sebanyak 15 kali dalam Rapat Direksi dan Dewan Komisaris (Radikom).

Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi (RADIKOM)

Selain mengadakan rapat secara internal, Dewan Komisaris juga mengadakan rapat dengan Direksi atau Radikom yang menekankan pentingnya hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dengan Direksi. Hubungan kerja harmonis yang terbuka dan saling menghormati ini penting untuk mendukung efektivitas dan produktivitas kinerja Perseroan.

Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi (Radikom) diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan atau sewaktu waktu bila diperlukan. Sepanjang tahun 2017, Radikom telah diselenggarakan sebanyak 15 kali. Tabel Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam Radikom dan agendanya disampaikan sebagai berikut:

**Tabel kehadiran Rapat Dewan Komisaris-Direksi
Tahun 2017**

No.	Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meeting	Kehadiran Attendance	Percentase Percentage
1	Budi Wisakseno	Komisaris Utama/Komisaris Independen Pengawas President Commissioner/Independent Commissioner Supervisor	15	15	100%
2	Yulison Marpaung	Komisaris Commissioner	15	15	100%
3	Pribadi	Direktur Utama President Director	15	15	100%
4	Meivyta B. Husman	Direktur Operasional Operational Director	15	12	80%
5	M. Effendi Nasution	Direktur Keuangan Financial Director	15	10	67%

Catatan: no 4 & 5 efektif bertugas s/d Oktober 2017

3. Paying attention to the GMS and EGMS;
4. Evaluating and giving approval on the Management's decisions and strategic actions proposed by the Board of Directors;
5. Monitoring the implementation of risk management, monitoring and strengthening the compliance
6. Evaluating the follow-up of internal and external audit findings; and
7. Monitoring the implementation of GCG and evaluating the performance of the Board of Directors.

Meeting of the Board of Commissioners

During 2017, the Board of Commissioners' convened 15 meetings of the Board of Directors and Board of Commissioners (Radikom).

Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors (RADIKOM)

In addition to internal meetings, the Board of Commissioners also holds meetings with the Board of Directors (Radikom) emphasizing the importance of a fine working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors. This open and respectful harmonious working relationship is important to support the effectiveness and productivity of the Company.

Meetings of the Board of Commissioners and Directors (Radikom) are held at least once a month or at any time whenever deemed necessary. Throughout 2017, Radikom was held 15 times. The table of attendance of the Board of Commissioners and Directors in the Radikom and its agenda are presented as follows:

Table of attendance at the 2017 Board of Commissioners-Directors Meeting

Note: no 4 & 5 effectively on duty until October 2017

Tabel Agenda Rapat Komisaris-Direksi Tahun 2017

Table of Agenda of the 2017 Board of Directors Meeting

No.	Waktu Rapat <i>Date</i>	Agenda <i>Agenda</i>	Realisasi <i>Realization</i>
1	Februari 2017 February 2017	Pembahasan kinerja perusahaan bulan Januari 2017 Discussion of the Company performance of January 2017	14 Februari 2017 14 February 2017
2	Maret 2017 March 2017	Pembahasan kinerja perusahaan bulan Pebruari 2017 Discussion of the Company performance of February 2017	13 Maret 2017 13 March 2017
3	April 2017 April 2017	Pembahasan kinerja s/d bulan Maret 2017 dan Persiapan RUPS 2016 Discussion of the performance until March 2017 and Preparation for the 2016 GMS	20 April 2017 20 April 2017
4	Mei 2017 May 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Kinerja s/d April 2017 2. Persiapan RUPS 3. Tindak lanjut atas notulen Radikom sebelumnya <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of the performance until April 2017 2. Preparation of the GMS 3. Follow-up on the minutes of the previous Radikom 	19 Mei 2017 19 May 2017
5	Juni 2017 June 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Kinerja s/d Mei 2017 2. Persiapan RUPS 3. Tindak lanjut atas notulen Radikom sebelumnya <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of the performance until May 2017 2. Preparation of the GMS 3. Follow-up on the minutes of the previous Radikom 	13 Juni 2017 13 June 2017
6	Juli 2017 July 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Kinerja s/d Juni 2017 1. Discussion of the performance until June 2017 	11 Juli 2017 11 July 2017
7	Juli 2017 July 2017	<ol style="list-style-type: none"> 2. Persiapan Rapat Pemegang Saham Laporan s/d Triwulan II 2017 2. Preparation of the GMS, Report until 2nd Quarter of 2017 	27 Juli 2017 27 July 2017
8	Agustus 2017 August 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan kinerja s/d Juli 2017 2. Usulan revisi RKAP 2017 3. Pemenuhan POJK terkait Penjaminan syariah 4. Persiapan undangan dari Komisaris Askrindo 5. Tindaklanjut atas Notulen Radikom sebelumnya <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of the performance until July 2017 2. Proposed revisions to the 2017 RKAP 3. Compliance of FSA Regulation related to sharia guarantees 4. Preparing invitations from the Commissioner of Askrindo 5. Follow-up on the minutes of the previous Radikom 	22 Agustus 2017 22 August 2017
9	September 2017 September 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan hasil pemeriksaan langsung OJK 2. Pembahasan usulan kepala SPI dan Korsek 3. Laporan kegiatan Forum Komunikasi SPI 4. Pembahasan instrumen GCG <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of the results of the FSA's direct examination 2. Discussion of the nomination of the Head of IAU and Corporate Secretary 3. Report on IAU Communication Forum activities 4. Discussion of GCG instruments 	4 September 2017 4 September 2017
10	September 2017 September 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan kinerja s/d Agustus 2017 2. Rencana Penyelesaian audit TI 3. Rencana Perusahaan dalam Peningkatan GCG 4. Perkembangan usulan revisi RKAP 2017 dan RKAP 2018 5. Struktur Organisasi 	19 September 2017 19 September 2017



No.	Waktu Rapat <i>Date</i>	Agenda <i>Agenda</i>	Realisasi <i>Realization</i>
		<ul style="list-style-type: none"> 1. Discussion of the performance until August 2017 2. IT audit completion plan 3. Company Plans for GCG improvement 4. Development of the proposal of the revisions to the 2017 RKAP and 2018 RKAP 5. Organizational Structure 	
11	Oktober 2017 October 2017	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengesahan Piagam Kepatuhan 2. Kepengurusan PT JPAS 3. Persiapan RUPS LB PT JPAS 4. Pending/Pipeline matter <ul style="list-style-type: none"> 1. Ratification of Compliance Charter 2. Management of PT JPAS 3. Preparation for EGMS of PT JPAS 4. Pending/Pipeline matter 	16 Oktober 2017 16 October 2017
12	Oktober 2017 October 2017	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan kinerja s/d September 2017 2. Rekapitulasi persiapan RUPS LB 3. Lain-lain <ul style="list-style-type: none"> 1. Discussion of the performance until September 2017 2. Recapitulation of preparations for the General Meeting of Shareholders 3. Others 	17 Oktober 2017 17 October 2017
13	November 2017 November 2017	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Kinerja s/d Oktober 2017 2. Persiapan tutup tahun 2017 3. Lain-lain <ul style="list-style-type: none"> 1. Discussion of the performance until October 2017 2. Preparation for closing 2017 3. Others 	14 November 2017 14 November 2017
14	November 2017 November 2017	Pemaparan Program Kerja Tahun 2018 Presentation of the 2018 Work Program	21 November 2017 21 November 2017
15	Desember 2017 December 2017	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Kinerja s/d November 2017 2. Ulasan dan masukan dari komite audit dalam rangka tutup buku tahun 2017 3. Persiapan <i>self assessment</i> GCG dan KPKU 4. Persiapan <i>fit and proper test</i> Direksi 5. Lain-lain <ul style="list-style-type: none"> 1. Discussion of the performance until November 2017 2. Review and input from the audit committee for the closing the 2017 fiscal year 3. Preparation of GCG self-assessment and KPKU 4. Preparation of the Board of Directors' fit and proper test 5. Others 	12 Desember 2017 12 December 2017

Arahan Dewan Komisaris Kepada Direksi

Sepanjang tahun 2017, Dewan Komisaris telah memberikan nasihat/masukan/arahan kepada Direksi terhadap 4 (empat) bidang .

Directives from the Board of Commissioners to the Board of Directors

Throughout 2017, the Board of Commissioners has provided advice/input/direction to the Board of Directors on 4 (four) issues.

Tabel Arahan Dewan Komisaris Tahun 2017

Table of the Board of Commissioners' Direction for 2017

No.	Bidang <i>Issue</i>	Jumlah Arahan <i>Number of Direction</i>
1	<i>Underwriting</i> Underwriting	8 kali 8 times
2	Investasi Investment	4 kali 4 times
3	Keuangan & Umum Financial & General Affairs	14 kali 14 times
4	Pengendalian Control	13 kali 13 times

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2017, Perseroan mengikutsertakan Dewan Komisaris dalam beberapa pelatihan guna mengasah kemampuan dalam memberikan supervisi atas pengelolaan Perseroan. Realisasi pelatihan Dewan Komisaris untuk pengembangan kompetensi Dewan Komisaris adalah sebesar Rp16,75 juta dengan rincian sebagai berikut:

Board of Commissioners Training and Competency Development Program

Throughout 2017, the Board of Commissioners attended several trainings to hone their skills in providing supervision over the management of the Company. The realization of the Board of Commissioners' training for the competency development the Board of Commissioners is Rp16.75 million with details as follows:

Tabel Informasi Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Table of Information on Training and Competency Development of the Board of Commissioners

No.	Nama Komisaris <i>Name of Commissioner</i>	Pelatihan <i>Training</i>	Waktu <i>Date</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>	Lokasi <i>Location</i>	Biaya (Rp) <i>Cost (Rp)</i>
1	Budi Wisakseno	Legal and Compliance Risk Management Legal and Compliance Risk Management	27-29/09/2017	-	Jakarta	6,750,000
2	Yulison Marpaung	Mukernas & Konferensi Nasional II FKSPI 2017 National work conference & National conference II of FKSPI 2017	23-25/08/2017	FKSPI	Bali	10,000,000
Jumlah Total						16,750,000

Pengungkapan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan dan pemberian saran atas pengelolaan Perusahaan kepada Direksi, Dewan Komisaris mengacu kepada Pedoman Kerja Dewan Komisaris (*Board Charter*). Tujuan *Board Charter* adalah memberikan pedoman kepada Dewan Komisaris dan Direksi dalam memahami peraturan-peraturan yang terkait dengan tata kerja Dewan Komisaris

Organizer Disclosure of the Board of Commissioners' Charter

In order to carry out the duties of supervision and giving advice on the management of the Company performed by the Board of Directors, the Board of Commissioners refers to the Guidelines of the Board of Commissioners (*Board Charter*). The purpose of the *Board Charter* is to provide guidance for the Board of Commissioners and the Board of Directors in understanding the regulations

dan Direksi. *Board Charter* Dewan Komisaris telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor: 078/KEP-DIR/XII/2014 pada 30 Desember 2014.

DIREKSI

Direksi merupakan organ Perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar. Dalam melaksanakan tugas pengelolaan Perseroan, Direksi bertanggungjawab secara kolektif, sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dan memastikan kesinambungan bisnis Perseroan. Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai pembagian tugas dan wewenang yang diatur Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan Perseroan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Kinerja Direksi dievaluasi oleh Dewan Komisaris baik secara individual maupun kolektif berdasarkan unsur-unsur penilaian kinerja Direksi.

Pelaksanaan penilaian dilakukan pada tiap akhir periode tutup buku. Hasil penilaian kinerja Direksi oleh Dewan Komisaris disampaikan dalam RUPS.

Komposisi Anggota Direksi

Komposisi Direksi Perseroan terdiri dari anggota-anggota yang memiliki kompetensi di bidang Asuransi, Keuangan serta Manajemen sehingga memungkinkan dilakukannya proses pengambilan putusan yang efektif, efisien dan segera.

Pengangkatan Direksi Perseroan dilakukan pada tanggal 26 Februari 2013, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia No. 37/KEP/DIR/II/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dengan susunan penugasan sebagai berikut:

related to the working procedures of the Board of Commissioners and the Board of Directors. The Board of Commissioners' Charter was determined through the BOD Decree Number: 078/KEP-DIR/XII/2014 on 30 December 2014.

BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors is the Company's organ fully responsible for the management of the Company for the interests and the objectives of the Company in accordance with the Articles of Association. In carrying out the management tasks, the Board of Directors are collectively responsible, in order to generate added values and to ensure the Company's business continuity. Each member of the Board of Directors carries out his/her duties and makes decisions in accordance with the division of duties and authorities regulated in the Articles of Association and the applicable laws and regulations

In carrying out their duties, members of the Board of Directors answers directly to the GMS. The responsibility of the Board of Directors to the GMS is the realization of the accountability in managing the Company in the context of implementing the principles of GCG. The performance of the Board of Directors is evaluated by the Board of Commissioners both individually and collectively based on the criteria set for the Board of Directors' performance evaluation.

The assessment is carried out at the end of each book closing period. The result of the assessment of the Board of Directors performance by the Board of Commissioners is to be submitted at the GMS.

Composition of the Board of Directors

The Board of Directors consists of members who have competencies in the fields of insurance, finance and management, so that they can make decisions effectively, efficiently and immediately.

The Board of Directors was appointed on February 26, 2013, based on the Decree of the Board of Directors of PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia No. 37/KEP/DIR/II/2013 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, with the assignment arrangements as follow:

Tabel Komposisi Direksi Perseroan 2017

Nama Name	Jabatan Position	SK Pengangkatan Letter of Appointment	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment
Pribadi	Direktur Utama President Director	No.37/KEP/DIR/II/2013	25 Februari 2013 25 February 2013
M. Effendi Nasution	Direktur Keuangan Director of Finance	No.37/KEP/DIR/II/2013	25 Februari 2013 25 February 2013
Meyvita B. Husman	Direktur Operasional Director of Operations	No.37/KEP/DIR/II/2013	25 Februari 2013 25 February 2013

Pada tanggal 19 Oktober 2017 terjadi pergantian Direksi sehingga susunan Direksi sebagai berikut:

Tabel Komposisi Direksi Perseroan 2017

Nama Name	Jabatan Position	SK Pengangkatan Letter of Appointment	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment
Pribadi	Direktur Utama President Director	No.37/KEP/DIR/II/2013	25 Februari 2013 25 February 2013
Subagio Istiarno	Direktur Keuangan & SDM Director of Finance & HR Affairs	RUPSLB 19/10/2017	19 Oktober 2017 19 October 2017
Supardi Najamuddin*	Direktur Pemasaran Director of Marketing	RUPSLB 19/10/2017	19 Oktober 2017 19 October 2017

On October 19, 2017, there was a change in the composition of the Board of Directors, thus the composition of the Board of Directors became as follows:

Tabel Susunan Direksi per Oktober 2017

Table of the composition of the Board of Directors as of Oktober 2017

Nama Name	Jabatan Position	SK Pengangkatan Letter of Appointment	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment
Pribadi	Direktur Utama President Director	No.37/KEP/DIR/II/2013	25 Februari 2013 25 February 2013
Subagio Istiarno	Direktur Keuangan & SDM Director of Finance & HR Affairs	RUPSLB 19/10/2017	19 Oktober 2017 19 October 2017
Supardi Najamuddin*	Direktur Pemasaran Director of Marketing	RUPSLB 19/10/2017	19 Oktober 2017 19 October 2017

* Menunggu keputusan OJK

* Waiting for FSA's decision

Tugas dan Kewajiban Direksi

Direksi bertugas secara kolektif menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan atau Keputusan RUPS. Direksi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus selalu:

1. Melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta memastikan agar Perseroan melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Tunduk pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan

Duties and Obligations of the Board of Directors

In carrying out all actions relating to the management of the company, the Board of Directors must work collectively for the interests of the Company, in accordance with the purposes and objectives of the Company, and represent the Company inside and outside the Court regarding all matters and events related to the company, with restrictions regulated in legislation, Articles of Association and or GMS Decisions. The Board of Directors in carrying out their duties and obligations must always:

1. Discharge their duties in good faith for the interests of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company, and ensure that the Company carries out its social responsibilities and takes into account the interests of various Stakeholders in accordance with the provisions of legislation;
2. Comply with the applicable laws and regulations, Articles of Association and GMS decisions and ensure



RUPS serta memastikan seluruh aktivitas Perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS;

3. Menerapkan GCG secara konsisten;
4. Mematuhi tata urutan peraturan internal Perseroan;
5. Bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan Perseroan;
6. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
7. Bertanggung-jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya;
8. Memperhatikan masukan-masukan yang diberikan oleh Dewan Komisaris;
9. Melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan serta mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, dengan pembatasan tertentu;
10. Wajib menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham masing-masing Direktur dan anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perusahaan lain serta tanggal saham itu diperoleh;
11. Bertanggung-jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya;
12. Memelihara dan menyimpan di tempat kedudukan Perseroan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan dan dokumen Perusahaan lainnya;
13. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham;
14. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham;
15. Anggota Direksi wajib mengungkapkan:
 - a. Kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada Perseroan dan/atau pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; dan
 - b. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan Anggota.

that all activities of the Company are in accordance with the applicable laws and regulations, Articles of Association and decisions of the GMS;

3. Implement GCG consistently;
4. Comply with the order of the Company's internal regulations;
5. Act as the leader in managing the Company;
6. Maintain and manage the Company's assets;
7. Take full responsibility for carrying out their duties for the interests of the Company in fulfilling its purposes and achieving objectives;
8. Be receptive to inputs from the Board of Commissioners;
9. Carry out all actions, both regarding the management and ownership of the Company's assets and binding the Company to other parties and/or other parties with the Company, under certain restrictions;
10. Must make and keep Special Register containing information on share ownership of each Director and member of the Board of Commissioners and their families in the Company and/or other companies as well as the date the shares were obtained;
11. Personally responsible for the loss of the Company should the person concerned is guilty or is negligent in carrying out his duties;
12. Maintain and keep the List of Shareholders, Special Register, Minutes of GMS, Minutes of Board of Commissioners Meetings and Directors' Meetings, Annual Reports and Company financial documents and other Company documents at the Company's domicile;
13. Provide periodic reports in a manner and time in accordance with applicable regulations, as well as other reports, whenever requested by the Board of Commissioners and/or Shareholders;
14. Provide explanation on everything requested by members of the Board of Commissioners and Shareholders;
15. Members of the Board of Directors must disclose:
 - a. Ownership of shares that reaches 5% (five percent) or more in the Company and/or other companies domiciled at home and abroad; and
 - b. Financial relationships and family relationships with Members.

Hak dan Kewajiban Direksi

Hak Direksi

1. Memperoleh cuti sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Menerima gaji berikut fasilitas dan tunjangan lainnya termasuk santunan purna jabatan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS atau Dewan Komisaris berdasarkan pelimpahan wewenang dari RUPS;
3. Apabila Perseroan mencapai tingkat keuntungan, maka Direksi dapat menerima insentif sebagai imbalan atas prestasi kerjanya yang besarannya ditetapkan oleh RUPS;
4. Mendapatkan sarana dan fasilitas Perseroan serta santunan purna jabatan sesuai dengan hasil penetapan RUPS yang penyediaannya disesuaikan dengan kondisi keuangan Perseroan, asas kepatutan dan kewajaran serta tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penjabaran tentang sarana dan fasilitas Perseroan dituangkan lebih lanjut dalam Keputusan RUPS;
5. Memperoleh salinan risalah Rapat Direksi, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam Rapat Direksi tersebut.

Kewenangan Direksi

1. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan;
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan.
3. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan.
4. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS.
5. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Rights and Obligations of the Board of Directors

Right of the Board of Directors

1. Leave in accordance with the applicable provisions;
2. Receive salaries and other facilities and benefits including post-service compensation, while the amount of which is determined by the GMS or the Board of Commissioners based on delegation of authority from the GMS;
3. In the event the Company is able to generate profit, then the Board of Directors is entitled to receive incentives in return for their achievements, with the amount set by the General Meeting of Shareholders;
4. Obtain facilities as well as full-time compensation from the company, in accordance with the resolution of the GMS, with the provision of which is adjusted to the financial condition of the Company, propriety and fairness and should not be in conflict with the prevailing laws and regulations. The description of the Company's facilities is further elaborated in the GMS Decision;
5. Obtain copy of the minutes of the Board of Directors' Meeting, whether the person is present or not present at the Board of Directors Meeting.

Authority of the Board of Directors

1. Setting the management policy of the Company;
2. Delegating the authority of the Board of Directors to one or several members of the Board of Directors to make decisions on behalf of the Board of Directors or represent the Company inside and outside the court.
3. Delegating the authority of the Board of Directors to one or several employees of the Company, individually or jointly, or to other person/s, to represent the Company inside and outside the court.
4. Determining the provisions regarding the Company's employment including stipulation of salaries, pensions or post-employment benefits and other benefits for employees of the Company, based on the applicable laws and regulations, under the condition that in the event the stipulation of salaries, pensions or post-employment benefits and other income for workers exceeding the provision stipulated by legislation, prior approval must be obtained from the GMS.
5. To appoint and dismiss the Company's employees based on the Company's personnel regulations and applicable laws and regulations;

6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan; dan
7. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
6. To appoint and dismiss the Corporate Secretary; and
7. Conducting all actions and other actions regarding the management and ownership of the Company's assets, binding the Company with other parties and/or other parties with the Company, and representing the company inside and outside the court regarding all matters and events, with restrictions as stipulated in legislation, Articles of Association and/or GMS Decisions.

Kewajiban Direksi

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
2. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS;
3. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
4. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi;
5. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan;
6. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;
7. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan serta laporan mengenai hak-hak Perseroan yang tidak tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai akibat penghapus buku piutang;
8. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;
9. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM;

Obligation of the Board of Directors

1. Strive to ensure the implementation of the business and activities of the Company, in accordance with the purpose and objectives and business activities;
2. Preparing the Company's Long-Term Plan, Corporate Work Plan and Budget, along with the amendments to be submitted to the Board of Commissioners and Shareholders in timely manner to obtain the approval of the GMS;
3. Providing explanation to the GMS regarding the Company's Long Term Plan and the Company's Work Plan and Budget;
4. Preparing List of Shareholders, Special Register, Minutes of GMS, and Minutes of Directors' Meetings;
5. Preparing Annual Reports as manifestation of accountability for managing the Company, as well as the Company's financial documents as referred to in the Law concerning Company Documents;
6. Preparing Financial Statements based on Financial Accounting Standards to be submitted to Public Accountant for auditing;
7. Submitting the Annual Report including the Financial Statement to the GMS to be approved and ratified, as well as the report on the rights of the Company which is not recorded in the book, among others, as a result of the write-off of accounts receivable;
8. Providing explanation to the Annual General Meeting of Shareholders;
9. Submitting Balance Sheets and Income Statements which have been approved by the GMS to the Minister of Law and Human Rights in accordance with the provisions of laws and regulations;
10. Submitting reports of changes in the composition of Shareholders, the Board of Directors and the Board of Commissioners to the Minister of Law and Human Rights;

11. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan;
12. Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan serta dokumen perseroan lainnya;
13. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;
14. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan atau Pemegang Saham;
15. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
16. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham;
17. Menyusun dan menetapkan *blue print* organisasi Perseroan; dan
18. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Direksi yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris

1. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek;
2. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer/BOT*), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer/BOwT*), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate/BTO*) dan kerja sama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh RUPS;
3. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan dilaporkan kepada Dewan Komisaris;

11. Keeping List of Shareholders, Special Register, Minutes of GMS, Minutes of Board of Commissioners' Meetings and Minutes of Board of Directors Meetings, Annual Reports and Company financial documents;
12. Keeping at the Company's place the list of Shareholders, Special Register, Minutes of GMS, Minutes of Board of Commissioners Meetings and Minutes of Board of Directors Meetings, Annual Reports and Company financial documents and other corporate documents;
13. Developing an accounting system that is in accordance with Financial Accounting Standards and based on the principles of internal control, especially the functions of management, recording, storage, and supervision;
14. Providing reports periodically in a manner and time in accordance with applicable regulations, as well as other reports whenever requested by the Board of Commissioners and or Shareholders;
15. Preparing the structure of organization of the Company complete with details and duties;
16. Providing explanation of everything that is asked or requested by members of the Board of Commissioners and Shareholders;
17. Preparing and determining the blue print of the Company's organization; and
18. Carrying out other obligations in accordance with the provisions stipulated in the Articles of Association and stipulated by the GMS based on laws and regulations.

Board of Directors Authority that must obtain written approval from the Board of Commissioners:

1. Pledging fixed assets for short-term loan;
2. Conducting cooperation with other business entities or parties in the form of licensing, management contracts, leasing assets, Build Operate Transfer (BOT), Build Own Transfer (BOwT), Build Transfer Operate (BTO) and other cooperation with certain value or period determined by the GMS;
3. Accepting or providing medium/long term loans, except loans (payables or accounts receivable) arising from business transactions, and loans provided to subsidiaries as long as such loans were reported to the Board of Commissioners;

- 4. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;
- 5. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun; dan
- 6. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.
- 4. Writing off non-performing receivables and inventories from bookkeeping;
- 5. Disposing movable fixed assets according to the economic age generally applicable in the industry, namely up to 5 (five) years; and
- 6. Determining the organizational structure 1 (one) level below the Board of Directors.

Kewenangan yang hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan dari RUPS:

- 1. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang;
- 2. Melakukan penyertaan modal pada perseroan lain;
- 3. Mendirikan anak perusahaan dan atau perusahaan patungan;
- 4. Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
- 5. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan atau perusahaan patungan;
- 6. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*), kecuali pemberian penjaminan yang merupakan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan;
- 7. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer/BOT*), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer/BOWT*), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate/BTO*) dan kerja sama lainnya dengan nilai atau jangka waktu melebihi penetapan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf b Pasal mengenai kewajiban Direksi dalam Anggaran Dasar Perusahaan;
- 8. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan;
- 9. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perseroan dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya lebih dari 5 (lima) tahun;
- 10. Menetapkan *blue print* organisasi Perseroan;
- 11. Menetapkan dan merubah logo Perseroan;
- 12. Melakukan tindakan-tindakan lain dan tindakan yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan
- 13. Membentuk yayasan, organisasi dan atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan yang dapat berdampak bagi Perseroan;

The authority that only the Board of Directors has upon receiving written response from the Board of Commissioners and approval from the GMS:

- 1. Pledging fixed assets for medium/long term loans;
- 2. Placing equity participation in other company;
- 3. Establishing subsidiary and or joint venture company;
- 4. Releasing capital participation in subsidiaries and/or joint ventures;
- 5. Performing merger, consolidation, acquisition, separation and dissolution of subsidiaries and or joint ventures;
- 6. Binding the Company as guarantor (*borg* or *avalist*), except that such provision of guarantees are the implementation of the Company's business activities;
- 7. Entering into collaboration agreement with other business entities or other parties in the form of license, management contracts, leasing assets, Build Operate Transfer (BOT), Build Own Transfer (BOWT), Build Transfer Operate (BTO) and other kind of collaboration with a value or period exceeding the limit set by the GMS as referred to in paragraph 8 letter b Article concerning the obligations of the Board of Directors in the Articles of Association of the Company;
- 8. No to collect non-performing payables that have been written off;
- 9. Disposing and writing off the Company's fixed assets which has a generally prevailing economical age in the industry of more than 5 (five) years;
- 10. Setting the blue print of the organization of the Company;
- 11. Determining and changing the Company logo;
- 12. Carrying out other actions not specified in the Company's Work Plan and Budget
- 13. Establishing a foundation, organization and/or association that is directly or indirectly related to the Company which can have an impact on the Company;

14. Pembebanan biaya Perseroan yang bersifat tetap dan rutin untuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan; dan
15. Pengusulan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan atau bernilai strategis yang ditetapkan RUPS.

14. Charging fixed and routine expenses to the Company for funding the foundations, organizations and/or associations that are directly or indirectly related to the Company; and
15. Proposing representatives of the Company to become candidates for members of the Board of Directors and Board of Commissioners in joint ventures and/or subsidiaries which has significant contributions to the Company and/or having strategic value as determined by the GMS.

Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab Masing-masing Direksi

Pembagian tugas masing-masing Direksi dilakukan guna menjamin pelaksanaan dan kesinambungan pencapaian sasaran Perseroan pada masa mendatang secara lebih sistematis efisien dan efektif, sebagai berikut:

Scope of Duties and Responsibilities of Each Member of the Board of Directors

Aimed to ensure a more systematic, efficient and effective efforts on achieving the Company's target in the future, the distribution of duties between members of the Board of Directors are as follows:

Tabel Pembagian Tugas Direksi 2017

Table of the Division of Duties of the Board of Directors in 2017

No	Nama Name	Penyelenggara Position	Uraian Tugas Job Description
1	Pribadi	Direktur Utama President Director	<p>Memiliki tugas dan wewenang untuk memimpin dan mengkoordinasikan semua kegiatan Direksi dalam melakukan pengelolaan dan pengurusan Perseroan, membawahi Satuan Pengawasan Intern (SPI), Sekretaris Perusahaan, Manajemen Risiko, Kepatuhan & GCG.</p> <p>In charge of and is authorized to lead and coordinate all activities of the Board of Directors in managing the Company, in charge of the Internal Audit Unit (SPI), Corporate Secretary, Risk Management, Compliance & GCG.</p>
2	M. Effendi Nasution/ Subagio Istiarno	Direktur Keuangan Director of Finance	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pengelolaan di bidang keuangan dan akuntansi, pengusahaan modal, perencanaan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan Perseroan; - Melakukan koordinasi dengan Unit Bisnis terkait fungsinya; - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama; - Pengelolaan sumber daya manusia. <ul style="list-style-type: none"> - Performing financial and accounting management, capital raising, planning and development of the Company's sources of income and expenditure, and managing assets; - Coordinating with the Business Units, in accordance with its functions; - Performing other tasks given by the President Director; - Managing human resources.

No	Nama Name	Penyelenggara Position	Uraian Tugas Job Description
3	Meivyta B. Husman/ Supardi Najamuddin	Direktur Operasional Director of Operation	<ul style="list-style-type: none"> · Melaksanakan pengelolaan di bidang pemasaran sampai dengan pengelolaan produksi serta koordinasi dan pembinaan/penilaian kinerja Divisi yang ada dibawahnya; · Melakukan kajian pengembangan bisnis · Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur Utama. <ul style="list-style-type: none"> · Managing marketing, production and coordination and training/ evaluating the performance of the divisions under the Director of Operation, · Conducting studies on business development, · Performing other duties given by the President Director.

Masa Jabatan Direksi

Masa jabatan Direksi Perseroan sesuai Anggaran Dasar Perusahaan adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal masa jabatan anggota Direksi berakhir dan RUPS belum dapat menetapkan penggantinya, maka tugas-tugas anggota Direksi yang lowong tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong. Namun demikian RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya, demi kepentingan dan tujuan Perseroan. Masa jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

1. Meninggal dunia;
2. Masa jabatannya berakhir;
3. Tidak lagi memenuhi persyaratan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; dan
5. Mengundurkan diri.

Independensi (Kemandirian) Direksi

Direksi Perseroan wajib menjaga independensinya sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya secara optimal. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Direksi tidak boleh terpengaruh tekanan dari pihak manapun dan wajib bertindak seoptimal mungkin demi kepentingan Perseroan. Untuk menjaga independensi, Perseroan menetapkan ketentuan mengenai independensi Direksi sebagai berikut:

1. Selain Direksi, pihak lain manapun tidak diperkenankan melakukan atau campur tangan dalam kepengurusan Perseroan;

The Terms of Office of the Board of Directors

Based on the Company's Articles of Association, the term of office of the Board of Directors is 5 (five) years and can be reappointed for 1 (one) term of office. In the event that the term of office of members of the Board of Directors ends and the GMS has yet determined a replacement, then the duties of the vacant members of the Board of Directors should be carried out in accordance with the provisions for filling in vacant members of the Board of Directors. However, the GMS has the rights to dismiss members of the Board of Directors at any time by stating the reasons, for the interests and objectives of the Company. The term of office of members of the Board of Directors ends if the said person:

1. Departed;
2. The term of office ended;
3. No longer meet the requirements of applicable law;
4. Dismissed based on GMS decision; and
5. Resigned.

Independence of the Board of Directors

Members of the Board of Directors shall maintain their independence in order to be able to carry out the tasks entrusted to them optimally. In carrying out their duties, the Board of Directors shall not be affected by any pressure from any party and shall act optimally for the benefit of the Company. To maintain the independence of the Board, the Company establishes provisions regarding the independence of the Board of Directors as follows:

1. Besides member of the Board of Directors, no other party is permitted to conduct or interfere in the management of the Company;



2. Direksi harus dapat mengambil keputusan secara obyektif, tanpa benturan kepentingan dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun;
3. Direktur dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu independensinya dalam mengurus Perseroan; dan
4. Menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen Direksi dalam melaksanakan kegiatan Perseroan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

2. The Board of Directors must be able to make decisions objectively, without any conflict of interest and free from any pressure from any party;
3. The Board of Directors is prohibited from carrying out activities that may affect his/her ability to act independently in managing the Company.
4. Sign the Integrity Pact as a form of commitment of the Board of Directors in carrying out the Company's activities which can lead to conflicts of interest.

Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga

Anggota Direksi

Anggota Direksi beserta keluarganya tidak memiliki saham pada korporasi yang terafiliasi dengan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Direksi lainnya atau dengan anggota Dewan Komisaris serta tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda. Dengan demikian, Direksi dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, mandiri serta tidak memiliki benturan kepentingan antara kepentingan pribadi, keluarga dan saudara, jabatan lain atau golongan dengan kepentingan Perusahaan.

Rapat Direksi

Rapat Direksi wajib diselenggarakan secara berkala, atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau atas permintaan dari satu orang atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Sepanjang tahun 2017, Direksi telah menyelenggarakan Rapat sebanyak 13 (tiga belas) kali. Adapun tingkat kehadiran masing-masing anggota Direksi dan agenda rapat adalah sebagai berikut:

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Direksi 2017

No.	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance	Percentase Percentage
1	Pribadi	Direktur Utama President Director	13	100%
2	M. Effendi Nasution/Subagio Istiarno	Direktur Keuangan Director of Finance	10	77%
3	Meivyta B. Husman/Supardi Najamuddin	Direktur Operasional Director of Operation	13	100%

Financial and Family Relationship

Members of the Board of Directors

Members of the Board of Directors and their families have no shares in companies affiliated with PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. All members of the Board of Directors have no family relationship up to third degree, include vertical as well as horizontal relationships, or relationship by marriage, with other members of the Board of Directors or with members of the Board of Commissioners. Therefore, the Board of Directors can carry out their duties and responsibilities independently without any conflict of interest between the interest of personal, family and relatives, of other positions or groups with the interests of the Company.

Board of Directors Meetings

Board of Directors meetings shall be held periodically, or upon written request from one or more members of the Board of Commissioners, or upon request from one or more shareholders with voting rights. Throughout 2017, the Board of Directors convened 13 (thirteen) meetings. The attendance level of each member of the Board of Directors and meeting agenda are as follows:

Table of Attendance of the Board of Directors in 2017



Tabel Agenda Rapat Direksi 2017

Table of BOD Meeting Agenda in 2017

No.	Waktu Rapat <i>Date</i>	Agenda <i>Agenda</i>	Realisasi <i>Realization</i>
1	10 Januari 2017 10 January 2017	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pindah Lokasi Kantor Pusat 2. Rencana Kerja Tahun 2017 3. Strategi Bisnis Model 2017 4. RKAP Tahun 2017 <ul style="list-style-type: none"> 1. Moved the Head Office to new premises 2. The 2017 Work Plan 3. The 2017 Business Model Strategy 4. The 2017 RKAP 	Terealisasi Realized
2	5 Mei 2017 5 May 2017	<ul style="list-style-type: none"> 1. Persiapan RUPS 2. Lemburan Pegawai 3. Dana Talangan 4. KPS di Kalimantan 5. KPS Mataram 6. Mobil Operasional untuk Kepala Divisi 7. Mutasi & Rotasi <ul style="list-style-type: none"> 1. Preparation of GMS 2. Overtime of the employee 3. Bridging Fund 4. KPS in Kalimantan 5. KPS in Mataram 6. Operational Car for Head of Division 7. Mutation & Rotation 	Terealisasi Realized
3	5 September 2017 5 September 2017	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tim Task Force Subrogasi 2. Ta'widh dan PKS <ul style="list-style-type: none"> 1. Dubrogation Task Force 2. Ta'widh and PKS 	Terealisasi Realized
4	8 September 2017 8 September 2017	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Hasil Audit OJK 2017 1. Discussion of FSA Audit Results in 2017 	Terealisasi Realized
5	15 September 2017 15 September 2017	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Final Tindak lanjut Hasil Pembahasan Sementara OJK 1. Final Discussion of Follow-Up Actions on FSA Temporary Discussion Results 	Terealisasi Realized
6	24 Oktober 2017 24 October 2017	<ul style="list-style-type: none"> 1. RKAP 2018 2. Distribution Channel 3. Sekretaris Direksi 4. Tindaklanjut audit KAP dan OJK 5. Lain-lain <ul style="list-style-type: none"> 1. The 2018 RKAP 2. Distribution Channel 3. Secretary of the Board of Directors 4. Follow-up audit KAP and FSA 5. Others 	Terealisasi Realized
7	31 Oktober 2017 31 October 2017	<ul style="list-style-type: none"> 1. Format Laporan Keuangan 2. Jadwal Rutin Pelaksanaan Rapat Direksi 3. Komite Personalia 4. Pengisian Posisi dan KPPS yang Masih Kosong 5. Realisasi Biaya Akuisisi dan Ta'widh 6. Insentif Bulanan Kantor Pusat 7. Perlakuan Fasilitas Kendaraan ex-Direksi 8. Fasilitas Tambahan Direksi 	Terealisasi Realized

No.	Waktu Rapat Date	Agenda Agenda	Realisasi Realization
		<ul style="list-style-type: none"> 1. Format of Financial Statements 2. Routine Schedule of Directors' Meetings 3. Personnel Committee 4. filling the vacant position and KPPS 5. Realization of the Cost of Acquisition and Ta'widh 6. Monthly Incentives for Headquarters 7. Treatment of Vehicle Facilities for ex-Directors 8. Additional Directors' Facilities 	
8	14 November 2017 14 November 2017	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ekstensifikasi dan Intensifikasi Perjanjian Kerjasama dengan Mitra Bisnis 2. Pembayaran <i>Fee</i> Agen atau Biaya Akuisisi 3. Pembayaran Penyesuaian Gaji Tahun 2017 Hasil <i>Performance Appraisal</i> Tahun 2016 4. Finalisasi RKAP 2018 5. Lain-lain <ul style="list-style-type: none"> 1. Extensification and Intensification of Cooperation Agreements with Business Partners 2. Payment of Fees for Agents or Acquisition Costs 3. The 2017 salary adjustments based on the 2016 Performance Appraisal 4. Finalization of the 2018 RKAP 5. Others 	Terealisasi Realized
9	28 November 2017 28 November 2017	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tindak lanjut hasil rapat dengan Direktur Pembina Askrindo Syariah 2. Tindak lanjut audit OJK 3. Tindak lanjut Subrogasi 4. Persiapan acara tanggal 9 Desember 2017 5. Progres <i>event</i> terkait Milad 6. Pembentukan tim Pengadaan IT 7. Komite akseptasi dan pengembangan produk 8. Lain-lain <ul style="list-style-type: none"> 1. Follow-up on the results of the meeting with the Director of Askindo Syariah 2. Follow-up of FSA audits 3. Subrogation follow up 4. Preparation for the event on December 9, 2017 5. Progress of event related to Anniversary 6. Establishment of IT Procurement team 7. Acceptance and product development committee 8. Others 	Terealisasi Realized
10	5 Desember 2017 5 December 2017	<ul style="list-style-type: none"> 1. <i>Salary Grading</i> 2. <i>Workshop</i> subrogasi dengan BSM dan BRIS 3. Pelatihan analisis untuk pembiayaan sindikasi dan infrastruktur 4. Rekrutmen SDM untuk <i>Management Trainee (fresh graduate S1)</i> Tahun 2018 5. Persiapan <i>field audit</i> KAP Tahun 2017 6. Desentralisasi proses persetujuan klaim di KC/KPS sampai dengan limit tertentu 7. Desentralisasi administrasi dan <i>monitoring</i> piutang ujroh di KC/KPS 8. Tata kelola administrasi aset 9. Pembuatan atau penetapan rekening khusus dan penyaluran zakat pegawai 10. Teknis acara milad 9 Desember 2017 11. Surat tanggapan audit OJK 12. Lain-lain 	Terealisasi Realized

No.	Waktu Rapat <i>Date</i>	Agenda <i>Agenda</i>	Realisasi <i>Realization</i>
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Salary Grading 2. Workshop on Subrogation with BSM and BRIS 3. Training on analysis for syndicated and infrastructure financing 4. Recruitment for Management Trainees (fresh graduates) in 2018 5. Preparation for KAP field audits in 2017 6. Decentralization of the claim approval process in KC/KPS up to a certain limit 7. Decentralization of administration and monitoring of receivables in KC/KPS 8. Governance of asset administration 9. Establishment or determination of special accounts and distribution of employee zakat 10. Technical for anniversary event on 9 December 2017 11. Letter of response to the FSA audit 12. Others 	
11	12 Desember 2017 12 December 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. CSR: Perlengkapan alat media mobil ambulance RS seharga Rp50.000.000. 2. Santunan melahirkan pegawai 3. Alokasi dana CSR disebutkan dalam RUPS 4. Laporan Keuangan perusahaan bulan November 2017 5. Pelaksanaan operasional KPS/KPPS tambahan serta mutasi atau rotasi pegawai terkait 6. Compliance dan tata kelola dokumen penting perusahaan 7. Aturan penggunaan kendaraan atau supir untuk mantan direktur atau pegawai 8. Progress KPI pegawai 2017 9. Persiapan KPI pegawai 2017 10. Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> 1. CSR: equipment for ambulance, worth Rp50,000,000. 2. Employee maternity allowance 3. Allocation of CSR funds to be mentioned in the GMS 4. Company financial statements for November 2017 5. Implementation of additional KPS KPPS and relevant employee mutations or rotations 6. Compliance and governance of important company documents 7. Rules for the use of vehicles or drivers for former directors or employees 8. Progress of the 2017 employee KPI 9. Preparation for the 2017 employee KPI 10. Others 	Terealisasi Realized
12	19 Desember 2017 19 December 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Follow up rapat dengan Direktur Pembina Bapak Firman Berahima 2. Tindaklanjut konsultan SDM 3. SK Mutasi pegawai KPS/KPPS/KP 4. Otorisasi pengeluaran uang Direksi/Kepala Divisi 5. Fasilitas Direksi/Kepala Divisi (NATURA) 6. Pemindahan rekening bank untuk penggajian 7. Pembukuan zakat pegawai 8. Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> 1. Follow up meeting with the Director, Mr. Firman Berahima 2. Follow up on HR consultants 3. Decree of employees mutation of KPS/KPPS/KP 4. Authorization for the expenditure of the Board of Directors/Heads of Division 5. Facilities for BOD/Heads of Division (NATURA) 6. Transfer of bank accounts for payroll 7. Bookkeeping of employee zakat 8. Others 	Terealisasi Realized

No.	Waktu Rapat Date	Agenda Agenda	Realisasi Realization
13	27 Desember 2017 27 December 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya komunikasi dan operasional lainnya Direksi 2. Komite investasi, aksesi mengenai limit 3. <i>Follow up</i> SK Mutasi, Promosi dan Rotasi pegawai 4. Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> 1. Other communication and operational expenses of the Board of Directors 2. Investment committee, acceptances on limits 3. Follow-up decree for employee mutation, promotion and rotation follow-up 4. Others 	Terealisasi Realized

Pelatihan Direksi

Selama 2017, anggota Direksi Perseroan telah mengikuti beberapa pelatihan dalam menunjang tugas dan tanggung jawabnya mengelola Perseroan. Pelatihan yang diikuti sebagai berikut:

Board of Directors Training

During 2017, members of the Company's Board of Directors participated in several trainings to support their duties and responsibilities in managing the Company. The training is followed as follows:

Tabel Pelatihan Direksi 2017

Table of Training for the Board of Directors 2017

No.	Nama Kegiatan Name of Activity	Penyelenggara Organizer	Lokasi Location	Biaya (Rp) Cost (Rp)
Pribadi – Direktur Utama/President Director				
1	Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko V National Conference of Risk Management Professionals V	LSPMR	Jogjakarta	5,000,000
2	Inhouse Training ISO 27001 (Lead Implementer) Inhouse Training ISO 27001 (Lead Implementer)	Proxis Consulting	Jakarta	36,661,600
3	Seminar Roundtable Discussion "Mengelola Risiko Finansial dalam Ekspansi Investasi Infrastruktur Roundtable Discussion on " Managing Financial Risk in Infrastructure Investment Expansion"	CRMS	Jakarta	free
4	Inhouse Training Penyusunan Struktur dan Skala Upah Inhouse Training on Preparing of Structure and Scale of Salary	Proxis Consulting	Jakarta	52,446,360
Meivita B Husman - Direktur/Director				
1	Re-shaping Risk Management Strategy with Technology Re-shaping Risk Management Strategy with Technology		Jakarta	2,500,000
2	Seminar Roundtable Discussion "Mengelola Risiko Finansial dalam Ekspansi Investasi Infrastruktur Roundtable Discussion on " Managing Financial Risk in Infrastructure Investment Expansion"	CRMS	Jakarta	free
3	Inhouse Training Penyusunan Struktur dan Skala Upah Inhouse Training on Preparing of Structure and Scale of Salary	Proxis Consulting	Jakarta	-
Subagio Istiarno - Direktur/Director				
1	Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko V National Conference of Risk Management Professionals V	LSPMR	Jogjakarta	5,000,000
2	Forum Human Capital Indonesia Summit 2017 Forum Human Capital Indonesia Summit 2017	-	Jakarta	3,500,000
Supardi Najamuddin - Direktur/Director				
1	Certified Risk Governance Professional Certified Risk Governance Professional	LSPMR	Jakarta	10,000,000
Jumlah/Amount				115,107,960

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS, DAN DIREKSI SERTA DPS

Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan basis formula yang ditetapkan oleh RUPS serta telah melalui kajian oleh Dewan Komisaris melalui pendalaman yang dilakukan oleh Pemegang Saham.

Prosedur Remunerasi Direksi

Pada tahun 2017, prosedur dan penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 yang mengatur besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Bentuk Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas, serta komponen lain yang termasuk di dalam komponen penghasilan mengacu pada ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-02/MBU/06/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN dan juga tertuang dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

Penetapan remunerasi Direksi terdiri dari beberapa komponen seperti:

1. Honorarium
2. Tunjangan
3. Fasilitas
4. Tantiem/incentif kinerja.

Indikator Kinerja

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada indikator-indikator sebagai berikut:

1. Remunerasi diberikan dalam hal Perseroan memperoleh keuntungan dalam tahun buku yang bersangkutan;
2. Remunerasi diberikan dengan mengacu pada perkembangan bisnis penjaminan;
3. Remunerasi diberikan melalui hasil pengukuran kinerja Dewan Komisaris dan Direksi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;
4. Kinerja keuangan dan pencapaian *Key Performance Indicator(KPI)* Perseroan.

REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS, THE BOARD OF DIRECTORS AND SSB

Remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors is carried out on the basis of the formula stipulated by the GMS and reviewed by the Board of Commissioners through indepth review by the Shareholders.

Board of Directors' Remuneration Procedure

In 2017, the procedures for the determination of the remuneration of the Board of Commissioners and Directors are carried out based on the Article 96 paragraph (1) of the Limited Liability Company Law No. 40 of 2007 which regulates the amount of salaries and allowances of the Board of Directors determined based on the resolution of the GMS. Honorarium, Allowances and Facilities, as well as other components included in the income component, refer to the provisions set forth in the State Minister of State Regulation Number: Per-02/MBU/06/2016 dated June 20, 2016 concerning Amendment to Regulation of the Minister of BUMN State Number: Per-04/MBU/2014 dated March 10, 2014 concerning Guidelines for Determining the Income of Directors, Board of Commissioners, and BUMN Supervisory Board and also contained in State Minister of BUMN Regulation Number: Per-04/MBU/2014 dated March 10, 2014 concerning Guidelines for Determining Directors' Income, Board of Commissioners, and BUMN Supervisory Board.

Determination of remuneration for the Board of Directors consists of several components such as:

1. Honorarium
2. Allowances
3. Facilities
4. Tantiem/performance incentives.

Performance Indicators

The remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors refers to the following indicators:

1. Remuneration is given in the event that the Company gains profits in the relevant fiscal year;
2. Remuneration is given by referring to the development of the business;
3. Remuneration is given based on the performance of the Board of Commissioners and Directors, in accordance with their duties and responsibilities;
4. Financial performance and achievement of the Company's Key Performance Indicator (KPI).

5. Prestasi kerja individu;
6. Kewajaran dengan peer Perseroan lainnya;
7. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan;
8. Besaran remunerasi yang diterima adalah:
 - a. Direktur Utama 100%.
 - b. Anggota Direksi 90% dari Direktur Utama
 - c. Komisaris Utama 45% dari remunerasi Direktur Utama.
 - d. Anggota Dewan Komisaris 90% dari remunerasi Komisaris Utama.

Struktur Remunerasi Yang Menunjukkan Komponen Remunerasi dan Jumlah Nominal Per Komponen Untuk Setiap Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi

Pada 2017, remunerasi yang diberikan kepada Direksi, Komisaris dan DPS sebagai berikut:

Tabel struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Tabel Remunerasi Direksi 2017

No.	Jenis Type	Komponen Component	Jumlah Amount
1	Gaji Salary	Direktur Utama President Director	Rp57.225.000 per bulan Rp57.225.000 per month
		Direktur Director	Rp51.502.500 per bulan Rp51.502.500 per month
2	Tunjangan Allowance	1. Hari Raya Keagamaan Religious holiday	1 (satu) kali Gaji per tahun 1 (one) month salary per year
		2. Perumahan Housing allowance	40% kali Gaji Per bulan 40% salary per Month
		3. Purna Jabatan Post-service allowance	25% dari gaji dalam satu tahun 25% of salary in one year
3	Fasilitas Facilities	1. Kendaraan Dinas Official vehicle	Tersedia Available
		2. Fasilitas Kesehatan Medical allowance Rawat Jalan Outpatient Rawat Inap Inpatient Medical Check up Medical Check up	Tersedia Available
		3. Bantuan Hukum Legal Assistance	Tersedia Available
4	Tantiem (Insentif Kinerja) Tantiem (Performance Incentives)		Sesuai realisasi kinerja Based on performance

5. Individual work performance;
6. Fairness with peers of the Company;
7. Consideration of the Company's long-term goals and strategies;
8. The amount of remuneration received is:
 - a. President Director 100%.
 - b. Member of the Board of Directors 90% of the President Director
 - c. President Commissioner 45% of the President Director's remuneration.
 - d. Members of the Board of Commissioners 90% of the remuneration of the President Commissioner.

Remuneration Structure that Shows Remuneration Components and Nominal Amount Per Component For Each Member of the Board of Commissioners and the Board of Directors

In 2017, the remuneration for the Board of Directors, the Board of Commissioners and SSB are as follows:

Table of structure of the remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Table of Board of Directors Remuneration in 2017

Tabel Remunerasi Dewan Komisaris 2017

Table of BOC Remuneration in 2017

No.	Jenis Type	Komponen Component	Jumlah Amount
1	Honorarium (gaji) Honorarium (Salary)	Komisaris Utama President Commissioner	Rp25.751.250 per bulan Rp25.751.250 per month
		Komisaris Commissioner	Rp23.176.125 per bulan Rp23.176.125 per month
2	Tunjangan Allowance	1. Hari Raya Keagamaan Religious Holiday 2. Transportasi: Transportation 3. Santunan purna jabatan Post-service allowances	1 (satu) kali Gaji per tahun 1 (one) salary per year 20% dari gaji dalam satu bulan 20% of salary in one month 25% dari gaji dalam satu tahun 25% of salary in one year
3	Fasilitas Facilities	1. Fasilitas Kesehatan Medical allowance Rawat Jalan Outpatient Rawat Inap Inpatient Medical Check up Medical Check up 2. Bantuan Hukum Legal Assistance	Tersedia Available
4	Tantiem Tantiem		Sesuai realisasi kinerja Based on performance

REMUNERASI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Remunerasi Dewan Pengawas Syariah

Tabel Remunerasi Dewan Pengawas Syariah (DPS)
2017

SHARIA SUPERVISORY BOARD REMUNERATION

Sharia Supervisory Board Remuneration

Table of Sharia Supervisory Board (DPS) Remuneration
in 2017

No.	Jenis Type	Komponen Component	Jumlah Amount
1	Honorarium Honorarium	Ketua DPS Head of SSB Anggota DPS Member of SSB	Rp7.500.000 per bulan Rp7.500.000 per month Rp7.500.000 per bulan Rp7.500.000 per month
2	Tunjangan Allowance	1. Hari Raya Keagamaan Religious Holiday 2. Komunikasi Communication 3. Santunan purna jabatan Post-service allowances	Tidak tersedia Not Available Tidak tersedia Not Available Tidak tersedia Not Available

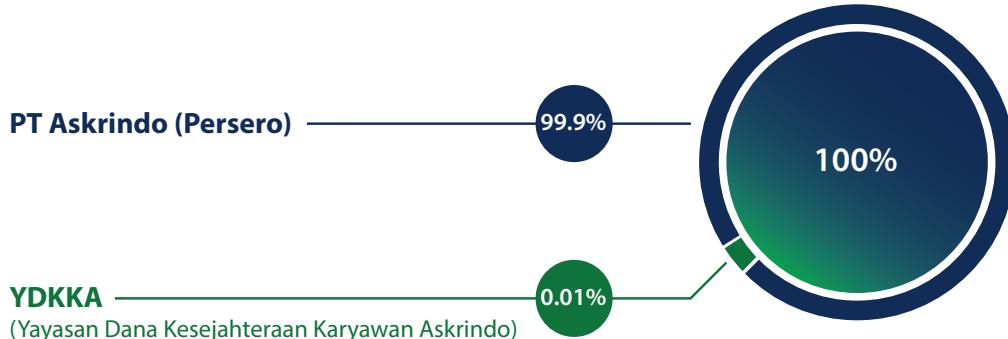
No.	Jenis Type	Komponen Component	Jumlah Amount
3	Fasilitas Facilities	1. Fasilitas Kesehatan Medical allowance Rawat Jalan Outpatient Rawat Inap Inpatient Medical Check up Medical Check up	Tidak tersedia Not Available
		2. Bantuan Hukum Legal Assistance	Tidak tersedia Not Available

INFORMASI MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

Pemegang saham utama dan pengendali PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah per 31 Desember 2015 adalah PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia dengan kepemilikan saham sebesar 99,99% atau mewakili 249.999 lembar saham.

INFORMATION ABOUT PRINCIPAL AND CONTROLLING SHAREHOLDERS

The principal and controlling shareholders of PT Askrindo Syariah Financing Guarantee as of 31 December 2015 is PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia, owning 99.99% or representing 249,999 shares.



HUBUNGAN AFILIASI

Anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya tidak memiliki saham pribadi pada korporasi yang terafiliasi dengan PT Askrindo Syariah. Selain itu antar anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda. Dengan demikian, Dewan Komisaris dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, mandiri

AFFILIATE RELATIONSHIP

Members of the Board of Commissioners, as well as their families, do not have shares at the affiliated companies of PT Askrindo Syariah. In addition, members of the Board of Commissioners have no family relation with fellow members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, up to third degree, either vertically or horizontally, or relation by marriage (in-law). And thus, the Board of Commissioners can perform their duties and responsibilities independently without any

serta tidak memiliki benturan kepentingan antara kepentingan pribadi, keluarga dan saudara, jabatan lain atau golongan dengan kepentingan Perseroan.

conflict between the interest of personal, family, relatives, other positions, other parties with the interest of the Company.

Tabel Pengungkapan kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor

Table of disclosures of share ownership of the Board of Commissioners and Board of Directors which reaches 5% or more of the paid-in capital

Nama Name	Jabatan Position	Kepemilikan saham Dewan Komisaris, DPS dan Direksi yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor <i>Share ownership of the Board of Commissioners, SSB, and the Board of Directors which reaches 5% or more of the paid-up capital</i>							
		X	Y	Z	Jumlah Saham Number of Shares	%	Jumlah Saham Number of Shares	%	Jumlah Saham Number of Shares
Budi Wisakseno	Komisaris Utama President Commissioner	0	0	0	0	0	0	0	0
Yulison Marpaung	Komisaris Commissioner	0	0	0	0	0	0	0	0
Daud Rasyid	Anggota DPS Member of SSB	0	0	0	0	0	0	0	0
Muhammad Zubair	Anggota DPS Member of SSB	0	0	0	0	0	0	0	0
Pribadi	Direktur Utama President Director	0	0	0	0	0	0	0	0
M. Effendi Nasution	Direktur Director	0	0	0	0	0	0	0	0
Meivyta B. Husman	Direktur Director	0	0	0	0	0	0	0	0
Subagio Istiarno	Direktur Director	0	0	0	0	0	0	0	0
Supardi Najamuddin	Direktur Director	0	0	0	0	0	0	0	0

Note: X kepemilikan saham di PT JPAS; Y kepemilikan saham di lembaga penjaminan lain; Z Lembaga lainnya selain X&Y

Note: X is share ownership at PT JPAS; Y is share ownership at other guarantee institutions; Z is other institutions besides X & Y

Tabel Hubungan Keuangan

Table of Financial Relations

Nama <i>Name</i>	Memiliki hubungan keuangan <i>Financial Relations with</i>							
	Direksi <i>Board of Directors</i>		Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>		Dewan Pengawas Syariah <i>Sharia Supervisory Board</i>		Pemegang Saham <i>Shareholders</i>	
	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>
Budi Wisakseno		x		x		x		x
Yulison Marpaung		x		x		x		x
Daud Rasyid		x		x		x		x
Muhammad Zubair		x		x		x		x
Pribadi		x		x		x		x
M. Effendi Nasution		x		x		x		x
Meivyta B Husman		x		x		x		x
Subagio Istiarno		x		x		x		x
Supardi Najamuddin		x		x		x		x

Tabel Hubungan Keluarga

Table of Family Relations

Nama <i>Name</i>	Memiliki hubungan keuangan <i>Financial Relations with</i>							
	Direksi <i>Board of Directors</i>		Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>		Dewan Pengawas Syariah <i>Sharia Supervisory Board</i>		Pemegang Saham <i>Shareholders</i>	
	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>
Budi Wisakseno		x		x		x		x
Yulison Marpaung		x		x		x		x
Daud Rasyid		x		x		x		x
Muhammad Zubair		x		x		x		x
Pribadi		x		x		x		x
M Effendi Nasution		x		x		x		x
Meivyta B Husman		x		x		x		x
Subagio Istiarno		x		x		x		x
Supardi Najamuddin		x		x		x		x

KOMITE AUDIT

Komite Audit dibentuk berdasarkan SK Dewan Komisaris PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Nomor KEP-003/DK/JPAS/2017 tentang Pengangkatan Komite Audit, dengan mempertimbangkan Surat Direktur SDM & Umum PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia Nomor 195/DIR

AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee was established based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Number KEP-003/DK/JPAS/2017 concerning the Appointment of Audit Committee, taking into account the Letter of Director of HR & General Affairs

tanggal 13 Maret 2017 Perihal Komite Audit PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.

Tugas Komite audit

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan. Rincian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja tahunan dan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan;
- b. Melakukan evaluasi atas pencapaian rencana kerja dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris;
- c. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan;
- d. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang mungkin dihadapi Perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi;
- e. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan Rapat Direksi;
- f. Memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris, yang meliputi antara lain:
 - 1) Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Auditor Internal maupun Auditor Eksternal, sehingga dapat dicegah pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar;
 - 2) Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen Perusahaan serta pelaksanaannya;
 - 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.
- g. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan;
- h. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris, antara lain:

of PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia Number 195/ DIR dated March 13, 2017 regarding the Audit Committee of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.

Duties of the Audit Committee

The Audit Committee is tasked with assisting the Board of Commissioners in monitoring and ensuring the effectiveness of internal control system and the implementation of duties of internal and external auditors through monitoring and evaluation over the audit plan and implementation in order to assess the adequacy of internal control, including the process of financial reporting. The details and responsibilities of the Audit Committee are as follow:

- a. Prepare annual work plan to be submitted to the Board of Commissioners for approval;
- b. Evaluate the progress of the work plan to be reported to the Board of Commissioners;
- c. Assist the Board of Commissioners to ensure the effectiveness of Internal Control System and the effectiveness of the implementation of the duties of external auditors and internal auditors by monitoring and evaluating the planning and implementation of audits in order to assess the adequacy of internal controls including the financial reporting process;
- d. Report to the Board of Commissioners regarding various risks that potentially be in place and the implementation of risk management performed by the Board of Directors;
- e. Investigate the suspected error in the decision of the Board of Directors Meeting;
- f. Provide independent professional opinion to the Board of Commissioners, which includes, among others:
 - 1) assessment of the activities and results of audits conducted by the Internal Auditor and External Auditor, so as to prevent implementation and reporting that does not meet the standards;
 - 2) Provide recommendations regarding the improvement of the Company's management control system and their implementation;
 - 3) Carrying out other duties given by the Board of Commissioners insofar as they are within the scope of the duties and obligations of the Board of Commissioners based on applicable legislation.
- g. Ensure satisfactory evaluation procedures for all information that will be issued by the Company;
- h. Identify matters that require attention from the Board of Commissioners, as well as the duties of the Board of Commissioners, including:

- 1) Penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya;
- 2) Penelaahan atas independensi dan obyektivitas Auditor Internal dan Eksternal;
- 3) Penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor Internal dan Eksternal untuk memastikan semua risiko penting telah dikaji;
- 4) Penelaahan atas efektivitas pengendalian intern Perusahaan;
- 5) Penelaahan atas tingkat kepatuhan Perusahaan tercatat terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan;
- 6) Pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi.

- 1) Review of financial information to be issued by the Company, including financial statements, financial projections and other information;
- 2) Reviewing the independence and objectivity of the Internal and External Auditors;
- 3) Reviewing the adequacy of examinations conducted by the Internal and External Auditors to ensure that all important risks have been assessed;
- 4) Reviewing the effectiveness of the Company's internal controls;
- 5) Reviewing the level of compliance of the Company with respect to other laws and regulations relating to the activities of the Company;
- 6) Examination of suspected errors in decisions of the Board of Directors 'meeting or deviations in the implementation of the decisions of the Board of Directors' meetings.

Masa tugas Anggota Komite Audit yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

The term of office of the Audit Committee Members who are not members of the Board of Commissioners is no more than 3 (three) years and can be extended once, namely for 2 (two) years of office, without prejudice to the rights of the Board of Commissioners to terminate them at any time.

Wewenang

- a. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Komite Audit dengan mandat dari Dewan Komisaris memiliki wewenang akses secara penuh dan tidak terbatas terhadap personil, pencatatan, dokumen, aset Perusahaan dan informasi terkait lainnya sesuai tugas yang diberikan;
- b. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Komite Audit dapat bekerja sama dengan mitra kerjanya diantaranya: Sekretaris Dewan Komisaris, unit-unit operasional Perusahaan, Divisi Manajemen Risiko dan SPI. SPI wajib memberikan laporan dan informasi yang diminta oleh Komite Audit;
- c. Memperoleh program pengembangan kapabilitas sesuai kebutuhan dan kemampuan Perusahaan;
- d. Apabila diperlukan dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris, Komite Audit dapat mempekerjakan tenaga ahli atau konsultan yang independen dari luar Perusahaan di bidang hukum maupun bidang lainnya yang dipandang perlu atas biaya Perusahaan untuk membantu Komite Audit.

Authority

- a. Based on the mandate of the Board of Commissioners, in carrying out its duties, the Audit Committee has full and unlimited access authority to personnel, records, documents, Company assets and other relevant information according to the tasks assigned;
- b. In carrying out this authority, the Audit Committee can work with its partners, including the Secretary of the Board of Commissioners, operational units, the Risk Management Division and the IAU. IAU must provide reports and information requested by the Audit Committee;
- c. Obtain capability development programs according to the needs and capabilities of the Company;
- d. If deemed necessary, upon the written approval of the Board of Commissioners, the Audit Committee may employ independent experts or consultants from outside the Company in the field of law and other fields deemed necessary at the Company's expenses to help with the Audit Committee duties.

Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris belum dilakukan pengkajian dan diharapkan dapat di bentuk pada tahun-tahun mendatang.

So far, there has been no review of the formation of other committees under the Board of Commissioners which are expected to be formed in the coming years.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

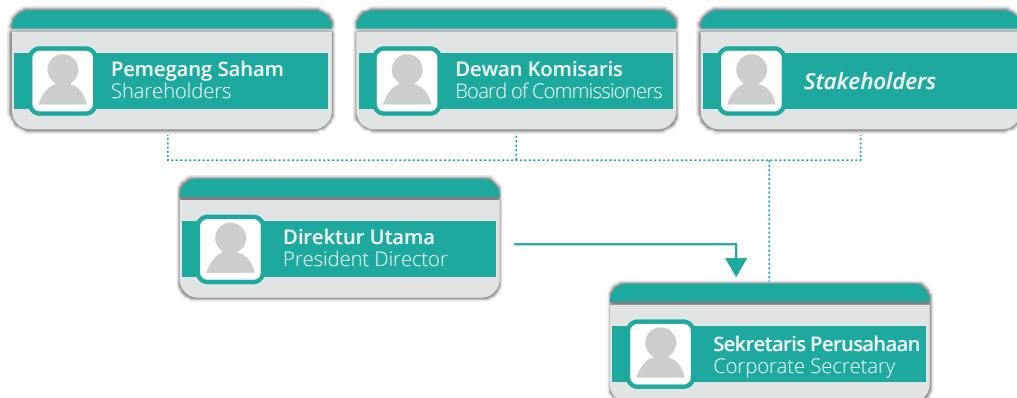
Sekretaris Perusahaan berfungsi sebagai penghubung (*liaison officer*) atau contact person antara Perseroan dengan masyarakat. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi 073/KEP-DIR/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Sekretaris Perusahaan, Sekretaris Perusahaan bertugas memberikan pelayanan atas setiap informasi yang dibutuhkan stakeholders serta kepada pihak-pihak di luar Perseroan dan atau dalam Perseroan berkaitan dengan kondisi Perseroan. Penyelenggaraan fungsi tersebut diserahkan kepada pejabat setingkat Kepala Divisi yang pengangkatan dan pemberhentian dilakukan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan

CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary functions as a liaison office, or contact person, between the Company and the community. Based on Board of Directors Decree 073/KEP-DIR/XII/2015 dated December 23, 2015 concerning Guidelines for Corporate Secretary, the Corporate Secretary is tasked with providing all information needed by stakeholders, as well as parties outside and/or within the Company relating to the condition of the Company. The function is carried out by officials at the level of Head of Division whose appointment and dismissal is carried out by the President Director with the approval of the Board of Commissioners.

Structure of Organization of Corporate Secretary



Fungsi Sekretaris Perusahaan

Fungsi Sekretaris Perusahaan adalah sebagai penghubung (*liaison officer*) atau contact person antara Perusahaan dengan masyarakat serta memberikan pelayanan atas setiap informasi yang dibutuhkan stakeholders serta kepada pihak-pihak di luar Perseroan dan atau dalam Perseroan berkaitan dengan kondisi Perusahaan. Selain itu, fungsi Sekretaris Perusahaan yaitu memastikan bahwa Perseroan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG dan menatausahakan serta menyimpan dokumen Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS.

Function of the Corporate Secretary

The Corporate Secretary acts as a liaison officer, or contact person, between the Company and the community in providing information needed by stakeholders, as well as those outside and/or within the Company relating to the condition of the Company. In addition, the function of the Corporate Secretary is to ensure that the Company complies with the regulations on disclosure of information, in line with GCG principles, as well as administers and keeps the Company's documents, including but not limited to Shareholders Register, Special List and minutes of meetings of the Board of Directors, Board of Commissioners and GMS.

Uraian Tugas & Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Direksi 073/KEP-DIR/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Sekretaris Perusahaan, maka tugas Sekretaris Perusahaan berdasarkan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Kesekretariatan

- a. Menyusun jadwal, membuat undangan dan mengatur pelaksanaan pertemuan/rapat Direksi baik dengan pihak internal, eksternal Perseroan dan pertemuan penting lainnya, antara lain:
 - Rapat Direksi yang diadakan minimal seminggu sekali;
 - Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan; dan
 - RUPS Pengesahan RKAP dan Pengesahan Laporan Keuangan yang diadakan masing-masing setiap tahun sekali.
 - Rapat Kerja yang diadakan minimal 3 (tiga) kali setahun yaitu Rapat Konsolidasi awal tahun, Rapat Kerja Evaluasi Semester I dan Rapat Kerja Penyusunan Anggaran/RKAP tahun berikutnya.
- b. Menyiapkan dan memastikan agenda Rapat Direksi, RADIKOM dan RUPS Tahunan;
- c. Memastikan bahwa agenda rapat sudah termasuk masalah-masalah yang perlu mendapatkan perhatian dan atau keputusan serta masalah non-rutin yang signifikan. Agenda rapat tersebut disampaikan bersamaan dengan penyampaian undangan.
- d. Menyampaikan Risalah Rapat kepada seluruh anggota Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Rapat dilaksanakan;
- e. Melakukan perbaikan atas risalah rapat Direksi (jika ada keberatan atau usulan perbaikan) yang disampaikan Direksi;
- f. Mengatur dan memastikan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi menghadiri RUPS.
- g. Menyusun program kerja/kegiatan dan kebutuhan anggaran Bagian Sekretaris Perusahaan;
- h. Menghadiri rapat Direksi, RADIKOM, RUPS dan membuat Risalah Rapat serta proses pengesahannya;
- i. Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, pelaporan perusahaan dan tugas-tugas protokoler Direksi lainnya;

Description of the Corporate Secretary's Duties & Responsibilities

In accordance with the BOD Decree No. 073/KEP-DIR/XII/2015 dated December 23, 2015 concerning the Guidelines for Corporate Secretary, the duties of the Corporate Secretary, based on functions, are as follows:

1. Secretariat

- a. Preparing the schedules, invitations and the organizing the meetings of the Boards of Directors, both internally and with external parties of the Company and other important meetings, including:
 - Board of Directors meetings which shall be held at least once a week;
 - Board of Commissioners and Directors meetings which shall be held every 3 (three) months or according to the needs; and
 - GMS for the Ratification of RKAP and Financial Statements which shall be held annually.
- Work Meetings which shall be held at least 3 (three) times a year, namely the Consolidation Meeting at the beginning of the year, Evaluation Meeting for the First Semester, Work Meeting for the preparation of Work and Budget Plan/RKAP.
- b. Prepare the agenda of the Board of Directors Meetings, RADIKOM and Annual GMS;
- c. Ensure that the meeting agenda has included issues that need attention and/or decisions and significant non-routine issues. The agenda of the meeting should be sent together with the invitation.
- d. Submitting Minutes of Meeting to all members of the Board of Directors no later than 7 (seven) days after the Meeting is held;
- e. Revising the minutes of the Board of Directors meeting (should there be objections or improvements) submitted by the Board of Directors;
- f. Managing and ensuring that Shareholders, Board of Commissioners and Directors attend the GMS.
- g. Developing work programs/activities and budget requirements for the Corporate Secretary Section;
- h. Attending the Board of Directors meeting, RADIKOM, GMS and preparing the Minutes of Meeting and the approval process;
- i. Organizing administrative activities, reporting and other Board of Directors' protocol;

- j. Membuat daftar khusus mengenai kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi beserta keluarganya pada Perusahaan dan perusahaan lain;

2. Komunikasi Perusahaan

- a. Memastikan bahwa setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris menerima program pengenalan Perseroan pada saat pertama kali menjabat. Tujuan dari program tersebut adalah untuk menginformasikan anggota baru Direksi/Dewan Komisaris mengenai Perseroan, sehingga anggota baru tersebut dapat memberikan kontribusinya secepat mungkin kepada Perseroan. Materi pengenalan tersebut harus disiapkan oleh Sekretaris Perusahaan, yang meliputi antara lain:
- 1) Informasi atau Pengetahuan Internal
 - o Anggaran Dasar Perusahaan;
 - o Latar belakang dan sejarah Perseroan;
 - o Misi dan visi Perseroan serta maksud dan tujuan Perseroan;
 - o Struktur organisasi Perseroan;
 - o Tugas, tanggung jawab dan hak/kewenangan serta fasilitas yang diperuntukkan bagi Direksi dan Dewan Komisaris;
 - o Rencana Jangka Panjang Perseroan;
 - o Rencana Kerja dan Anggaran Belanja Perseroan setiap tahun;
 - o Perkembangan Kinerja Perusahaan selama 5 (lima) tahun terakhir;
 - o Program bisnis dan jenis produk Perseroan;
 - o Keberadaan bangunan dan lingkungan kantor, kantor cabang, anak Perusahaan, organisasi/asosiasi, Sumber Daya Manusia (SDM).
 - 2) Informasi atau Pengetahuan Eksternal
 - o Posisi Perseroan dibandingkan dengan mitra usaha, kompetitor dan *stakeholder* lain;
 - o Undang-undang dan peraturan yang terkait; dan
 - o Hubungan dan kewajiban dengan regulator dan lembaga terkait lainnya.
 - 3) Program Pengenalan yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas Perseroan, perkenalan dengan para Kepala Divisi, Kepala Bagian, Kepala Cabang

- j. Preparing special register of share ownership of the Board of Commissioners and the Board of Directors and their families in the Company and other companies;

2. Corporate Communication

- a. Ensuring that each new member of the Board of Directors and Board of Commissioners follows the induction program during their first terms of office. The program is to inform the new members of the Board of Directors/Board of Commissioners about the Company, so that they can perform their duties promptly. The introductory material must be prepared by the Corporate Secretary, which includes:
- 1) Internal Information or Knowledge
 - o The Company's Articles of Association;
 - o The background and history of the Company;
 - o The mission and vision of the Company as well as the purposes and objectives of the Company;
 - o The Company's organizational structure;
 - o Duties, responsibilities and rights/authorities as well as facilities for the Board of Directors and the Board of Commissioners;
 - o The Company's Long Term Plan;
 - o The Company's Annual Work Plan and Budget;
 - o The progress of the Company's Performance in the last 5 (five) years;
 - o Business programs and types of products of the Company;
 - o The existence of buildings and office environments, branch offices, subsidiaries, organizations/associations, Human Resources (HR).
 - 2) External Information or Knowledge
 - o The position of the Company compared to business partners, competitors and other stakeholders;
 - o Relevant laws and regulations; and
 - o Relationships and obligations with regulators and other relevant institutions.
 - 3) Introduction Program can be done in the form of presentations, meetings or visits to Company facilities, introductions to Division Heads, Section Heads, Branch Office Heads

dan Karyawan di Perseroan serta program lainnya.

- b. Menjalin hubungan dengan instansi luar, seperti Instansi Pemerintah, BUMN, swasta, media massa dan masyarakat dalam rangka mengumpulkan dan mempublikasikan informasi;
- c. Mengelola informasi dan mengkaji seluruh informasi termasuk dampak hukumnya dan mempersiapkan informasi tersebut secermat mungkin yang akan dikomunikasikan kepada pihak terkait;
- d. Membina hubungan dengan investor/mitra bisnis/instansi luar Perseroan dan Anak Perusahaan;
- e. Menyusun dan mempublikasikan tanggapan secara tepat waktu, akurat dan objektif atas pertanyaan dari masyarakat, pemasok dan pekerja;
- f. Memberikan penjelasan jawaban dan informasi-informasi yang diberikan kepada pihak-pihak terkait secara relevan, sehingga tidak menimbulkan kerancuan ataupun kebingungan yang dapat mempengaruhi citra Perseroan;
- g. Menyusun materi Laporan Tahunan yang dibuat oleh masing-masing Divisi;
- h. Memastikan Laporan Tahunan Perseroan disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan diserahkan kepada pihak-pihak terkait;
- i. Memastikan bahwa persetujuan Laporan Tahunan harus tercantum di dalam agenda RUPS Tahunan;
- j. Memutakhirkam materi informasi yang disajikan dalam websitePerseroan secara berkala;
- k. Mengkoordinasikan penyiapan dan penyediaan bahan-bahan untuk "Press Release" atas setiap pernyataan dalam tingkatan Direksi;
- l. Pelayanan pemberian informasi atas informasi yang dibutuhkan mengenai data atau kinerja (performance) Perseroan dalam batas-batas yang ditetapkan dalam Protokol Informasi yang ditetapkan Perseroan dan penyampaian laporan-laporan lainnya kepada stakeholders lainnya sesuai peraturan perundangundangan disampaikan tepat waktu;
- m. Mendokumentasikan semua arsip Perseroan, termasuk diantaranya kegiatan program pengenalan dan pengembangan bagi anggota Dewan Komisaris maupun Direksi;
- n. Memberikan informasi yang materil dan relevan kepada stakeholders;

and Employees in the Company and other programs.

- b. Establishing relationships with external agencies, such as Government Agencies, State-Owned Enterprises, private sector, mass media and the public in collecting and publishing information;
- c. Managing information and reviewing all information including its legal impact and preparing the information which will be communicated to the parties concerned as carefully as possible;
- d. Fostering relationships with investors/business partners/institution outside of the Company and Subsidiaries;
- e. Compiling and publishing responses upon questions from the public, suppliers and workers in a timely, accurate and objective manner;
- f. Provide explanations, answers and information to relevant parties, so as not to cause confusion that can affect the Company's image;
- g. Prepare material for Annual Reports made by each Division;
- h. Ensure that the Company's Annual Report has been prepared in accordance with the applicable provisions and submitted to related parties;
- i. Ensure that the approval of the Annual Report must be included in the agenda of the Annual GMS;
- j. Updating information material that is presented on the website of the Company on a regular basis;
- k. Coordinating the preparation and provision of materials for "Press Release" for each statement from the Board of Directors;
- l. Provide the necessary information regarding the Company's data or performance in a timely manner and within the limits set by the Company Information Protocol and the submission of other reports to other stakeholders in accordance with laws and regulations;
- m. Documenting all of the Company's archives, including the introduction and development program for members of the Board of Commissioners and Directors;
- n. Providing material and relevant information to stakeholders;

- o. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Manajemen Triwulan dan Tahunan yang akurat dan dapat diandalkan. Laporan Manajemen Triwulan dan Tahunan disampaikan kepada Dewan Komisaris tepat waktu;
 - p. Laporan Manajemen Triwulan paling lambat harus disampaikan kepada Pemegang Saham/RUPS 1 (satu) bulan setelah triwulan yang bersangkutan, maka proses penyampaian kepada Dewan Komisaris paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan, sehingga Dewan Komisaris memiliki waktu 21 (dua puluh satu) hari untuk penelaahan, 7 (tujuh) hari sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham (atau sesuai ketentuan internal Perusahaan, jika ada);
 - q. Direksi wajib menyampaikan Laporan Manajemen Perseroan Tahunan (Triwulan IV) yang telah ditandatangani oleh seluruh Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun buku, maka proses penyampaian kepada Dewan Komisaris paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulanannya (atau sesuai ketentuan internal Perusahaan, jika ada).
- o. Coordinate the preparation of accurate and reliable Quarterly and Annual Management Reports. Quarterly and Annual Management Reports must be submitted to the Board of Commissioners in timely manner;
 - p. The Quarterly Management Report must be submitted to the Shareholders/GMS no later than 1 (one) month after the end of the relevant quarter, and the submission process to the Board of Commissioners is no later than 7 (seven) days after the end of the quarter, thus the Board of Commissioners has 21 (twenty one) days for review, 7 (seven) days before being submitted to the Shareholders (or according to the Company's internal provisions, if any);
 - q. The Board of Directors should submit Annual Company Management Report (Quarter IV) signed by all Directors and all members of the Board of Commissioners, no later than 2 (two) months after the end of the financial year, and the submission process to the Board of Commissioners is no later than 1 (one) month after ends of quarter (or according to the Company's internal provisions, if any).

3. Promosi dan Pencitraan Perseroan

- a. Membangun terbentuknya citra Perseroan (*image*) yang positif oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap Perseroan;
- b. Mengendalikan pengelolaan strategi komunikasi eksternal dan internal dengan segenap pemangku kepentingan untuk menyampaikan berita dari Perseroan secara terbuka dan bertanggungjawab serta membangun citra positif Perseroan;
- c. Menyampaikan perkembangan Perseroan kepada masyarakat melalui pelaporan keterbukaan informasi dalam bentuk siaran pers, *website* dan melayani permintaan informasi yang berkaitan dengan Perusahaan.

Hak dan Wewenang Sekretaris Perusahaan

1. Meminta data/informasi/keterangan yang dibutuhkan Direksi dan mengingatkan serta meminta penjelasan apabila ada keterlambatan atas data/informasi/keterangan tersebut kepada pihak-pihak terkait di dalam Perusahaan untuk keperluan pelaksanaan

3. The Company Promotion and Image building

- a. Build a positive company image to those who have interests to the Company;
- b. Controlling the management of external and internal communication strategies with all stakeholders to deliver news from the Company openly and responsibly and build a positive image of the Company;
- c. Delivering information regarding the Company's development to public through information disclosures in the form of press releases, websites and serving requests for information relating to the Company.

The Rights and Authorities of the Corporate Secretary

1. Request data/information/explanation needed by the Board of Directors and to remind and ask for clarification should there be delay in the provision of data/information/explanation to related parties, for the purpose of carrying out the duties of the Board

tugas Direksi sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Mewakili Direksi untuk berhubungan dengan pihak-pihak di luar Perusahaan dan/atau di dalam Perusahaan sesuai dengan penugasan yang diberikan serta kebijakan yang telah ditentukan;
3. Menyetujui pemberian sponsor dan atau bantuan Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan kebijakan Perusahaan;
4. Menyetujui program promosi, pameran yang akan diikuti oleh Perusahaan dengan terlebih dahulu menjelaskan atau menyampaikan proposal sesuai dengan kewenangan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan;
5. Menggunakan fasilitas-fasilitas kesekretariatan untuk melaksanakan tugas-tugasnya;
6. Mendapatkan program pengembangan diri untuk meningkatkan kemampuannya dalam menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan;
7. Mendapatkan gaji, honorarium dan fasilitas lainnya sesuai dengan kebijakan Perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku.

Uraian Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Bidang Sekretariat & Humas

1. Bidang Promosi

Di bidang promosi, perusahaan melakukan beberapa kegiatan antara lain melakukan pengkinian konten website perusahaan & portal BUMN, mendukung unit kerja pemasaran dalam penyelenggaraan pameran-pameran dan kemitraan.

2. Bidang Humas dan Publikasi

Dalam rangka meningkatkan citra positif perusahaan, perusahaan melakukan beberapa kegiatan antara lain melakukan promosi/iklan dalam rangka pendekatan kepada perbankan dan asosiasi; membuat dan menyelenggarakan event-event korporat, publikasi perusahaan & pemasaran produk; melaksanakan kegiatan Corporate Social Responsibility dengan pemberian santunan sembako kepada kaum dhuafa, turut serta dalam berbagai kegiatan sponsorship, serta melakukan pencetakan media promosi berupa brosur, *company profile*, Kalender dan Buku Agenda 2014. Disamping itu perusahaan juga melakukan sosialisasi & penilaian GCG dan KPKU untuk membangun konsep citra positif perusahaan yang ideal bagi perusahaan,

of Directors as long as they are in accordance with applicable laws and regulations;

2. Representing the Board of Directors in dealing with parties outside the Company and/or within the Company in accordance with the assignments given and policies that have been determined;
3. Approve sponsorship and/or assistance provided by the Company in accordance with the Company's authority and policies;
4. Approve promotional and exhibition programs to be followed by the Company, by first explaining or submitting proposals in accordance with the authority and policies set by the Company;
5. Using secretarial facilities in carrying out their duties;
6. Receiving development program to improve capabilities in carrying out the functions of the Corporate Secretary;
7. Receiving salaries, honorarium and other facilities in accordance with Company policies and applicable laws.

Description of Duties of the Corporate Secretary in the Secretariat & Public Relations Sector

1. Promotion Sector

The Company carries out several promotional activities, including updating the content of the Company's website & SOE portals, supporting the marketing work units in organizing exhibitions and partnerships.

2. Public Relations and Publications Sector

To improve its positive image, the Company conducts promotional activities/advertising as an approach to banks and associations; create and hold corporate events, publications & product marketing; carrying out Corporate Social Responsibility activities by providing basic needs to the needy, participating in various sponsorship activities, as well as through various promotional media such as brochures, company profiles, Calendar and Agenda. In addition, the Company also conducts GCG socialization & assessment and KPKU to build an ideal image. Although the GCG and KPKU score are still unsatisfactory, the Company is determined to continue to improve it in the future.

meskipun nilai GCG dan KPKU perusahaan masih belum memuaskan dan bertekad untuk semakin ditingkatkan kedepannya.

3. Bidang Kesekretariatan

Di bidang kesekretariatan, perusahaan melakukan beberapa kegiatan antara lain: melaksanakan kebijakan tata kelola persuratan dan tata kelola karsipan, dan *customer care*, mengadakan sosialisasi untuk pegawai di Kantor Pusat dan Kantor Cabang tentang *E-filing* Askrindo Syariah (Sistem Tata Persuratan).

3. Secretarial Sector

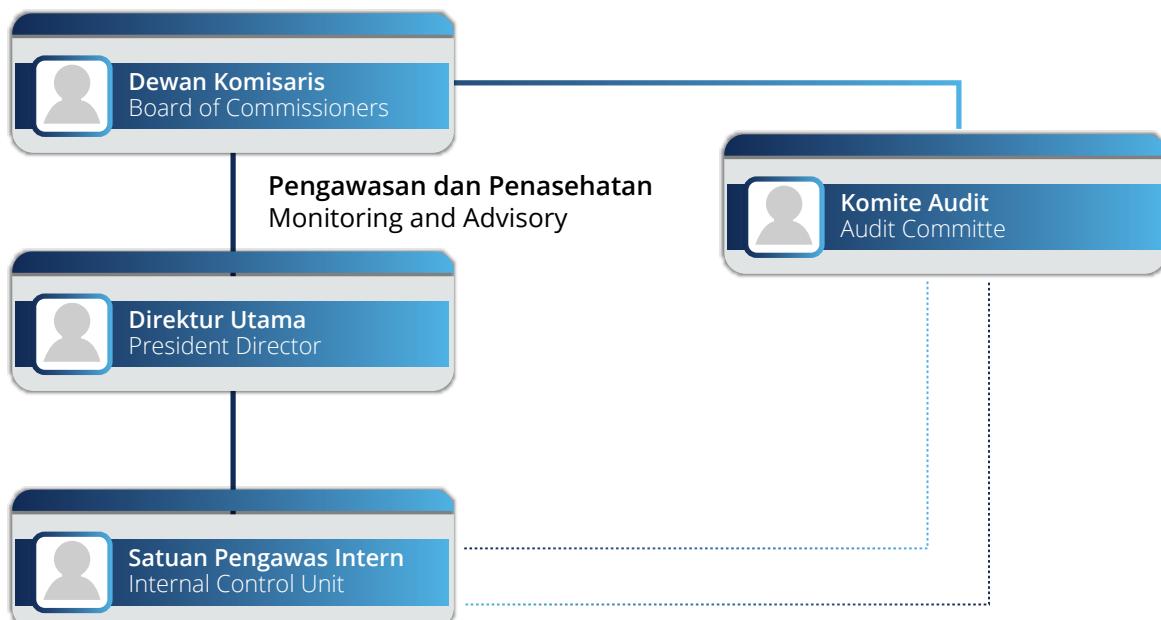
In the secretarial sector, the Company has performed several activities, namely mailing and archiving governance as well as customer care, disseminating Askrindo Syariah E-filing (Procedure for Correspondence System) for employees at the Head Office and Branch Offices.

SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI)

Perseroan membentuk Satuan Pengawasan Intern (SPI) sebagai Unit Internal Audit yang menjadi mitra strategis Manajemen dalam pengelolaan dan pengawasan kinerja Perseroan.

SPI dipimpin oleh seorang Kepala SPI yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.

Diagram Struktur dan Kedudukan SPI



INTERNAL AUDIT UNIT (IAU)

The Company established the Unit Internal Audit as a strategic partner for the Management in managing and monitoring the performance of the Company.

The IAU is led by the Head of IAU, appointed and dismissed by the President Director upon approval from the Board of Commissioners.

Structure Diagram and Position of IAU

Kedudukan Satuan Pengawasan Internal (SPI) di dalam struktur organisasi dijelaskan sebagai berikut:

- a. SPI dalam pelaksanaan tugasnya membantu Direktur Utama dalam menjalankan fungsi assured dan advisory bagi Perseroan;
- b. SPI dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pengawasan Internal;
- c. SPI berkedudukan dan bertanggung jawab langsung di bawah Direktur Utama;
- d. Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris;
- e. Kepala Satuan Pengawasan Internal bekerja secara independen dan obyektif serta ditempatkan sedemikian rupa, sehingga mampu melakukan tugas pengawasan intern sesuai yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Uraian Tugas & Tanggung Jawab SPI

Tugas dan tanggung jawab SPI adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
3. Melakukan pemeriksaan (audit) dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya, baik yang tertuang dalam rencanatahunan, maupun yang menjadi perhatian Direksi dan Komite Audit;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat Laporan Hasil Audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan berdasarkan penugasan khusus dari Direktur Utama atau sebagai pengembangan pemeriksaan sebelumnya. SPI dalam melaksanakan audit internal yang efektif, wajib memastikan pemeriksaan dan

The position of the Internal Audit Unit (IAU) within the structure of organization can be explained as follow:

- a. In performing its duties, IAU assisted the President Director in conducting the function of assurance and advisory for the Company.
- b. IAU is led by Head of Internal Audit Unit.
- c. The IAU is under and answers directly to the President Director.
- d. Head of IAU is appointed and dismissed by the President Director, based on the approval of the Board of Commissioners.
- e. Head of IAU works independently and objectively, and is positioned in such a way to enable him/her to perform internal audit duties as mandated by the prevailing rules and regulation.

Description of Duties and Responsibilities of IAU

Duties and Responsibilities of IAU are as follow:

1. Preparing and implementing the Annual Monitoring Work Program (PKPT);
2. Auditing and evaluating the implementation of internal controls and risk management systems in accordance with Company's policies;
3. Conducting audits and assessments on the efficiency and effectiveness regarding the finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology and other activities, both those stated in the annual plan, as well as those that need the attention of the Board Directors and Audit Committees;
4. Providing suggestions for improvement and objective information about the activities to be audited at all levels of management;
5. Preparing Audit Report to be submitted to the President Director and the Board of Commissioners through the Audit Committee;
6. Monitoring, analyzing and reporting the implementation of follow-up corrections that have been suggested;
7. Cooperating with the Audit Committee;
8. Developing program to evaluate the quality of internal audit activities; and
9. Performing special audit whenever deemed necessary based on special assignments from the President Director or as further development of previous audit. In carrying out effective internal audits. The IAU should ensure the audit and assessment on the adequacy

penilaian atas kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian intern serta kualitas kinerja Perseroan dalam rangka menjaga dan mengamankan kegiatan usaha Perseroan.

and effectiveness of internal control structure and the quality of the Company's performance in order to safeguard and secure the Company's business activities.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi SPI

Perseroan menyelenggarakan program peningkatan kompetensi SPI dengan melakukan program pengembangan kompetensi auditor secara sistematis dan berjenjang. Kebijakan Perseroan terkait pengembangan kompetensi SPI pada 2017 dilakukan melalui dua cara yaitu pengembangan kompetensi pada lembaga eksternal dan pengembangan kompetensi secara internal.

Uraian Pelaksanaan Tugas SPI Tahun 2017

Aktivitas SPI dalam melakukan pelaksanaan tugas selama tahun 2017 adalah melakukan audit di kantor cabang maupun kantor pusat dengan lingkup pengawasan terhadap penelaahan:

- Atas efektivitas dan efisiensi operasi Perseroan dan memastikan tingkat pencapaian sasaran terhadap rencana yang tetapkan;
- Atas ketataan pada perundang-undangan, peraturan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kebijakan Perseroan;
- Atas keandalan pelaporan informasi keuangan yang terlaksana secara akurat dan tepat waktu;
- Atas penerapan GCG dan memastikan bahwa program dan implementasinya telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG

IAU Competence Training and Development

The Company organizes IAU competency development programs through auditor competency development programs carried out in a systematic and tiered manner. The Company's policies on IAU competency development in 2017 are carried out in two ways, namely the development of competencies in external institutions and competency development conducted internally.

Description of the Implementation of Duties of IAU in 2017

In carrying out the tasks during 2017, the IAU conducted audits in branch offices and head office, with the scope of the audit on:

- Effectiveness and efficiency of the Company's operations and ensuring the level of achievement of targets against the plan;
- Compliance with laws, regulations, regulations, systems and procedures and policies of the Company;
- Reliability of the financial statement that is carried out accurately and in timely manner;
- Implementation of GCG and ensuring that the program and its implementation are carried out in accordance with the principles of GCG

Tabel Penyelesaian Rekomendasi Audit Internal

Unit Kerja Work Unit	Jumlah Rekomendasi/ Temuan 2017 Number of Recommendation Finding in 2017	Penyelesaian 2017 Completion in 2017			Jumlah Rekomendasi/ Temuan 2016 Number of Recommendation Finding in 2016	Penyelesaian 2016 Completion in 2016		
		Tuntas Accomplished	Belum Tuntas Still Ongoing	Tidak dapat ditindaklanjuti		Tuntas Accomplished	Belum Tuntas Still Ongoing	Tidak Dapat ditindaklanjuti
Kantor Pusat Head Office	16	7	9	0	14	11	3	0
Kantor Pemasaran Marketing Office	38	35	3	0	40	40	0	0
Total Total	54	42	12	0	54	51	3	0

Table of Follow Ups on Internal Audit Recommendations

KEPATUHAN

Perseroan membentuk fungsi kepatuhan yang berada di Satuan Kerja Manajemen Risiko, Kepatuhan dan GCG. Satuan kerja ini bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan dipimpin oleh Kepala satuan Kerja dengan rekomendasi Dewan Komisaris.

Uraian Tugas & Tanggung Jawab Unit Kepatuhan & GCG

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No.130/KEP-DIR/IX/2016 tanggal 30 November 2016 tentang Struktur Organisasi, maka tugas dan tanggungjawab unit kepatuhan sebagai berikut:

1. Mengorganisasikan dan mengkoordinasikan praktik pengelolaan kepatuhan dan GCG.
2. Menyusun pedoman praktik tata kelola perusahaan (GCG).
3. Melaksanakan program monitoring praktik pelaksanaan GCG pada fungsi perusahaan terkait.
4. Membina kerja sama yang baik dengan divisi atau unit usaha terkait dalam rangka memantau kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan;
5. Memastikan bahwa Perseroan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG.

Pada tahun 2017 telah dibuat Piagam kepatuhan dan SOP Kepatuhan yang merupakan bagian dari kebijakan dan proses pengelolaan kepatuhan di lingkungan Perseroan.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Perseroan telah membentuk Sistem Pengendalian Internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perseroan, mencakup:

1. Lingkungan pengendalian internal Perseroan yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur, yang terdiri dari:
 - a. Integritas, nilai etika, dan kompetensi karyawan.
 - b. Filosofi dan gaya Manajemen Perseroan.
 - c. Cara pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawabnya.

COMPLIANCE

The Company forms a compliance function under the Risk Management, Compliance and GCG Work Unit. This work unit answers directly to the President Director and is headed by the Head of the Work Unit with the recommendation of the Board of Commissioners.

Description of Duties & Responsibilities of the Compliance & GCG Unit

In accordance with the Board of Directors Decree No.130/KEP-DIR/IX/2016 dated 30 November 2016 concerning Organizational Structure, the duties and responsibilities of compliance units are as follows:

1. Organize and coordinate management of compliance and GCG.
2. Develop guidelines for corporate governance practices (GCG).
3. Carry out a monitoring program on GCG implementation practices in related company functions.
4. Fostering good cooperation with related divisions or business units in order to monitor the Company's compliance with laws and regulations;
5. Ensure that the Company complies with the regulations regarding disclosure requirements in line with the application of GCG principles.

In 2017, the Company prepared a compliance Charter and Compliance SOP, which is part of the compliance management policies and processes within the Company.

INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Company has established an effective Internal Control System to secure the Company's investments and assets, including:

1. The internal control environment, which is carried out in a disciplined and structured manner, consists of:
 - a. Integrity, ethical values, and competence of employees.
 - b. The philosophy and style of the Company's Management.
 - c. Procedures for implementing their authority and responsibilities.



- d. Pengorganisasian dan pengembangan Sumber Daya Manusia.
- e. Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.
- 2. Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha (*risk assessment*), yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisa, dan menilai pengelolaan risiko yang relevan;
- 3. Aktivitas pengendalian, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Perseroan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perseroan, antara lain mengenai: kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan terhadap aset Perseroan;
- 4. Sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Perseroan;
- 5. *Monitoring*, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal, termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perseroan, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal; dan
- 6. Memastikan tindak lanjut atas rekomendasi dari SPI.
- d. Organizing and developing Human Resources.
- e. Attention and direction made by the Directors.
- 2. Assessment of business risk management, which is a process for identifying, analyzing, and assessing relevant risk management;
- 3. Controlling activities, namely actions made in order to control the activities at each level and unit within the Company's organizational structure, including: authority, authorization, verification, reconciliation, performance appraisal, division of tasks and security of assets Company;
- 4. Information and communication systems, a process of presenting reports on operational, financial, and compliance and compliance with the provisions of the laws and regulations by the Company;
- 5. Monitoring, the process of assessing the quality of the internal control system, including the internal audit function at each level and unit in the Company's organizational structure, so that it can be implemented optimally; and
- 6. Ensure follow-up on recommendations from SPI.

MANAJEMEN RISIKO

Perseroan membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko, Kepatuhan dan GCG sebagai Unit Pengelolaan Risiko dan kepatuhan serta implementasi GCG.

Unit ini bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan dipimpin oleh Kepala satuan Kerja atas rekomendasi Dewan Komisaris.

Satuan Kerja Manajemen Risiko, Kepatuhan & GCG merupakan unit kerja yang berada dibawah Direktur Utama. Satuan Kerja ini merupakan salah satu organ pendukung Tata Kelola Perusahaan selain Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawasan Intern.

Satuan ini memiliki tugas untuk:

1. Mengorganisasikan dan mengkoordinasikan kegiatan manajemen dan pengelolaan risiko korporat maupun transactional secara tepat dan sistematis, mulai dari pembuatan review risiko, penyusunan pedoman

RISK MANAGEMENT

The Company established a Risk Management, Compliance and GCG Work Unit as a Unit that manages Risk and compliance and GCG implementation.

This unit answers directly to the President Director and is headed by the Head of the Working Unit on the recommendation of the Board of Commissioners.

The Risk Management, Compliance & GCG Work Unit is a work unit under the President Director. This Work Unit is one of the supporting organs of Corporate Governance in addition to the Corporate Secretary and the Internal Audit Unit.

This unit is assigned to:

1. Organize and coordinate management activities and corporate risk management appropriately and systematically, start by reviewing risk, preparing risk management guidelines, preparing work plans.

pengelolaan risiko, penyusunan rencana kerja. Mengorganisasikan proses pengelolaan risiko korporat mulai dari : Identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengendalian risiko, pengujian dan *monitoring* pengendalian risiko.

- Mengorganisasikan dan mengkoordinasikan praktik pengelolaan kepatuhan dan GCG, menyusun pedoman praktik tata kelola perusahaan (GCG). Melaksanakan program *monitoring* praktik pelaksanaan GCG pada fungsi perusahaan terkait.

Perseroan mengadopsi penilaian tingkat risiko sesuai ketentuan POJK No. 10/POJK.05/2014 tanggal 27 Agustus 2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (LJKNB). Dari hasil penilaian *self assessment*, diperoleh nilai risiko Askindo Syariah sebesar 1,22 yaitu pada tingkat risiko SEDANG RENDAH. Dalam hal ini probabilitas kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya relatif rendah, perusahaan telah membangun sistem pengendalian risiko yang kuat. Secara Agregat perusahaan diindikasikan sangat sehat dan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya kepada pemegang sertifikat/nasabah.

Tabel Ikhtisar Penilaian Tingkat Risiko Perseroan 2017

Organizing corporate risk management processes starting from: risk identification, risk measurement, risk control, testing and monitoring risk control.

- Organizing and coordinating compliance and GCG practices, drawing up guidelines for corporate governance practices (GCG). Carry out monitoring program on GCG implementation in the related functions of companies.

The Company adopted a risk level assessment in accordance with the provisions of POJK No. 10/POJK.05/2014 dated 27 August 2014 concerning the Assessment of the Risk Level of Non-Bank Financial Services Institutions (LJKNB). The self-assessment on the risk faced by Askindo Syariah resulted in a score of 1.22, or at the level of MEDIUM LOW risk. In this case, the Company's probability of failure in meeting its obligations is relatively low, since the Company has built a strong risk control system. Aggregately, the Company is indicated to be very healthy and has the ability to fulfill its obligations to the policy holder/customer.

Table of Overview of the 2017 Risk Level

IKHTISAR PENILAIAN TINGKAT RISIKO/OVERVIEW OF RISK LEVEL ASSESSMENT			
Per tanggal 31 Desember 2017/As of 31 December 2017			
Jenis Risiko/ Risk Type	Nilai Risiko/ Value at Risk (C)	Bobot/ Weight (D)	Risiko Bersih/ Net Risk (E)
1. Kepengurusan/Management	0,99	10%	0,10
2. Tata Kelola/Governance	1,60	10%	0,66
3. Strategi/Strategy	1,23	15%	0,34
3.1. Risiko Bawaan (A)/Inherent Risk (A)	1,25		
3.2. Manajemen & Pengendalian (B)/Management & Control (B)	1,21		
4. Operasional/Operational	1,22	15%	0,33
4.1. Risiko Bawaan/Inherent Risk (A)	1,33		
4.2. Manajemen & Pengendalian/Management & Control (B)	1,11		
5. Aset & Liabilitas/Asset & Liability	1,23	20%	0,45
5.1. Risiko Bawaan (A)/Inherent Risk (A)	1,25		
5.2. Manajemen & Pengendalian (B)/Management & Control (B)	1,20		
6. Penjaminan/Guarantee	1,50	30%	1,52
6.1. Risiko Bawaan (A)/Inherent Risk (A)	1,50		
6.2. Manajemen & Pengendalian (B)/Management & Control (B)	1,50		
	(F)	100%	3,40
Total Nilai Bersih (G)/Total Net Value (G)			1,36

IKHTISAR PENILAIAN TINGKAT RISIKO/OVERVIEW OF RISK LEVEL ASSESSMENT				
Per tanggal 31 Desember 2017/As of 31 December 2017				
7. Dukungan Dana (Permodalan)/Funds (Capital) Support				
7.1. Kemampuan Pendanaan (Permodalan)/Funding Capacity (Capital)	0,95	55%	0,45	
7.2. Tambahan Pendanaan (Permodalan)/Additional Funding (Capital)	1,10	45%	0,66	
	(G) 0,96	100%	1,11	
Total Nilai Risiko Dukungan Dana (Permodalan) ()				1,03
Total Value of Funds (Capital) Support Risk ()				
Bobot Total Nilai Bersih dan Dukungan Dana 50%:50%				
Weighted Total Net Value and Funds Support 50%:50%				
Nilai Tingkat Risiko Keseluruhan (J)				1,22
Overall Risk Level (J) Value				
Tingkat Risiko				SEDANG RENDAH/LOW MODERATE
Risk Level				

Evaluasi atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Perseroan secara berkala melakukan evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko Perseroan yang dilakukan melalui masing-masing divisi. Direksi dibantu oleh Satuan Manajemen Risiko dan Satuan Pengawasan Internal serta saran dari Dewan Komisaris melakukan kajian dan merumuskan strategi pengelolaan dan mitigasi yang diperlukan. Evaluasi terhadap Sistem Manajemen Risiko Perseroan pada 2017 telah berjalan efektif. Hasil kajian menjadi rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dalam perbaikan Sistem Manajemen Risiko Perseroan yang lebih baik pada masa Mendatang.

TEKNOLOGI INFORMASI (TI)

Sebagai perusahaan penjaminan syariah pertama di Indonesia, Perseroan memiliki *core competence* yakni “penjaminan syariah berbasis IT”. Sejak awal polis pertama diterbitkan pada tanggal 17 Mei 2013, Perseroan telah menggunakan elektronik polis.

Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal, komitmen Perseroan untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam bisnisnya sangat kuat. Kerjasama penggunaan *Online System Application* (OSA) dengan mitra bisnis juga dilakukan secara bertahap seiring dengan kebutuhan pengembangan produk setiap mitra bisnis. Dengan OSA dan e-polis maka mitra bisnis dapat secara langsung meng-input sendiri data nasabah yang akan diberikan

Evaluation of the Effectiveness of the Risk Management System

The Company periodically evaluates the effectiveness of the Company's risk management system carried out through each division. The Board of Directors is assisted by the Risk Management Unit and the Internal Control Unit, and gets advice from the Board of Commissioners about conducting studies and formulate management and mitigation strategies. The evaluation of the Company's Risk Management System in 2017 has been done effectively. The results of the study are recommendations that must be followed up in improving the Company's Risk Management System in the future.

INFORMATION TECHNOLOGY (IT)

As the first sharia guarantee company in Indonesia, the Company has core competence, namely “IT-based sharia guarantee”. The company has even begun to use electronic policies since the first policy was issued, namely on May 17, 2013.

This proves that since the beginning the Company has a very strong commitment to utilize information technology in conducting its business. Collaboration with business partners in the use of the online system application (OSA) is carried out in stages along with the product development needs of each partner. With the existence of OSA and e-policies, business partners can directly input customer data to get the expenses and at the same time to print

pembiayaan dan kemudian mencetak langsung sendiri polisnya dalam waktu yang bersamaan.

Perseroan telah menggunakan aplikasi *core business* yaitu *System Online Core Production* (SOCP) yang mencakup modul pemasaran, akseptasi, ta'widh, reasuransi, aktuarial dan Laporan yang telah Digunakan dan diaplikasikan secara nasional oleh karyawan Kantor Pusat, Kantor Cabang dan KPS dan KPPS.

Pada tahun 2017, Perseroan telah mengembangkan Teknologi Informasi yang dimiliki melalui :

Pengembangan OSA:

- Implementasi *Host to Host* dengan bank BRI Syariah terkait produk mikro
- Pengembangan fitur klaim *online* dan pengajuan subrogasi *online* melalui OSA

Pengembangan modul SOCP:

- Penambahan fasilitas *filter/alert* apabila pengajuan pembiayaan lebih besar dari *plafond* induk
- *Blocking Plafond* (Lembaga *Linkage*) dengan adanya *alert message* apabila sudah melewati maksimum *plafond* induk *Blocking plafond* (Lembaga *Linkage*)
- Perubahan format *invoice net (debit note)* dan pencatatan biaya akuisisi dalam sistem SOCP beserta PPN dan PPH
- Laporan Report Tawidh
- Pembuatan *Checklist* Nilai Tuntutan Klaim di Menu *Monitoring*
- Pembuatan Fitur Untuk Filter Data Pengajuan Klaim lengkap yang belum diverifikasi KP
- Penambahan Filter untuk tanggal *create & tanggal lengkap*
- Penambahan Kategori Penyebab di Sistem SOCP
- Penambahan Fitur *Monitoring* Surat Penawaran (Hanya Melihat)
- Nilai *Outstanding* agar dapat ditampilkan di daftar sertifikat dan penjaminan *endorsement* khususnya restrukturisasi untuk kebutuhan pelaporan dan monitoring jumlah total *outstanding* risiko kafalah restruktur
- Daftar Informasi Agunan per Debitur
- Formulasi Perhitungan Rate AJP dan Nilai AJP untuk sertifikat *endorsement* Untuk laporan *monitoring* perdebitur bisa ditambahkan Bank Induk (Lap. *monitoring - checklist* ditambahkan bank induk)

the policies by themselves.

The Company has used core business applications, namely System Online Core Production (SOCP), which includes marketing modules, acceptance, ta'widh, reinsurance, actuarial and reports that have been used and applied nationally by employees of Head Office, Branch Offices and KPS and KPPS .

In 2017, the Company develops its Information Technology through:

OSA Development:

- Host-to-Host implementation with BRI Syariah bank, related to micro products
- Development of online claim features and online subrogation through OSA

Development of the SOCP module:

- Adding filter/alert facilities if the funding proposed is greater than the parent ceiling.
- Blocking Ceiling (Linkage Institution) with message alerts when it passed the maximum limit of the Blocking ceiling (Linkage Institution)
- Change the format of net invoice (debt note) and recording of acquisition costs in the SOCP system along with PPN and PPH
- Report on Ta'widh Report
- Preparing Checklist for Claim Value in the Monitoring Menu
- Preparing Feature to filter complete Claim Submission Data, which has not been verified by KP
- Add filters for dates of creating & full dates
- Add Cause Categories in SOCP System
- Add Suggested Monitoring Features (Viewing Only)
- Outstanding value to be displayed on the certificate list and guarantee endorsement especially restructuring for the needs of reporting and monitoring the total outstanding risk of financial restructuring
- List of collateral information per debtor
- Formulation of the AJP Rate Calculation and AJP Value for endorsement certificates for the debtor monitoring report, the Parent Bank can be added (Monitoring report - parent bank is added on checklist)

- Penambahan fitur *covernote* pada tahap verifikasi
- Penambahan fiel nilai pengajuan klaim
- *Disable Klik Kanan* untuk Fitur Registrasi Debitur, Pengajuan Penjaminan, Daftar Sertifikat, Penjaminan *Endorsement*

Pengembangan Aplikasi Table:

- *Table* digunakan sebagai *tools* dalam analisa data perusahaan untuk mendukung pengambilan keputusan
- Terdapat *dashboard* sesuai kebutuhan unit bisnis

Infrastruktur Perubahan Management:

- *Internet Access Management (IAM)*: monitoring dalam optimalisasi dalam penggunaan *bandwidth* internet untuk karyawan, Pengelolaan dan *monitoring* akses, Integrasi pengelolaan akun *user* dengan terkoneksi dengan *Active Directory server*;
- Perubahan layanan VPN IP untuk 5 KPS menjadi layanan Metro
- *Backup Link DC to DRC*
- *Domain controller*: Penerapan *Single Sign on* untuk keamanan PC atau *Desktop*
- Relokasi DC dari Gd Askrindo ke Sentul, Relokasi NOC dari Gd Askrindo ke Primagraha

KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Berikut ini komite-komite yang berada dibawah direksi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi:

Komite Pengembangan Produk

Komite Pengembangan Produk mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam:

- Membuat dan merancang produk penjaminan yang belum pernah ada dan melakukan pemeriksaan apakah produk tersebut sesuai dengan ketentuan, baik ketentuan/regulasi internal dan eksternal, Termasuk apakah produk tersebut, atau sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan SOP atau pedoman yang berlaku di internal perusahaan;
- Melakukan reviu setiap produk penjaminan yang dibuat dalam bentuk Perjanjian Kerjasama, Lampiran Produk dan memastikan produk penjaminan tersebut sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan/regulasi baik internal maupun eksternal.

- Add cover note features at the verification stage
- Add value claim fields
- Disable Right Click for Debtor Registration Features, Guarantee Submission, Certificate List, Endorsement Guarantee

Table Application Development:

- Table is used as a tool in analyzing company data to support decision making
- A dashboard is existed according to the needs of the business unit

Change Management Infrastructure

- Internet Access Management (IAM): monitoring in the optimization of internet bandwidth usage for employees, management and monitoring of access, Integration of managing user accounts by connecting with Active Directory servers;
- Change IP VPN services for 5 KPS to Metro services
- DC to DRC Backup Link
- Domain controller: apply Single Sign on for PC or Desktop security
- Relocation of DC from Askrindo Building to Sentul, NOC Relocation from Askrindo Building to Primagraha

COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

Following are the committees under the Board of Directors, established based on the Board of Directors' Decree:

Product Development Committee

The Product Development Committee has duties and responsibilities in:

- Create and design new guarantee products and check the suitability of these products with regulations, both internal and external. Including whether the product is suitable and does not in conflict with the applicable SOP or guidelines in the company;
- Reviewing all guarantee products made in the form of Collaborative Agreements, Product Attachments and ensuring that all guarantee products are in accordance with and do not conflict with internal or external regulations.

Komite Akseptasi

Komite Akseptasi dibentuk yang anggotanya lintas divisi, mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam:

- Memberikan arahan kebijakan terkait dengan akseptasi penjaminan;
- Melakukan reviu atas limit akseptasi penjaminan yang diajukan;
- Melakukan reviu dan persetujuan akseptasi penjaminan untuk limit tertentu.

Komite Investasi

Komite investasi ini dibentuk untuk:

- Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan dan arahan Investasi Perusahaan
- Membantu Direksi dalam Memantau pelaksanaan kebijakan dan arahan investasi yang telah ditetapkan;
- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan arahan investasi yang telah ditetapkan;
- Melakukan rapat koordinasi secara berkala minimal 6 (enam) bulan.

Komite Personalia

Komite Personalia bertugas untuk:

- Merumuskan kebijakan dan arahan yang terkait dengan penanganan sumber daya manusia di dalam perusahaan;
- Pengambilan keputusan dalam hal sebagai berikut:
 - Remunerasi dan insentif pegawai;
 - Mutasi dan rotasi pegawai;
 - Promosi, demosi, detasering dan pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawai;
 - Disiplin pegawai;
 - Hal-hal lain terkait dengan penanganan masalah pegawai.
- Melakukan kebijakan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan keputusan, kebijakan dan arahan yang telah ditetapkan;
- Menjaga rahasi hasil rapat komite sampai dengan Surat Keputusan diterbitkan dan diberikan kepada pegawai yang bersangkutan.

HUBUNGAN KERJA DENGAN PIHK EKSTERNAL

Perusahaan Asuransi dan Reasuransi

Dalam rangka untuk pengelolaan risiko dan memperluas pangsa pasar penjaminan, PT Jaminan Pembiayaan Askindo Syariah menjalin kerjasama dengan perusahaan asuransi/reasuransi sebagai berikut:

Acceptance Committee

With cross division members, the Acceptance Committee has duties and responsibilities in:

- Directing policies on acceptances of guarantees;
- Reviewing the proposed limit of guarantee acceptance;
- Reviewing and approving guarantee acceptance within certain limits.

Investment Committee

The Investment Committee was formed to:

- Assist the Board of Directors in formulating policies and directives for Corporate Investment
- Assist the Board of Directors in monitoring the implementation of investment policies and directives;
- Evaluate the implementation of investment policies and directives;
- Conduct coordination meetings regularly at least every 6 (six) months.

Personnel Committee

The Personnel Committee has the duty to:

- Formulate policies and directives related to the management of human resources in the Company;
- Make decisions about:
 - Employee remuneration and incentives;
 - Mutation and rotation of employees;
 - Promotion, demotion, detachment and termination of employment (layoffs) of employees;
 - Employee discipline;
 - Other matters are related to handling employee problems.
- Conduct regular evaluation of the implementation of decisions, policies and directives;
- Maintain the confidentiality of the results of the committee meeting until the Letter of Decision is issued and given to the employee concerned.

RELATIONSHIP WITH THE EXTERNAL PARTIES

Insurance and Reinsurance Companies

In order to manage risk and expand market share, PT Jaminan Pembiayaan Askindo Syariah enters into collaboration agreement with the following insurance/reinsurance companies:

Tabel Daftar Rekanan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi

Table of Insurance and Reinsurance Partners

No.	Nama Perusahaan <i>Company Name</i>	Jenis Kerjasama <i>Type of Collaboration</i>
1	PT Askindo (Persero)	Wanprestasi Default
2	PT Reasuransi Nasional Indonesia Syariah	Wanprestasi dan Meninggal dunia Default and Demise
3	PT Reasuransi Syariah Indonesia	Wanprestasi dan Meninggal dunia Default and Demise
4	Asuransi Takaful Keluarga	Meninggal dunia Demise
5	Asuransi BRI Life - Syariah	Meninggal dunia Demise
6	Avrist Assurance - Syariah	Meninggal dunia Demise
7	Asuransi Jiwa Amanah Gita	Meninggal dunia Demise
8	PT BNI Life - Syariah	Meninggal dunia Demise
9	PT Asuransi Bumida - Syariah	Gangguan usaha Business Disruption
10	PT Asuransi Staco - Syariah	Gangguan usaha dan Asuransi Kebakaran Business Disruption and Fire Insurance
11	PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia	PHK dan Asuransi Kebakaran Layoffs and Fire Insurance

Akuntan Perseroan

Sebagaimana keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan yang tercantum dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT Jaminan Pembiayaan Askindo Syariah tentang Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2017, RUPS melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP), dalam rangka pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2017.

Guna menyajikan laporan keuangan kepada pemegang saham yang memiliki integritas, Perseroan menggunakan jasa auditor eksternal Kantor Akuntan Publik (KAP) Mirawati Sensi Idris (No. Izin Akuntan Publik OJK No.1353/KM.1/2016) untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017. Selain audit Laporan Keuangan, Perseroan tidak menggunakan jasa lain dari Akuntan Publik.

The Company's Accountant

As stated in the Minutes of the General Meeting of Shareholders of PT Jaminan Pembiayaan Askindo Syariah concerning Ratification of Financial Statements for the 2017 Financial Year, the GMS delegates authority to the Board of Commissioners to appoint Public Accounting Firm (KAP) to conduct the audit on the 2017 Financial Statements.

In order to present financial reports with integrity to shareholders, the Company uses the services of external auditor from the Public Accountant Firm (KAP) Mirawati Sensi Idris (FSA Public Accountant License No. 1353/ KM.1/2016) to audit the Company's Financial Statements for the financial year 2017. The Company did not use other services from Public Accountants aside of the said financial statements audit services.

Tabel informasi akuntan publik 5 (lima) tahun terakhir

Table of information about public accountants in the last 5 (five) years

Tahun Year	Periode Penugasan Period of Assignment	Akuntan Accountant	Kantor Akuntan Publik Public Accountant Firm	Biaya (Termasuk PPN) Fee (Inc VAT)
2017	Tahun Buku 2017 Fiscal Year 2017	Jazinta Mirawati	Mirawati Sensi Indris	Rp70 juta Rp70 million
2016	Tahun Buku 2016 Fiscal Year 2016	Safaat Widjajabrata	Soejatna, Mulyana & Rekan	Rp60 juta Rp60 million
2015	Tahun Buku 2015 Fiscal Year 2015	Safaat Widjajabrata	Soejatna, Mulyana & Rekan	Rp60 juta Rp60 million
2014	Tahun Buku 2014 Fiscal Year 2014	Safaat Widjajabrata	Soejatna, Mulyana & Rekan	Rp53 juta Rp53 million
2013	Tahun Buku 2013 Fiscal Year 2013	Safaat Widjajabrata	Soejatna, Mulyana & Rekan	Rp45 juta Rp45 million

**Tabel Penyelesaian Rekomendasi Audit Eksternal
2017**

**Table of Completion of External Audit Recommendations
in 2017**

Audit Type of Audit	Jumlah Rekomendasi Number of Recomendation	Status/Status		
		Tuntas Completed	Belum Tuntas On-going	Tidak dapat ditindaklanjuti Cannot be followed up
Hukum Legal	1	1	0	0
Operasional Operational	3	2	1	0
Teknologi Informasi Information Technology	1	1	0	0
SDM HR	1	1	0	0
Total Total	6	5	1	0

**Tabel Perusahaan yang dialihkan kepada pihak lain
(Outsourcing)**

Table of Outsourcing

No.	Fungsi yang Dialihkan kepada pihak lain <i>Function Outsourced to Other Parties</i>	Pihak lain yang menjadi partner <i>Outsource Partners</i>	Jangka waktu perjanjian <i>Duration of the Agreement</i>	Alasan outsourcing <i>Reason for Outsourcing</i>
1	Keamanan dan <i>cleaning service</i> Security and cleaning service	PT Usayasa Reksa Tohaga	2013 - 2018	Kemudahan penyediaan tenaga kerja Ease of providing labor
2	Pemasaran Marketing	PT Inti Mitra Setia	2017 - 2019	Meningkatkan jaringan pemasaran Improve network marketing
3	<i>Data Center, Local Maintenance</i> Data Center, Local Maintenance	PT.Duta Pratama Teknologi	2016 - 2017	Perawatan dan pengelolaan Data center Maintenance and management of Datacenter
4	Langganan <i>colocation Data center</i> Colocation Data center	PT Telkom Sigma	2017 -2019	Pengelolaan colocation data center Data center colocation management

KETERBUKAAN INFORMASI

Sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat, Perseroan secara berkala menyebarluaskan informasi yang terkait dengan aktivitas dan kinerja keuangan. Keterbukaan informasi tersebut dalam rangka memenuhi amanat dan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk itu pula maka Manajemen telah menetapkan sebuah Pedoman *Transparansi & Disclosure* melalui Surat Keputusan Direksi No. 072/KEP-DIR/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015. Sarana atau media yang digunakan untuk menyampaikannya antara lain *website* dan media surat kabar dalam bentuk *pers release* tentang kinerja dan hasil usaha Perseroan.

Media yang digunakan untuk menyampaikan informasi perusahaan antara lain *website*, email Korporat, intranet, media surat kabar dan *media online*.

Website

Pengelolaan *website* Perseroan dilaksanakan oleh Tim Pengelola *Website* Perseroan di bawah Sekretaris Perusahaan, yang tugasnya antara lain menjaga/memastikan *Website* Perseroan tetap memenuhi kepatuhan terhadap ketentuan keterbukaan informasi kepada pihak eksternal dan *update/pembaharuan* isi konten secara berkala. Hal-hal yang disampaikan, khususnya dalam penyampaian laporan dan informasi penting lainnya yang dimuat dalam *website* Perseroan www.askrindosyariah.co.id adalah sebagai berikut: Kinerja Keuangan yang berisi Laporan Keuangan Penting (5 tahun), Laporan Keuangan tahun berjalan, Laporan Tahunan (*Annual Report*). Pedoman dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan. Struktur Organisasi, Produk Perseroan, Visi dan Misi serta CSR. Peluang untuk Karir dan Pengadaan Barang. Konten Publik mengenai Aktivitas Manajemen.

E-Mail Korporat

Agar komunikasi dapat dilakukan secara lebih efektif, Perseroan telah memiliki jaringan intranet yang memadai. Salah satunya dengan menggunakan sarana *corporate e-mail* sehingga antarunit kerja dan antar pegawai dapat melakukan korespondensi surat menyurat secara lebih efisien berkat pengurangan penggunaan kertas (*paperless*).

DISCLOSURE OF INFORMATION

As a form of transparency to the public, the Company periodically disseminates information related to its activities and financial performance. The information disclosure is to fulfill the mandate and provisions stipulated in the Law of the Republic of Indonesia No. 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure and for this reason, the Management established a Guidelines for Transparency & Disclosure through the Board of Directors Decree No. 072/KEP-DIR/XII/2015 dated December 23, 2015. The means or media used to deliver it include website and newspaper media, through press release about the performance and results of the Company's operations.

The media used to deliver company information include websites, corporate e-mails, intranets, newspaper media and online media.

Website

The Company's Website Management Team is under the Corporate Secretary, with the task of maintaining/ensuring that the Company's Website always complies with the provisions on information disclosure to external parties and updating content regularly. Matters submitted on the Company's website www.askrindosyariah.co.id, specifically related to important reports and information, are as follows: Financial Performance that contains Important Financial Reports (5 years), current year Financial Reports, Annual Reports. Guidelines and Implementation of Corporate Governance. Organizational Structure, Company Products, Vision and Mission and CSR. Opportunities for Career and Procurement of Goods. Public Content regarding Management Activities.

Corporate E-mail

In order to carry out communication more effectively, the Company already has installed adequate intranet network. One of them is by using corporate e-mail facilities to facilitate efficient correspondence between work units and employees while reducing paper consumption.

Kegiatan Tatap Muka Manajemen dengan Karyawan

Untuk membangun iklim komunikasi yang efektif dan intens antara manajemen dengan segenap pegawai, maka telah dilakukan sejumlah kegiatan tatap muka yang diakomodir melalui kegiatan Doa Pagi Bersama, Rapat Koordinasi Divisi dan Forum Antar-Divisi.

BENTURAN KEPENTINGAN TERKAIT HUBUNGAN BERELASI

Kebijakan mengenai benturan kepentingan terdapat di dalam Buku Pedoman *Good Corporate Governance* yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Direksi No. 067/KEPDIR/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 dan Pedoman Benturan Kepentingan disahkan dengan Surat Keputusan Direksi No. 070/KEP-DIR/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015. Kebijakan benturan kepentingan mengatur antara lain melarang setiap Perseroan memiliki saham atau melakukan investasi dengan badan usaha lain yang bermitra bisnis atau memiliki keterkaitan bisnis dengan Perseroan, memiliki usaha yang berhubungan langsung atau terkait dengan aktivitas Perseroan, merangkap bekerja di perusahaan lain atau memegang jabatan pada lembaga lembaga/institusi lain dalam bentuk apapun, kecuali telah mendapat persetujuan tertulis dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan melakukan perbuatan/tindakan atau menempatkan diri pada posisi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan antara dirinya dengan Perseroan, untuk menghindari konflik antara kepentingan pribadi dengan kepentingan Perseroan.

Sepanjang tahun 2017, tidak terdapat transaksi dengan benturan kepentingan, dengan demikian tidak ada kerugian atau hal yang mengurangi keuntungan.

KODE ETIK

Perseroan menyadari akan pentingnya arti implementasi GCG sebagai salah satu alat untuk berinteraksi & berkomunikasi yang etis, tidak hanya kepada Pemilik Modal (*shareholders*) namun juga segenap Pemangku Kepentingan (*stakeholders*). Oleh karena itu, Perseroan berkomitmen mengimplementasikan yang salah satunya dilakukan melalui penerapan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja (*Code of Conduct*) secara konsisten.

Face-to-Face Meeting with Employees

To build an effective and intense communication climate between the Management and all employees, a number of face-to-face activities were accommodated among others through Joint Morning Prayer activities, Division Coordination Meetings and Inter-Division Forums.

CONFLICTS OF INTERESTS WITH RELATED PARTIES

The policy regarding conflicts of interest is stipulated in the Good Corporate Governance Handbook which is ratified by Decree of the Board of Directors No. 067/KEPDIR/XII/2015 dated 23 December 2015 and Conflict of Interest Guidelines which were ratified by Decree of the Board of Directors No. 070/KEP-DIR/XII/2015 dated December 23, 2015. Conflict of interest policies, among others, prohibit all Company Employees from owning shares or investing with other business entities that have business partnerships or relationships with the Company, have businesses that are directly related to the activities of the Company, concurrently work in other companies or hold positions in institutions in any form, without written approval from the Board of Directors and/or the Board of Commissioners and carry out actions or hold positions that can cause a conflict of interest between themselves and the Company.

Throughout 2017, there were no transactions containing conflicts of interest, thus there are no losses incurred or things that might reduce profits.

CODE OF CONDUCT

The Company realizes the importance of implementing GCG as one of the tools to interact & communicate ethically, not only to shareholders but also to all stakeholders. Therefore, the Company is committed to implementing it through the application of Business Ethics and Code of Conduct, consistently.

Kebijakan Manajemen untuk hal tersebut adalah melalui surat keputusan Direksi 068/KEP-DIR/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015, tentang Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja (*Code of Conduct*) yang diberlakukan untuk seluruh individu yang bertindak atas nama PT Jaminan Pembiayaan Askindo Syariah, baik Dewan Komisaris, Direksi maupun Pegawai yang selanjutnya disebut Insan Perseroan, Pemegang Saham serta seluruh *stakeholder* atau mitra kerja yang melakukan transaksi bisnis dengan Perseroan.

Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja terdiri dari etika bisnis Perseroan dan Etika Kerja Insan Perseroan dari Jajaran Manajemen yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian tingkah laku sehingga tercapai keluaran yang konsisten yang sesuai dengan budaya Perseroan dalam mencapai visi dan misi Perseroan. Perseroan senantiasa mendorong kepatuhan terhadap standard etika dan berkomitmen untuk mengimplementasikannya, serta mewajibkan seluruh pimpinan dari setiap tingkatan dalam Perseroan, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pedoman etika bisnis dan etika kerja dipatuhi dan dijalankan dengan baik pada jajaran masing-masing.

Implementasi Kode Etik

Sebagai bentuk pernyataan bahwa pedoman Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja dipatuhi dan dijalankan dengan baik, maka kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan setiap individu (karyawan) diwajibkan untuk menandatangani pernyataan secara pribadi, setiap tahunannya.

Sosialisasi Kode Etik

Penyebaran *Code of Conduct* dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media seperti *website*, surat edaran dan sosialisasi kepada segenap Pegawai, Direksi & Dewan Komisaris.

PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI SELAMA 2017

Sepanjang tahun 2017, Perseroan tidak menghadapi perkara hukum baik oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun seluruh pegawai Perseroan.

INFORMASI SANKSI ADMINISTRATIF

Sepanjang 2017, Perseroan tidak mendapatkan sanksi adminstrasi yang dikenakan kepada Entitas, anggota

The Management's policy regarding this matter is outlined in the Decree of the Board of Directors 068/KEP-DIR/XII/2015 dated 23 December 2015, concerning the Code of Conduct which applies to all individuals acting on behalf of PT Askindo Syariah Financing Guarantee, both the Board of Commissioners, Directors and Employees, hereinafter referred to as Company Personnel, Shareholders and all stakeholders or business partners who conduct business transactions with the Company.

The Guidelines for Business Ethics and Work Ethics, which consist of the Company's business ethics and the Code of Conducts, are prepared to influence, shape and regulate behavior, so that output is consistent with the Company's culture in order to achieve the Company's vision and mission. The Company always encourages compliance with ethical standards and commits to its implementation, and requires all leaders from every level in the Company, to be responsible for ensuring that the guidelines are adhered to and executed properly in their respective sections.

Implementation of the Code of Conduct

As a form of statement that the guidelines for the Code of Business Ethics and Work Ethics are adhered to and executed properly, all members of the Board of Commissioners, Board of Directors and individuals (employees) are required to sign statements individually, annually.

Dissemination of the Code of Conduct

The dissemination of the Code of Conduct is done by utilizing various media such as websites, circulars and outreach to all employees, Directors & Board of Commissioners.

LEGAL CASES IN 2017

Throughout 2017, the Company did not face any legal cases either by members of the Board of Commissioners, Directors or all employees of the Company

INFORMATION ABOUT ADMINISTRATIVE SANCTIONS

Throughout 2017, the Company did not get administrative sanctions from related authorities (capital markets,

Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya).

PERNYATAAN ANTI GRATIFIKASI, KORUPSI DAN PENYUAPAN

Perseroan senantiasa melakukan sosialisasi atas program pengendalian gratifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan *board manual*, Perseroan menetapkan bahwa Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat satu level di bawah Direksi dilarang untuk memberikan atau menawarkan atau menerima baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada pejabat pemerintah dan pihak-pihak lain yang mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat satu level di bawah Direksi juga diwajibkan melaporkan harta kekayaan kepada Lembaga Pemerintah yang berwenang. Selain itu juga untuk senantiasa mencegah dan menghindarkan diri dari praktik-praktik korupsi, gratifikasi, dan penyupuan dalam cara dan bentuk apapun untuk kepentingan apapun yang diyakini dan dianggap dapat merugikan Perseroan.

PERNYATAAN PENOLAKAN PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN POLITIK

Sejalan dengan *board manual*, Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat satu level di bawah Direksi tidak diperkenankan menanggapi permintaan dari pihak manapun dan dengan alasan apapun, baik permintaan secara langsung dari pihak tertentu termasuk dan tidak terbatas pada pejabat/pegawai di lingkungan instansi Pemerintah dan partai politik yang berkaitan dengan permintaan sumbangan, termasuk yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Perseroan.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Perusahaan telah memiliki Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) sesuai Surat Keputusan Direksi No. 071/KEP-DIR/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015, yang merupakan dasar atau pedoman pelaksanaan dalam menangani Pelaporan Pelanggaran dari *stakeholders*. Pedoman ini menyediakan suatu panduan bagi Perseroan untuk membangun, menerapkan dan mengelola suatu Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) sehingga diharapkan

banking and others), imposed on Entities, or members of the Board of Commissioners and Directors.

ANTI GRATIFICATION, CORRUPTION AND BRIBERY STATEMENTS

The Company continues to socialize gratification control programs in accordance with applicable laws and regulations. Based on the manual board, the Company stipulates that the Board of Commissioners, the Board of Directors and officials of one level below the Board of Directors are prohibited from giving or offering or receiving directly or indirectly anything of value to government officials and other parties that influence or in return has been done and other actions are in accordance with the applicable laws and regulations.

The Board of Commissioners, the Board of Directors, and officials of one level below the Board of Directors are also required to report assets to the authorized Government Institutions, in order to prevent and avoid corruption, gratuity, and bribery in any way and any form for any interest that can be detrimental to the Company.

FUNDING FOR POLITICAL ACTIVITIES

In accordance with the manual board, the Board of Commissioners, the Board of Directors, and officials one level below the Board of Directors are not permitted to respond to any requests from any party and for any reason, directly from certain parties including and not limited to officials/employees of Government agencies and political parties, relating to donations, and the procurement of goods and services in the Company.

WHISTLE BLOWING SYSTEM

The Company has adopted the Whistle Blowing System according to Board of Directors Decree No. 071/KEP-DIR/XII/2015 dated December 23, 2015, which is the basis or guideline for implementation in handling violations from stakeholders. This guideline provides guidance for the Company to build, implement and manage a Violation Reporting System (WBS) so that this guideline is expected to provide benefits for improving the implementation of

pedoman ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan pelaksanaan *Corporate Governance* di Perseroan dan dapat meningkatkan tingkat partisipasi karyawan dalam melaporkan pelanggaran. Disamping itu, penyusunan pedoman ini juga sebagai acuan dalam tata cara pengelolaan.

Jumlah Pengaduan dan Tindak Lanjutnya pada 2017

Pada 2017, tidak terdapat laporan pelanggaran.

ROAD MAP TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perseroan menetapkan arah implementasi GCG dalam bentuk *roadmap* GCG yang diharapkan menjadi panduan dalam pelaksanaan implementasi GCG di seluruh tingkatan. *Roadmap* GCG diarahkan untuk menjadikan GCG sebagai acuan dalam setiap aktivitas operasional. Sasaran akhir *roadmap* GCG adalah terwujudnya PT Jaminan Pembiayaan Askindo Syariah sebagai *good corporate citizen*. Diharapkan dengan dicapainya sasaran akhir tersebut, Perseroan dapat meningkatkan dan mempertahankan kinerja secara berkesinambungan. *Roadmap* GCG Perseroan yang ditetapkan hingga beberapa tahun ke depan sebagai berikut:

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Sebagai wujud komitmen terhadap masyarakat dan sekitar, Perseroan mengintegrasikan program Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) sebagai bagian tak terpisahkan dari usaha yang dijalankan. Perseroan mengupayakan pemberian kontribusi yang nyata kepada masyarakat dan lingkungan dengan mengedepankan pertumbuhan bisnis yang bermanfaat (*profit*) sekaligus peduli terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat (*people*) dan terwujudnya lingkungan yang terjaga (*planet*).

Rencana Kerja, Anggaran dan Realisasi Program CSR Pada 2017

Pada tahun 2017, rencana kerja program CSR Perseroan terdiri dari pemberian bantuan untuk ambulan dan pemberian fasilitas kerja untuk SMKN.

Berdasarkan realiasinya hanya pemberian fasilitas untuk SMKN yang terlaksana dengan nilai Rp42.2 juta.

Corporate Governance in the Company and increasing the level of employee participation in reporting violations. In addition, this guideline also serves as reference for procedures for managing the WBS.

Number of Complaints and Follow Up in 2017

There were no reports of violation in 2017.

ROADMAP OF CORPORATE GOVERNANCE

The Company has prepared a GCG roadmap as a guideline for implementing GCG at all levels. The existence of this GCG Roadmap is directed at making GCG a reference in every operational activity. The final goal of the GCG roadmap is the realization of PT Jaminan Pembiayaan Askindo Syariah as a good corporate citizen. It is expected that by achieving these targets, the Company can improve and maintain its performance on an ongoing basis. The Company's GCG Roadmap for the next few years is as follows:

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Corporate social responsibility Policy

As a form of commitment to the surrounding community, the Company integrates its Corporate Social Responsibility (CSR) programs as an inseparable part of its business. The Company strives to make a real contribution to society and the environment by prioritizing profitable business growth (*profit*) while caring about improving the quality of life of the people (*people*) and preserving the environment (*planet*).

Work Plan, Budget and Realization of CSR Programs in 2017

In 2017, the work plan of the Company's CSR program consists of donating ambulances and providing job opportunities for Vocation Schools.

However, only donation of facilities worth Rp42.2 million for Vocation Schools is realized.

01 KINERJA PERUSAHAAN
TAHUN 2017
Company
Performance 2017

02 LAPORAN MANAJEMEN
Management's Report

03 PROFIL PERUSAHAAN
Company Profile

LAPORAN KEUANGAN

Financial Report



136



PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah

Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2017 dan 2016

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
DAFTAR ISI

Halaman

Laporan Auditor Independen

Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan PT Jaminan Pembiayaan Askindo Syariah untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016

LAPORAN KEUANGAN - Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Ekuitas	3
Laporan Arus Kas	4
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat	5
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	6
Catatan atas Laporan Keuangan	7

Laporan Auditor Independen

No. 05860918SA

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2017, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan, arus kas, sumber dan penyaluran dana zakat serta sumber dan penggunaan dana kebaikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lain

Laporan keuangan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sebelum direklasifikasi sebagaimana diungkapkan pada Catatan 32, diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 17 Februari 2017.

Laporan atas Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan

Laporan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern kami sampaikan secara terpisah kepada manajemen dalam laporan kami No. 05870918AK dan No. 05880918AK masing-masing tanggal 28 Februari 2018.

Hasil reviu Laporan Hasil Evaluasi Tingkat Kesehatan kami laporkan dalam laporan kami No. 05890918AK tanggal 28 Februari 2018.

MIRAWATI SENSI IDRIS



Jacinta Mirawati
Izin Akuntan Publik No. AP.0154

28 Februari 2018

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama
Alamat | : Soegiharto
: Gedung Primagraha Persada, Jalan Gedung
Kesenian, No.3-7, Jakarta Pusat, 10710 |
| Alamat Domisili/sesuai KTP atau Kartu Identitas lain | : Jalan Tebet Timur IVF No.1, Rt.008/Rw.008, Tebet
Timur, Tebet, Jakarta Selatan |
| Nomor Telepon
Jabatan | : 081210100190
: Direktur Utama |
| 2. Nama
Alamat Kantor | : Subagio Istiarno
: Gedung Primagraha Persada, Jalan Gedung
Kesenian, No.3-7, Jakarta Pusat, 10710 |
| Alamat Domisili/sesuai KTP atau Kartu Identitas lain | : Jalan Wirajasa III Blok N-8, Rt.010/Rw.007,
Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur |
| Nomor Telepon
Jabatan | : 081586408721
: Direktur Keuangan |

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016.
2. Laporan keuangan Perusahaan tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
b. Laporan keuangan Perusahaan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 28 Februari 2018 



Soegiharto
Direktur Utama

Subagio Istiarno
Direktur Keuangan

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH

Laporan Posisi Keuangan

31 Desember 2017 dan 2016

(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2017	2016
ASET			
Kas dan bank	4	35.762.042.033	7.427.003.051
Piutang ujrah - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp 903.972.817 pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016	5	5.913.042.609	9.671.534.114
Piutang ta'widh	6	8.379.785.803	1.606.427.204
Piutang investasi	7	153.183.255	155.903.945
Piutang lain-lain		-	29.476.969
Biaya dibayar dimuka	8	3.545.500.568	767.781.534
Pajak dibayar dimuka	9	3.962.957.690	1.097.457.811
Investasi	10		
Deposito berjangka mudharabah		248.800.000.000	268.250.000.000
Reksadana tersedia untuk dijual		70.084.943.750	59.487.433.372
Aset pajak tangguhan	27	2.080.512.450	116.110.886
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp 6.185.946.054 dan Rp 4.036.507.778 pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016	11	10.288.978.961	4.824.308.773
Biaya tangguhan - setelah dikurangi akumulasi amortisasi masing-masing sebesar Rp 2.790.390.774 dan Rp 1.426.820.723 pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016	12	1.934.340.771 449.250.000	2.688.119.779 1.087.690.465
Aset lain-lain			
JUMLAH ASET		391.354.537.890	357.209.247.905
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Utang ta'widh	15	8.318.944.590	2.368.985.673
Utang penjaminan ulang	16	6.419.384.348	54.800.615
Pendapatan ujrah diterima dimuka	17	12.036.803.894	12.769.248.738
Utang zakat	18	227.653.357	511.851.756
Utang pajak	19	473.594.157	196.461.562
Beban akrual	20	1.434.168.447	4.662.392.745
Estimasi ta'widh retensi sendiri	13	31.933.923.726	21.167.300.621
Estimasi ujrah yang belum merupakan pendapatan	14	16.810.740.881	9.372.950.892
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	26	2.282.340.604	1.273.612.176
Utang lain-lain		781.442.271	655.164.061
Jumlah Liabilitas		80.718.996.275	53.032.768.839
EKUITAS			
Modal ditempatkan dan disetor			
Modal dasar, ditempatkan, dan disetor -			
250.000 saham dengan nominal			
Rp 1.000.000 per saham	21	250.000.000.000	250.000.000.000
Cadangan umum	22	55.229.488.050	34.745.451.559
Saldo laba		5.321.109.949	19.938.819.135
Kenaikan (penurunan) surat berharga yang belum di realisasi		84.943.616	(507.791.628)
Jumlah Ekuitas		310.635.541.615	304.176.479.066
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		391.354.537.890	357.209.247.905

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2017	2016
PENDAPATAN KAFALAH			
Ujrah kafalah bruto		176.300.416.260	156.215.848.198
Beban penjaminan ulang		(46.710.916.973)	(38.605.917.821)
Penurunan ujrah yang belum merupakan pendapatan		(7.437.789.989)	(3.815.501.312)
Penerimaan kafalah lain		138.006.040	147.818.130
Jumlah Pendapatan Kafalah		<u>122.289.715.338</u>	<u>113.942.247.195</u>
BEBAN KAFALAH			
Ta'widh		63.632.635.278	37.298.363.927
Beban komisi		9.987.816.153	9.326.218.492
Pendapatan subrogasi		(6.201.009.224)	(3.337.028.771)
Kenaikan estimasi ta'widh retensi sendiri		10.766.623.105	7.557.434.788
Beban kafalah lain		2.413.243.331	2.330.937.154
Jumlah Beban Kafalah		<u>80.599.308.643</u>	<u>53.175.925.591</u>
Pendapatan Kafalah Bersih		<u>41.690.406.695</u>	<u>60.766.321.604</u>
NISBAH (BAGI HASIL) INVESTASI	23	16.965.151.640	15.612.896.835
BEBAN USAHA	24	<u>52.623.755.526</u>	<u>43.560.422.796</u>
LABA USAHA		6.031.802.809	32.818.795.643
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN - Bersih	25	<u>752.055.993</u>	<u>(7.556.142.887)</u>
LABA SEBELUM ZAKAT		6.783.858.802	25.262.652.756
Zakat		(169.596.470)	(631.566.319)
LABA SEBELUM PAJAK		<u>6.614.262.332</u>	<u>24.631.086.437</u>
BEBAN (MANFAAT) PAJAK	27		
Pajak kini		2.232.500.256	4.180.155.035
Pajak tangguhan		(1.844.442.480)	(33.105.089)
Beban Pajak - Bersih		<u>388.057.776</u>	<u>4.147.049.946</u>
LABA TAHUN BERJALAN		<u>6.226.204.556</u>	<u>20.484.036.491</u>
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN			
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti		(479.836.335)	(537.705.594)
Pajak sehubungan dengan pos yang tidak akan direklasifikasi		<u>119.959.084</u>	<u>-</u>
		(359.877.252)	(537.705.594)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi			
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas kenaikan nilai wajar investasi tersedia untuk dijual		<u>592.735.244</u>	<u>(512.566.628)</u>
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN - BERSIH		<u>232.857.992</u>	<u>(1.050.272.222)</u>
PENGHASILAN KOMPREHENSIF		<u>6.459.062.549</u>	<u>19.433.764.269</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

						Kenaikan (penurunan)	
						Surat Berharga yang Belum Direalisasi	Jumlah Ekuitas
Catatan	Modal Saham	Cadangan Umum	Saldo Laba				
						4.775.000	284.742.714.797
Saldo pada tanggal 1 Januari 2016			34.737.939.797				
Penghasilan komprehensif							
Laba tahun berjalan		-	20.484.036.491				20.484.036.491
Rugi komprehensif lain		-	(537.705.594)				(537.705.594)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti							
Kerugian yang belum direalisasi atas penurunan nilai wajar investasi tersedia untuk dijual		-	-			(512.566.628)	(512.566.628)
Jumlah penghasilan komprehensif			-			19.946.330.897	19.433.764.269
Pembentukan cadangan umum	22	-	34.745.451.559	(34.745.451.559)			-
Saldo pada tanggal 31 Desember 2016		250.000.000.000	34.745.451.559	19.938.819.135		(507.791.628)	304.176.479.066
Penghasilan komprehensif							
Laba tahun berjalan		-	-			6.226.204.556	6.226.204.556
Penghasilan (rugi) komprehensif lain							
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti		-	-			(359.877.252)	(359.877.252)
Keuntungan yang belum direalisasi atas kenaikan nilai wajar investasi tersedia untuk dijual		-	-				
Jumlah penghasilan komprehensif							
Pembentukan cadangan umum	22	-	-			5.866.327.305	592.735.244
Saldo pada tanggal 31 Desember 2017		250.000.000.000	55.229.488.050	5.321.109.949		84.943.616	310.635.541.615

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	2017	2016
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari kafalah	132.615.545.948	167.895.493.056
Penerimaan dari kafalah lain	138.006.040	147.818.130
Penerimaan kas dari hasil investasi	16.967.872.330	15.716.876.452
Penerimaan kas dari lain-lain	2.025.128.210	171.403.252
Pengeluaran beban kafalah	(63.719.000.872)	(95.597.344.724)
Pengeluaran untuk beban usaha	(55.217.830.543)	(43.228.190.505)
Pengeluaran lain-lain	(735.803.620)	(7.757.023.106)
Kas bersih dihasilkan dari operasi	<u>32.073.917.493</u>	<u>37.349.032.555</u>
Pengeluaran untuk pajak penghasilan	(5.098.000.135)	(9.999.763.310)
Pengeluaran untuk zakat	<u>(517.700.000)</u>	<u>(988.143.500)</u>
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	<u>26.458.217.358</u>	<u>26.361.125.744</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pencairan deposito berjangka	203.250.000.000	262.900.000.000
Pencairan investasi jangka pendek	24.402.489.622	3.090.479.256
Pengeluaran kas pembelian aset lain-lain	638.440.466	(229.356.278)
Pengeluaran kas untuk pembelian aset tetap	(7.614.108.464)	(3.783.370.220)
Penempatan investasi jangka pendek	(35.000.000.000)	(37.573.137.628)
Penempatan deposito berjangka	<u>(183.800.000.000)</u>	<u>(250.400.000.000)</u>
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	<u>1.876.821.624</u>	<u>(25.995.384.870)</u>
KENAIKAN KAS DAN SETARA KAS		
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	<u>28.335.038.982</u>	<u>365.740.874</u>
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	<u>35.762.042.033</u>	<u>7.427.003.051</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2017	2016
Sumber Dana Zakat			
Zakat dari dalam Pembiayaan Syariah		169.596.470	631.566.319
Zakat dari karyawan		63.905.131	-
Jumlah sumber dana Zakat		233.501.601	631.566.319
Penyaluran Dana Zakat kepada entitas pengelola zakat			
		(517.700.000)	(988.143.500)
Penurunan dana Zakat		(284.198.399)	(356.577.181)
Saldo awal dana Zakat		511.851.756	868.428.937
Saldo akhir dana Zakat	18	227.653.357	511.851.756

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	2017	2016
Sumber Dana Kebajikan		
Pendapatan non halal		
Penggunaan Dana Kebajikan		
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	-	-
Kenaikan (penurunan) dana kebajikan	-	-
Saldo awal tahun dana kebajikan	-	-
Saldo akhir tahun dana Kebajikan	-	-

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

1. Umum

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (Perusahaan) didirikan berdasarkan Akta No. 45 tanggal 29 November 2012 oleh Hadijah, SH., notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-61610.AH.01.01 Tanggal 3 Desember 2012. Akta Pendirian tersebut telah diubah dan perubahan terakhir dengan Akta No. 45 tanggal 17 November 2017 oleh Hadijah, SH., notaris di Jakarta, mengenai perubahan susunan dewan direksi Perusahaan.

Sesuai dengan pasal 3 dari Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama meliputi penjaminan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.

Perusahaan tergabung dalam kelompok usaha PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero). Perusahaan memulai usahanya secara komersial pada bulan Desember 2012. Kantor pusat Perusahaan terletak di Gedung Primagraha Lantai 1 Jl. Gedung Kesenian No. 3 – 7, Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710. Perusahaan memiliki 3 kantor cabang yang terletak di Jakarta dan Bandung.

b. Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan tanggal 17 November 2017 dan 14 Juni 2016 yang masing-masing didokumentasikan dalam Akta No. 45 dan No. 24 dari Hadijah, S.H., notaris di Jakarta, susunan pengurus Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Komisaris Utama	: Budi Wisakseno	Budi Wisakseno
Komisaris	: Yulison Marpaung	Yulison Marpaung
Direktur Utama	: Pribadi	Pribadi
Direktur Keuangan	: Subagio Istiarno	Muhammad Effendi Nasution
Direktur Pemasaran	: Supardi Najamuddin	Meivyta Belani Husman

Susunan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut :

2017 dan 2016		
Ketua	:	Ichwan Sam
Anggota	:	Daud Rasyid
	:	Muhammad Zubair

Personel manajemen kunci Perusahaan terdiri dari Komisaris dan Direksi.

Jumlah rata-rata karyawan Perusahaan (tidak diaudit) adalah 131 karyawan tahun 2017 dan 123 karyawan tahun 2016.

Laporan keuangan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi pada tanggal 29 Maret 2018. Direksi Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut.

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI.

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

b. Penjabaran Mata Uang Asing

Mata Uang Fungsional dan Pelaporan

Akun-akun yang tercakup dalam laporan keuangan diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional).

Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan mata uang penyajian Perusahaan.

Transaksi dan Saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan kedalam mata uang fungsional menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dan dari penjabaran pada kurs akhir tahun atas aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, kurs konversi yakni kurs tengah Bank Indonesia yang digunakan oleh Perusahaan masing-masing adalah Rp 13.548 dan Rp 13.436 untuk per 1 Dolar Amerika Serikat (USD).

c. Transaksi Pihak Berelasi

Orang atau entitas dikategorikan sebagai pihak berelasi Perusahaan apabila memenuhi definisi pihak berelasi berdasarkan PSAK No. 7 "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Semua transaksi signifikan dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

d. Kas dan Bank

Kas dan Bank terdiri dari kas dan bank yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi pencairannya.

e. Instrumen Keuangan

Pembelian atau penjualan yang regular atas instrumen keuangan diakui pada tanggal transaksi.

Instrumen keuangan pada pengakuan awal diukur pada nilai wajarnya, yang merupakan nilai wajar kas yang diserahkan (dalam hal aset keuangan) atau yang diterima (dalam hal liabilitas keuangan). Nilai wajar ditentukan dengan mengacu pada harga transaksi atau harga pasar yang berlaku. Jika harga pasar tidak dapat ditentukan dengan andal, maka nilai wajar dihitung berdasarkan estimasi jumlah seluruh pembayaran atau penerimaan kas masa depan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga pasar yang berlaku untuk instrumen sejenis dengan jatuh tempo yang sama atau hampir sama. Pengukuran awal instrumen keuangan termasuk biaya transaksi, kecuali untuk instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Biaya transaksi diamortisasi sepanjang umur instrumen menggunakan metode suku bunga efektif.

Pengklasifikasian instrumen keuangan dilakukan berdasarkan tujuan perolehan instrumen tersebut dan mempertimbangkan apakah instrumen tersebut memiliki kuotasi harga di pasar aktif.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perusahaan hanya memiliki instrumen keuangan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang, aset keuangan tersedia untuk dijual dan liabilitas keuangan lain-lain. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi tentang aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi tidak diungkapkan.

Aset Keuangan

1. Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, kategori ini meliputi kas dan bank, piutang lain-lain, dan aset lain-lain – uang jaminan yang dimiliki oleh Perusahaan.

2. Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual

Aset keuangan tersedia untuk dijual merupakan aset yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau tidak diklasifikasikan dalam kategori instrumen keuangan yang lain, dan selanjutnya diukur pada nilai wajar, dengan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi diakui pada bagian ekuitas sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuan atau dianggap telah mengalami penurunan nilai, dimana pada saat itu akumulasi keuntungan atau kerugian direklasifikasi ke laba rugi.

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, kategori ini meliputi investasi Perusahaan dalam reksadana.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas Keuangan Lain-lain

Kategori ini merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Instrumen keuangan yang diterbitkan atau komponen dari instrumen keuangan tersebut, yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain-lain, jika substansi perjanjian kontraktual mengharuskan Perusahaan untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pemegang instrumen keuangan, atau jika liabilitas tersebut diselesaikan tidak melalui penukaran kas atau aset keuangan lain atau saham sendiri yang jumlahnya tetap atau telah ditetapkan.

Liabilitas keuangan lain-lain selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi berdasarkan suku bunga efektif.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, kategori ini meliputi utang penjaminan ulang, utang lain-lain dan beban akrual yang dimiliki oleh Perusahaan.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Perusahaan saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Penurunan Nilai Aset Keuangan pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, manajemen Perusahaan menelaah apakah suatu aset keuangan atau kelompok aset keuangan telah mengalami penurunan nilai.

1. Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Manajemen pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika manajemen menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik aset keuangan tersebut signifikan atau tidak signifikan, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Jika terdapat bukti obyektif bahwa rugi penurunan nilai telah terjadi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat asset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari asset tersebut. Nilai tercatat asset tersebut langsung dikurangi dengan penurunan nilai yang terjadi atau menggunakan akun cadangan dan jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laba rugi.

Jika, pada tahun berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka dilakukan penyesuaian atas cadangan kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui. Pemulihan penurunan nilai selanjutnya diakui dalam laba rugi, dengan ketentuan nilai tercatat asset setelah pemulihan penurunan nilai tidak melampaui biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan tersebut.

2. Aset keuangan tersedia untuk dijual

Dalam hal instrumen ekuitas dalam kelompok tersedia untuk dijual, penelaahan penurunan nilai ditandai dengan penurunan nilai wajar dibawah biaya perolehannya yang signifikan dan berkelanjutan. Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka kerugian penurunan nilai kumulatif yang dihitung dari selisih antara biaya perolehan dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai yang sebelumnya telah diakui dalam laba rugi, dikeluarkan dari ekuitas dan diakui dalam laba rugi. Kerugian penurunan nilai tidak boleh dipulihkan melalui laba rugi. Kenaikan nilai wajar setelah terjadinya penurunan nilai diakui di ekuitas.

Dalam hal instrumen utang dalam kelompok tersedia untuk dijual, penurunan nilai ditelaah berdasarkan kriteria yang sama dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Bunga tetap diakru berdasarkan suku bunga efektif asal yang diterapkan pada nilai tercatat asset yang telah diturunkan nilainya, dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga. Jika, pada tahun berikutnya, nilai wajar instrumen utang meningkat dan peningkatan nilai wajar tersebut karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui dalam laba rugi, maka penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan melalui laba rugi.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas keuangan

1. Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuan jika:

- (a) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- (b) Perusahaan tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- (c) Perusahaan telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

2. Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

f. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

g. Aset Tetap

Pemilikan Langsung

Aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan berdasarkan biaya perolehan, tetapi tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada. Tanah tidak disusutkan dan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

Biaya perolehan juga termasuk biaya pembongkaran, pemindahan atau restorasi aset tetap tertentu.

Beban-beban yang timbul setelah aset tetap digunakan, seperti beban perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan ke laba rugi pada saat terjadinya. Apabila beban-beban tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa datang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus (*straight-line method*) selama masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan dan renovasi	8 - 20
Peralatan komputer	4
Peralatan non komputer	4
Perabot kantor	8

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

Dalam setiap inspeksi yang signifikan, biaya inspeksi diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian apabila memenuhi kriteria pengakuan. Biaya inspeksi signifikan yang dikapitalisasi tersebut diamortisasi selama periode sampai dengan saat inspeksi signifikan berikutnya.

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya (*derecognized*) pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap diakui dalam laba rugi pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan dan amortisasi ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan estimasi sebelumnya.

h. Transaksi Sewa

Penentuan apakah suatu kontrak merupakan atau mengandung unsur sewa adalah berdasarkan substansi kontrak pada tanggal awal sewa, yakni apakah pemenuhan syarat kontrak tergantung pada penggunaan aset tertentu dan kontrak tersebut berisi hak untuk menggunakan aset tersebut.

Sewa Operasi

Perlakuan Akuntansi untuk Lessee

Sewa dimana seluruh resiko dan manfaat dari kepemilikan aset tersebut tidak di transfer ke Perusahaan telah diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dalam laba rugi dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa.

i. Biaya Tangguhan

Perangkat Lunak

Biaya yang dibayarkan atas layanan piranti lunak komputer ditangguhkan dan diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama periode perjanjian.

j. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan tahunan, Perusahaan menelaah apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat uji tahunan penurunan nilai aset perlu dilakukan, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dinyatakan mengalami penurunan nilai dan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Penelaahan dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan untuk mengetahui apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai aset yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka Perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang diakui dalam periode sebelumnya akan dipulihkan apabila nilai tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun nilai tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun-tahun sebelumnya. Setelah pemulihan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan nilai tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

k. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan Ujrah

Pendapatan ujrah diakui dan dicatat sebagai pendapatan ujrah pada saat sertifikat penjaminan direalisasi berdasarkan nota penutupan sertifikat penjaminan. Pendapatan ujrah diakui sebagai pendapatan selama periode polis berdasarkan proporsi risiko atau proporsi jangka waktu proteksi yang diberikan.

Ujrah yang belum merupakan pendapatan diakui sebesar ujrah neto sesuai dengan proporsi harian sampai dengan periode kafalah berakhir.

Kenaikan atau penurunan ujrah yang belum merupakan pendapatan merupakan selisih antara saldo ujrah yang belum merupakan pendapatan tahun berjalan dan tahun lalu.

Beban Ta'widh

Beban ta'widh merupakan klaim atas penjaminan yang terdiri atas ta'widh disetujui, ta'widh dalam proses penyelesaian termasuk ta'widh yang terjadi namun belum dilaporkan, dan beban penyelesaian ta'widh. Beban ta'widh tersebut diakui pada saat timbulnya kewajiban untuk memenuhi ta'widh. Pendapatan ta'widh penjaminan ulang diakui dan dicatat sebagai pengurang beban ta'widh pada periode yang sama dengan periode pengakuan beban ta'widh. Hak subrogasi diakui sebagai pengurang beban ta'widh pada saat realisasi.

Jumlah ta'widh dalam proses penyelesaian (estimasi ta'widh retensi sendiri) dihitung berdasarkan estimasi kerugian retensi sendiri dari ta'widh yang pada tanggal laporan posisi keuangan masih dalam proses penyelesaian, termasuk ta'widh yang sudah terjadi namun belum dilaporkan. Perubahan dalam estimasi ta'widh retensi sendiri diakui dalam laba rugi di periode terjadinya perubahan. Kenaikan (penurunan) estimasi ta'widh retensi sendiri adalah selisih antara ta'widh retensi sendiri tahun berjalan dengan tahun lalu.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan, lembaga penjamin wajib membentuk cadangan klaim paling sedikit 0,01% dari nilai penjaminan yang ditanggung sendiri atau penjumlahan dari 100% dari nilai penjaminan yang ditanggung sendiri pada saat klaim dilaporkan, dengan klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (*incurred but not reported*) atau klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (*incurred but not reported*) dihitung berdasarkan rata-rata klaim ditanggung sendiri yang telah dibayarkan pada 3 bulan terakhir.

I. Beban Usaha

Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

m. Hasil Investasi

Hasil investasi dari nisbah bagi hasil deposito berjangka dan reksadana syariah diakui atas dasar proporsional waktu dan bagi hasil sesuai dengan akad yang berlaku.

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

n. Imbalan Kerja

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui sebesar jumlah yang tak-terdiskonto sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan setelah dikurangi dengan jumlah yang telah dibayar dan sebagai beban dalam laba rugi.

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang merupakan imbalan pasca-kerja manfaat pasti yang dibentuk tanpa pendanaan khusus dan didasarkan pada masa kerja dan jumlah penghasilan karyawan pada saat pensiun yang dihitung menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti langsung diakui dalam laporan posisi keuangan dan penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, namun menjadi bagian dari saldo laba. Biaya liabilitas imbalan pasti lainnya terkait dengan program imbalan pasti diakui dalam laba rugi.

o. Pajak Penghasilan

Pajak Kini

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui sebagai liabilitas jika terdapat perbedaan temporer kena pajak yang timbul dari perbedaan antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan jumlah tercatatnya pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. Aset pajak tangguhan diakui dan direviu pada setiap tanggal pelaporan atau diturunkan jumlah tercatatnya, sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak tersedia untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (atau peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus jika dan hanya jika, terdapat hak yang dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan pajak tangguhan tersebut terkait dengan entitas kena pajak yang sama dan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

p. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Perusahaan pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi Manajemen

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 pada laporan keuangan, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut, berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 55. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

b. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang dipelihara pada jumlah yang menurut manajemen adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

Cadangan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Suatu evaluasi atas piutang, yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Nilai tercatat pinjaman yang diberikan dan piutang Perusahaan tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Kas dan bank	35.762.042.033	7.427.003.051
Piutang lain-lain	-	29.476.969
Aset lain-lain - uang jaminan	<u>177.000.000</u>	<u>15.000.000</u>
Jumlah	<u>35.939.042.033</u>	<u>7.471.480.020</u>

c. Komitmen Sewa

Komitmen sewa operasi - Perusahaan sebagai lessee

Perusahaan telah menandatangani perjanjian sewa ruangan. Perusahaan menentukan bahwa sewa tersebut adalah sewa operasi karena Perusahaan tidak menanggung secara signifikan seluruh risiko dan manfaat dari kepemilikan aset-aset tersebut.

d. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi:

a. Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap

Masa manfaat dari masing-masing aset tetap Perusahaan diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal, dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang secara teknis atau komersial, serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset. Dengan demikian, hasil operasi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

Nilai tercatat aset tetap pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp 10.288.978.961 dan Rp 4.824.308.773 (Catatan 11).

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

b. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Perusahaan.

Nilai tercatat aset non-keuangan tersebut pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Aset tetap (Catatan 11)	10.288.978.961	4.824.308.773
Biaya tangguhan (Catatan 12)	<u>1.934.340.771</u>	<u>2.688.119.779</u>
Jumlah	<u>12.223.319.732</u>	<u>7.512.428.553</u>

c. Estimasi Ta'widh Retensi Sendiri

Estimasi ta'widh retensi sendiri merupakan pembentukan cadangan teknis yang digunakan untuk mencatat estimasi retensi sendiri atas kemungkinan ta'widh yang berpotensi menjadi beban dimasa mendatang berdasarkan estimasi wajar. Pembentukan estimasi ta'widh retensi sendiri dilakukan dengan melakukan estimasi atas ta'widh yang sudah diajukan namun masih dalam proses penyelesaian dan ta'widh yang sudah terjadi namun belum dilaporkan (*incurred but not reported/IBNR*).

Cadangan ta'widh pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp 31.933.923.726 dan Rp 21.167.300.621 (Catatan 13).

d. Estimasi Ujrah Yang Belum Merupakan Pendapatan

Perhitungan ujrah kafalah yang belum merupakan pendapatan terkait dan disesuaikan dengan ujrah kafalah yang telah diakui sebagai pendapatan. Masa pengakuan pendapatan ujrah kafalah adalah lama masa proteksi ditambah 1 (satu) tahun untuk masa hak pengajuan ganti rugi. Pengakuan pendapatan atas ujrah kafalah tersebut dilakukan sesuai dengan proporsi risiko atau proporsi jangka waktu proteksi yang diberikan. Bagian ujrah kafalah yang sudah diterima namun belum dapat diakui sebagai pendapatan karena pertimbangan tersebut, diakui sebagai pendapatan ujrah kafalah yang belum merupakan pendapatan dan dicatat dikelompok liabilitas.

Cadangan ujrah pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp 16.810.740.881 dan Rp 9.372.950.892 (Catatan 14).

e. Imbalan Kerja Jangka Panjang

Penentuan liabilitas imbalan kerja jangka panjang dipengaruhi oleh asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah tersebut. Asumsi-asumsi tersebut dijelaskan dalam Catatan 26 dan mencakup, antara lain, tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi Perusahaan diakumulasi dan diamortisasi ke masa depan dan oleh karena itu, secara umum berdampak pada beban yang diakui dan liabilitas yang tercatat pada periode-periode mendatang. Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan adalah tepat dan wajar, namun demikian, perbedaan signifikan pada hasil aktual, atau perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah liabilitas imbalan kerja jangka panjang.

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, liabilitas imbalan kerja jangka panjang masing-masing sebesar Rp 2.282.340.604 dan Rp 1.273.612.176 (Catatan 26).

f. Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika besar kemungkinan bahwa jumlah laba kena pajak akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu realisasinya dan jumlah laba kena pajak pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan.

Pada tanggal tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, nilai tercatat aset pajak tangguhan masing-masing sebesar Rp 2.080.512.450 dan Rp 116.110.886 (Catatan 27).

4. Kas dan Bank

	2017	2016
Kas	<u>65.193.630</u>	<u>82.664.703</u>
Bank		
Rupiah		
Pihak berelasi (Catatan 28)		
PT Bank BRI Syariah	2.997.716.111	1.605.030.585
PT Bank Syariah Mandiri	1.559.333.328	1.947.823.693
PT Bank BNI Syariah	396.316.174	512.901.479
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Syariah	<u>58.174.225</u>	<u>124.941.293</u>
Jumlah	<u>5.011.539.837</u>	<u>4.190.697.050</u>
Pihak ketiga		
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	27.359.593.096	616.800.874
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung - Unit Syariah	756.642.019	330.568.933
PT BPD Nusa Tenggara Barat - Unit Syariah	680.698.943	648.560.063
PT BPD Jawa Tengah - Unit Syariah	644.719.294	163.221.698
PT Bank Victoria Syariah	327.522.970	11.264.000
PT BPD Sumatera Barat - Unit Syariah	181.241.765	42.242.484
PT Bank Jabar Banten Syariah	143.243.082	759.295.800
PT BPD Kalimantan Selatan - Unit Syariah	109.830.812	45.780.306
PT Bank Syariah Bukopin	68.311.876	66.683.353
PT BPD Jawa Timur Tbk - Unit Syariah	67.645.238	28.597.548
PT BPRS Dinar Asri	41.407.375	33.679.048
PT BPD Sumatera Utara - Unit Syariah	28.680.443	20.575.792
PT Bank Panin Syariah	20.645.175	21.282.380
PT Bank Mega Syariah	4.120.506	4.379.874
PT Bank Maybank Syariah Indonesia	3.413.020	4.163.020
PT BPD Sulawesi Selatan dan Barat - Unit Syariah	-	111.000.000
Jumlah	<u>30.437.715.614</u>	<u>2.908.095.173</u>

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	2017	2016
Bank		
Dolar Amerika Serikat		
Pihak berelasi (Catatan 28)		
PT Bank BNI Syariah	247.592.952	245.546.125
Jumlah	<u>35.762.042.033</u>	<u>7.427.003.051</u>

5. Piutang Ujrah

	2017	2016
Pihak berelasi (Catatan 28)		
PT Bank BRI Syariah	2.467.237.669	1.966.791.930
PT Bank Syariah Mandiri	1.502.557.649	3.362.872.336
PT Bank BNI Syariah	248.246.603	436.432.821
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	133.602.694	22.081.921
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Syariah	187.255.450	1.359.009.510
Kementerian Pertanian	<u>131.077.113</u>	-
Jumlah	<u>4.669.977.178</u>	<u>7.147.188.518</u>
Pihak ketiga		
PT BPD Kalimantan Selatan - Unit Syariah	1.179.902.767	16.430.700
PT BPD Sulawesi Selatan dan Barat - Unit Syariah	336.356.522	432.653.875
PT BPRS Bhakti Sumekar	215.340.451	-
PT BPRS Dinar Asri	120.093.278	6.562.850
PT Bank Jabar Banten Syariah	106.723.750	473.491.767
Lain-lain (dibawah 100 juta)	188.621.480	2.499.179.220
Jumlah	<u>2.147.038.248</u>	<u>3.428.318.413</u>
Jumlah	<u>6.817.015.426</u>	<u>10.575.506.931</u>
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(903.972.817)</u>	<u>(903.972.817)</u>
Jumlah	<u>5.913.042.609</u>	<u>9.671.534.114</u>

Piutang ujrah Perusahaan tahun berjalan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 berumur 1-30 hari.

Berdasarkan evaluasi manajemen terhadap kolektibilitas saldo masing-masing piutang ujrah pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai memadai untuk menutup kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang usaha tersebut.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko terkonsentrasi secara signifikan atas piutang dari pihak ketiga.

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

6. Piutang Ta'widh

	2017	2016
Pihak berelasi (Catatan 28)		
PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	7.091.416.074	-
PT Reasuransi Syariah Indonesia	1.104.213.834	1.606.427.204
PT Asuransi BRI Life	<u>178.525.784</u>	-
Jumlah	<u>8.374.155.692</u>	<u>1.606.427.204</u>
Pihak ketiga		
PT Asuransi Bumiputeramuda 1967	<u>5.630.111</u>	-
Jumlah	<u>8.379.785.803</u>	<u>1.606.427.204</u>

Piutang ta'widh Perusahaan tahun berjalan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 berumur 1-60 hari.

Tidak dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang ta'widh karena manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko terkonsentrasi secara signifikan atas piutang dari pihak ketiga.

7. Piutang Investasi

Akun ini merupakan bagi hasil investasi deposito masing-masing sebesar Rp 153.183.255 pada tanggal 31 Desember 2017 dan Rp 155.903.945 pada tanggal 31 Desember 2016.

8. Biaya Dibayar Dimuka

	2017	2016
Sewa	2.746.663.718	436.208.334
Asuransi	745.356.850	224.623.200
Uang muka kerja	<u>53.480.000</u>	<u>106.950.000</u>
Jumlah	<u>3.545.500.568</u>	<u>767.781.534</u>

9. Pajak Dibayar Dimuka

	2017	2016
Pajak penghasilan pasal 28a (Catatan 27)		
Tahun 2017	2.865.499.879	-
Tahun 2016	<u>1.097.457.811</u>	<u>1.097.457.811</u>
Jumlah	<u>3.962.957.690</u>	<u>1.097.457.811</u>

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

10. Investasi

a. Deposito Berjangka Mudharabah

	2017	2016
Pihak berelasi (Catatan 28)		
PT Bank Syariah Mandiri	89.700.000.000	80.650.000.000
PT Bank BNI Syariah	52.900.000.000	49.500.000.000
PT Bank BRI Syariah	45.000.000.000	45.200.000.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Syariah	<u>10.500.000.000</u>	<u>11.000.000.000</u>
Jumlah	<u>198.100.000.000</u>	<u>186.350.000.000</u>
Pihak ketiga		
PT BPD Nusa Tenggara Barat - Unit Syariah	11.200.000.000	11.000.000.000
PT Bank Syariah Bukopin	10.000.000.000	1.500.000.000
PT Bank Victoria Syariah	7.500.000.000	-
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	6.500.000.000	14.000.000.000
PT BPD Jawa Tengah - Unit Syariah	5.500.000.000	5.000.000.000
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung - Unit Syariah	4.500.000.000	3.500.000.000
PT BPD Jawa Timur Tbk - Unit Syariah	2.000.000.000	13.000.000.000
PT BPD Kalimantan Selatan - Unit Syariah	1.000.000.000	2.000.000.000
PT BPD Sumatera Barat - Unit Syariah	1.000.000.000	1.000.000.000
PT BPD Kalimantan Barat - Unit Syariah	1.000.000.000	-
PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta - Unit Syariah	500.000.000	500.000.000
PT Bank Panin Syariah	-	22.400.000.000
PT Bank Mega Syariah	-	6.000.000.000
PT Bank Maybank Syariah Indonesia	-	1.000.000.000
PT Bank Kalimantan Timur - Unit Syariah	-	1.000.000.000
Jumlah	<u>50.700.000.000</u>	<u>81.900.000.000</u>
Jumlah	<u>248.800.000.000</u>	<u>268.250.000.000</u>

b. Reksadana Tersedia Untuk Dijual

	2017		
	Jumlah unit	Biaya Perolehan	Keuntungan yang belum Direalisasi
Reksadana Sukuk Negara Syariah	60.076.718	60.000.000.134	60.076.441.750
Terproteksi PNM Investa 12 Syariah	<u>10.000.000</u>	<u>10.000.000.000</u>	<u>10.008.502.000</u>
Jumlah	<u>70.076.718</u>	<u>70.000.000.134</u>	<u>70.084.943.750</u>
			76.441.616 8.502.000 <u>84.943.616</u>

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	2016			Keuntungan (Kerugian) yang belum Direalisasi
	Jumlah unit	Biaya Perolehan	Nilai Wajar	
Reksadana PNM Ekuitas Syariah	25.000.000	25.000.000.000	25.021.432.500	21.432.500
Reksadana Sukuk Negara Syariah	35.076.718	35.000.000.000	34.466.000.872	(533.999.128)
Jumlah	<u>60.076.718</u>	<u>60.000.000.000</u>	<u>59.487.433.372</u>	<u>(512.566.628)</u>

11. Aset Tetap

	1 Januari 2017	Perubahan selama tahun 2017		31 Desember 2017
		Penambahan	Pengurangan	
Biaya perolehan:				
Pemilikan langsung				
Tanah	-	4.150.998.529	-	4.150.998.529
Bangunan dan renovasi	1.043.424.928	2.401.626.360	-	3.445.051.288
Peralatan komputer	5.932.135.428	208.250.000	-	6.140.385.428
Peralatan non komputer	589.313.435	98.965.900	-	688.279.335
Perabot kantor	1.295.942.760	754.267.675	-	2.050.210.435
Jumlah	<u>8.860.816.551</u>	<u>7.614.108.464</u>	<u>-</u>	<u>16.474.925.015</u>
Akumulasi penyusutan:				
Pemilikan langsung				
Bangunan dan renovasi	232.794.247	562.681.038	-	795.475.285
Peralatan komputer	3.047.973.623	1.251.419.108	-	4.299.392.731
Peralatan non komputer	408.810.235	100.036.420	-	508.846.655
Perabot kantor	346.929.673	235.301.710	-	582.231.383
Jumlah	<u>4.036.507.778</u>	<u>2.149.438.276</u>	<u>-</u>	<u>6.185.946.054</u>
Nilai Tercatat	<u>4.824.308.773</u>			<u>10.288.978.961</u>
	1 Januari 2016	Perubahan selama tahun 2016		31 Desember 2016
		Penambahan	Pengurangan	
Biaya perolehan:				
Pemilikan langsung				
Bangunan dan renovasi	494.149.528	802.220.270	(252.944.870)	1.043.424.928
Peralatan komputer	3.925.018.528	2.228.430.000	(221.313.100)	5.932.135.428
Peralatan non komputer	452.139.735	202.058.500	(64.884.800)	589.313.435
Perabot kantor	745.997.210	550.661.450	(715.900)	1.295.942.760
Jumlah	<u>5.617.305.001</u>	<u>3.783.370.220</u>	<u>(539.858.670)</u>	<u>8.860.816.551</u>
Akumulasi penyusutan:				
Pemilikan langsung				
Bangunan dan renovasi	134.814.332	99.493.170	(1.513.255)	232.794.247
Peralatan komputer	2.032.522.433	1.085.225.820	(69.774.630)	3.047.973.623
Peralatan non komputer	262.916.973	176.152.353	(30.259.091)	408.810.235
Perabot kantor	191.325.267	155.604.406	-	346.929.673
Jumlah	<u>2.621.579.005</u>	<u>1.516.475.749</u>	<u>(101.546.976)</u>	<u>4.036.507.778</u>
Nilai Tercatat	<u>2.995.725.996</u>			<u>4.824.308.773</u>

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Jumlah penyusutan yang dibebankan pada beban usaha masing-masing adalah sebesar Rp 2.149.438.276 dan Rp 1.516.475.749 pada tahun 2017 dan 2016 (Catatan 24).

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset tersebut pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Perusahaan memiliki sebidang tanah yang terletak di Medan, Sumatera Utara dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan yang dapat diperbarui dan berjangka waktu dua puluh (20) tahun yang akan jatuh tempo tahun 2037. Berdasarkan data tersebut, Manajemen berkeyakinan bahwa HGB akan dapat diperpanjang pada akhir periode HGB, karena masing-masing tanah diperoleh secara legal dan didukung oleh bukti kepemilikan yang memadai.

Aset tetap Perusahaan berupa bangunan, telah diasuransikan kepada PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia, pihak ketiga, terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp 829.810.000 di tahun 2017 dan nihil di tahun 2016. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

12. Biaya Tangguhan

	2017	2016
Perangkat lunak	4.724.731.545	4.114.940.502
Amortisasi perangkat lunak	<u>(2.790.390.774)</u>	<u>(1.426.820.723)</u>
Jumlah	<u>1.934.340.771</u>	<u>2.688.119.779</u>

Beban amortisasi perangkat lunak yang dibebankan pada beban usaha masing-masing adalah sebesar Rp 1.363.570.051 dan Rp 498.439.549 pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 (Catatan 24).

13. Estimasi Ta'widh Retensi Sendiri

Estimasi ta'widh retensi sendiri masing-masing sebesar Rp 31.933.923.726 dan Rp 21.167.300.621 pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Dalam estimasi ta'widh retensi sendiri termasuk estimasi atas ta'widh yang sudah terjadi namun belum dilaporkan (IBNR) masing-masing sebesar Rp 6.039.709.198 dan nihil pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

14. Estimasi Ujrah Yang Belum Merupakan Pendapatan

Estimasi ujrah yang belum merupakan pendapatan masing-masing sebesar Rp 16.810.740.881 dan Rp 9.372.950.892 pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

15. Utang Ta'widh

	2017	2016
Pihak berelasi (Catatan 28)		
PT Bank Syariah Mandiri	4.113.283.290	1.666.637.288
PT Bank BRI Syariah	2.670.908.949	450.204.835
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	49.820.550	-
PT Bank BNI Syariah	41.666.667	-
Jumlah	<u>6.875.679.456</u>	<u>2.116.842.123</u>
Pihak ketiga		
PT BPRS Haris Insan Karimah	679.086.932	132.853.843
PT Bank Jabar Banten Syariah	623.583.085	-
PT BPD Sumatera Barat - Unit Syariah	96.406.556	-
PT BPD Nusa Tenggara Barat - Unit Syariah	40.647.299	-
PT BPD Jawa Timur Tbk - Unit Syariah	3.541.263	88.213.622
PT BPD Jawa Tengah - Unit Syariah	-	31.076.085
Jumlah	<u>1.443.265.134</u>	<u>252.143.550</u>
Jumlah	<u>8.318.944.590</u>	<u>2.368.985.673</u>

16. Utang Penjaminan Ulang

a. Berdasarkan reasuradur:

	2017	2016
Pihak berelasi (Catatan 28)		
PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	3.515.421.315	47.500.000
PT Reasuransi Syariah Indonesia	1.700.752.703	-
PT Reasuransi Nasional Indonesia -		
Unit Syariah	1.097.636.284	7.300.615
PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero)	20.115.000	-
Jumlah	<u>6.333.925.302</u>	<u>54.800.615</u>
Pihak ketiga		
PT Avrist Assurance	85.459.046	-
Jumlah	<u>6.419.384.348</u>	<u>54.800.615</u>

b. Berdasarkan umur (hari):

	2017	2016
1 - 60 hari	6.313.810.302	54.800.615
Lebih dari 60 hari	105.574.046	-
Jumlah	<u>6.419.384.348</u>	<u>54.800.615</u>

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

17. Pendapatan Ujrah Diterima Dimuka

Pendapatan ujrah diterima dimuka masing-masing sebesar Rp 12.036.803.894 dan Rp 12.769.248.738 pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

18. Utang Zakat

Akun ini merupakan saldo utang zakat yang besarnya 2,5% dari penghasilan Perusahaan masing-masing sebesar Rp 227.653.357 dan Rp 511.851.756 pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

19. Utang Pajak

	2017	2016
Pajak penghasilan		
Pasal 4 ayat 2	37.320.000	95.451.106
Pasal 21	83.697.950	30.031.051
Pasal 23	4.229.955	70.979.405
Pasal 25	<u>348.346.252</u>	-
Jumlah	<u>473.594.157</u>	<u>196.461.562</u>

20. Beban Akrual

	2017	2016
Pegawai	1.306.136.783	2.880.197.926
Jasa profesional	60.000.000	33.000.000
<i>Enterprise data center</i>	-	932.800.000
Komisi	-	742.733.417
Lain-lain	<u>68.031.664</u>	<u>73.661.401</u>
Jumlah	<u>1.434.168.447</u>	<u>4.662.392.745</u>

21. Modal Saham

Susunan kepemilikan saham Perusahaan masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	2017 dan 2016		
	Jumlah Saham	Percentase Kepemilikan %	Jumlah Modal Disetor
PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	249.999	99,9996	249.999.000.000
Yayasan Dana Kesejahteraan			
Karyawan Askindo	1	0,0004	1.000.000
Jumlah	<u>250.000</u>	<u>100,0000</u>	<u>250.000.000.000</u>

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Manajemen Permodalan

Tujuan utama dari pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa Perusahaan mempertahankan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham.

Sesuai dengan Pasal 31 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan, Perusahaan penjaminan syariah dengan lingkup nasional diwajibkan memiliki modal sendiri (ekuitas) minimum sebesar Rp 100.000.000.000 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun setelah memperoleh izin usaha. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perusahaan telah memenuhi ketentuan tersebut.

Perusahaan mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian terhadap struktur modal sehubungan dengan perubahan kondisi ekonomi.

22. Penggunaan Saldo Laba

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 15 Juni 2017 dan 18 Februari 2016, para pemegang saham Perusahaan telah menyetujui pembagian laba tahun 2017 dan 2016 dengan membentuk cadangan umum masing-masing sebesar Rp 20.484.036.491 pada tanggal 31 Desember 2017 dan Rp 34.745.451.559 pada tanggal 31 Desember 2016.

23. Nisbah (Bagi Hasil) Investasi

	2017	2016
Bagi hasil deposito	10.783.209.950	12.924.766.835
Reksadana	<u>6.181.941.690</u>	<u>2.688.130.000</u>
Jumlah	<u>16.965.151.640</u>	<u>15.612.896.835</u>

24. Beban Usaha

	2017	2016
Pemasaran		
Promosi	3.525.621.831	4.014.613.265
Lainnya	<u>743.906.372</u>	<u>1.128.252.690</u>
Jumlah	<u>4.269.528.203</u>	<u>5.142.865.956</u>
Umum dan Administrasi		
Gaji dan tunjangan karyawan	25.812.249.449	23.544.703.623
Beban kantor lainnya	17.487.130.818	11.011.084.642
Penyusutan dan amortisasi (Catatan 11 dan 12)	3.513.008.327	2.014.915.298
Imbalan kerja jangka panjang (Catatan 26)	1.005.790.693	464.443.545
Pengembangan dan pelatihan	243.048.999	913.950.254
Pemeliharaan dan perbaikan	146.140.981	271.080.486
Lain-lain	<u>146.858.056</u>	<u>197.378.992</u>
Jumlah	<u>48.354.227.322</u>	<u>38.417.556.840</u>
Jumlah	<u>52.623.755.526</u>	<u>43.560.422.796</u>

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

25. Pendapatan (Beban) Lain-lain

	2017	2016
Jasa giro	149.189.035	171.403.252
Administrasi bank	(54.377.549)	(47.142.302)
Pendapatan (beban) lainnya	<u>657.244.507</u>	<u>(7.680.403.837)</u>
Jumlah	<u>752.055.993</u>	<u>(7.556.142.887)</u>

26. Imbalan Kerja Jangka Panjang

Besarnya imbalan pasca-kerja dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku, yakni Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003.

Perhitungan aktuaria terakhir atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang dilakukan oleh Prima Aktuaria, aktuaris independen, tertanggal 8 Januari 2018.

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan kerja jangka panjang tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebanyak 112 orang dan 38 orang.

Jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sehubungan dengan imbalan pasti adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Biaya jasa:		
Biaya jasa kini	964.744.443	438.223.350
Biaya jasa lalu	-	-
Biaya bunga neto	<u>41.046.250</u>	<u>26.220.195</u>
Komponen biaya imbalan kerja jangka panjang pasti yang diakui di laba rugi	<u>1.005.790.693</u>	<u>464.443.545</u>
 Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang pasti:		
Kerugian (keuntungan) aktruarial yang timbul dari:		
Perubahan asumsi keuangan	284.148.666	34.358.238
Penyesuaian pengalaman	255.682.358	389.309.860
Lain-lain	<u>(59.994.688)</u>	<u>109.262.496</u>
Komponen biaya imbalan kerja jangka panjang pasti yang diakui di dalam penghasilan komprehensif lain	<u>479.836.335</u>	<u>532.930.594</u>
 Jumlah	<u>1.485.627.028</u>	<u>997.374.139</u>

Beban imbalan kerja jangka panjang untuk tahun berjalan disajikan sebagai bagian dari "Beban Usaha" pada laba rugi (Catatan 24).

Kerugian (keuntungan) aktuarial atas imbalan kerja jangka panjang diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Mutasi liabilitas imbalan kerja jangka panjang di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Saldo awal tahun	1.273.612.176	285.912.687
Biaya jasa kini	964.744.443	438.223.350
Biaya bunga	41.046.250	26.220.195
Keuntungan (kerugian) pengukuran kembali		
Keuntungan (kerugian) aktuarial		
yang timbul dari:		
Perubahan asumsi keuangan	255.682.358	389.309.860
Penyesuaian atas pengalaman	284.148.666	34.358.238
Lain-lain	(59.994.688)	109.262.496
Kontribusi perusahaan	<u>(476.898.600)</u>	<u>(9.674.650)</u>
Saldo akhir tahun	<u>2.282.340.604</u>	<u>1.273.612.176</u>

Asumsi-asumsi aktuarial utama yang digunakan dalam perhitungan imbalan kerja jangka panjang:

	2017	2016
Tingkat diskonto	7,27%	8,45%
Tingkat kenaikan gaji	10,00%	10,00%
Usia pensiun normal	56 Tahun	56 Tahun
Tingkat kematian	TMI - 2011	TMI 2011
Tingkat kecacatan	3% dari TMI 2011 5% di usia 0 - 39 Tahun menurun secara proporsional hingga 0% di usia >50 Tahun	3% dari TMI 2011 5% di usia 0 - 39 Tahun menurun secara proporsional hingga 0% di usia >50 Tahun
Tingkat pengunduran diri		

Analisa sensitivitas dari perubahan asumsi-asumsi utama terhadap liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

	2017		
	Perubahan asumsi	Kenaikan asumsi	Penurunan asumsi
Tingkat diskonto	1%	(367.852.395)	440.639.349
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	422.854.727	(361.095.713)
2016			
	Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti		
	Perubahan asumsi	Kenaikan asumsi	Penurunan asumsi
Tingkat diskonto	1%	(173.138.523)	204.109.057
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	171.639.959	(198.237.172)

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

27. Pajak Penghasilan

- a. Beban (penghasilan) pajak Perusahaan terdiri dari:

	2017	2016
Pajak kini	2.232.500.256	4.180.155.035
Pajak tangguhan	<u>(1.844.442.480)</u>	<u>(33.105.089)</u>
Jumlah	<u>388.057.776</u>	<u>4.147.049.946</u>

- b. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	<u>6.614.262.332</u>	<u>24.631.086.437</u>
Perbedaan temporer:		
Ta'widh yang sudah terjadi namun belum dilaporkan	6.039.709.198	-
Imbalan kerja jangka panjang - bersih	<u>1.005.790.693</u>	<u>464.443.545</u>
Perbedaan tetap:		
Cadangan ujrah	7.437.789.989	3.815.501.312
Tunjangan PPh Pasal 21	2.121.999.420	2.110.457.507
Beban pengobatan	1.190.419.865	124.010.404
Representasi dan jamuan	732.787.521	670.714.597
Iuran keanggotaan	238.513.877	273.570.200
Beban perumahan	196.124.998	68.133.333
Beban olahraga dan rekreasi	150.207.370	116.763.915
Sumbangan pegawai	103.642.269	58.835.723
Beban zakat pegawai	63.905.131	-
Penghasilan yang dikenakan pajak final	<u>(16.965.151.640)</u>	<u>(15.612.896.835)</u>
Laba kena pajak	<u>8.930.001.023</u>	<u>16.720.620.138</u>

Perhitungan beban pajak dan utang pajak kini adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Beban pajak kini	2.232.500.256	4.180.155.035
Dikurangi pembayaran pajak dimuka Pasal 25	<u>5.098.000.135</u>	<u>5.277.612.845</u>
Jumlah pajak kini dibayar dimuka (Catatan 9)	<u>(2.865.499.879)</u>	<u>(1.097.457.811)</u>

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

c. Pajak Tangguhan

Rincian aset pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

	Dikreditkan (dibebankan) ke		Dikreditkan (dibebankan) ke		31 Desember 2017
	1 Januari 2016	Laba rugi	31 Desember 2016	Penghasilan Komprehensif lain	
Tawidh yang sudah terjadi namun belum dilaporkan			1.509.927.299	-	1.509.927.299
Imbalan kerja jangka panjang	83.005.798	33.105.089	116.110.886	334.515.181	119.959.084
Jumlah	83.005.798	33.105.089	116.110.886	1.844.442.480	119.959.084
					2.080.512.450

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	6.614.262.332	24.631.086.437
Beban pajak dengan tarif yang berlaku	<u>1.653.565.583</u>	<u>6.157.771.609</u>
Pengaruh pajak atas perbedaan tetap:		
Cadangan ujrah	1.859.447.497	953.875.328
Tunjangan PPh Pasal 21	530.499.855	527.614.377
Beban pengobatan	297.604.966	31.002.601
Representasi dan jamuan	183.196.880	167.678.649
Iuran keanggotaan	59.628.469	68.392.550
Beban perumahan	49.031.250	17.033.333
Beban olahraga dan rekreasi	37.551.843	29.190.979
Sumbangan pegawai	25.910.567	14.708.931
Beban zakat pegawai	15.976.283	-
Penghasilan yang dikenakan pajak final	<u>(4.241.287.910)</u>	<u>(3.903.224.209)</u>
Jumlah	<u>471.125.283</u>	<u>4.064.044.148</u>
Penyesuaian atas pajak tangguhan	<u>(83.067.507)</u>	<u>83.005.798</u>
Jumlah Beban Pajak	<u>388.057.776</u>	<u>4.147.049.946</u>

28. Sifat dan Transaksi dengan Pihak Berelasi

Sifat Pihak Berelasi

- PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) dan Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo merupakan pemegang saham Perusahaan.
- Perusahaan yang sebagian pemegang saham dan pengurus atau manajemennya sama dengan Perusahaan adalah PT Reasuransi Nasional Indonesia dan PT Askindo Mitra Utama.

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Transaksi Pihak Berelasi

Rincian transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut :

	2017	2016	Percentase terhadap jumlah Aset/Liabilitas	
			2017	2016
Aset				
Kas dan bank				
PT Bank BRI Syariah	2.997.716.111	1.605.030.585	0,77%	0,45%
PT Bank Syariah Mandiri	1.559.333.328	1.947.823.693	0,40%	0,55%
PT Bank BNI Syariah	643.909.126	758.447.604	0,16%	0,21%
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Syariah	58.174.225	124.941.293	0,01%	0,03%
Jumlah	5.259.132.789	4.436.243.175	1,34%	1,24%
Piutang ujrah				
PT Bank BRI Syariah	2.467.237.669	3.362.872.336	0,63%	0,94%
PT Bank Syariah Mandiri	1.502.557.649	1.966.791.930	0,38%	0,55%
PT Bank BNI Syariah	248.246.603	436.432.821	0,06%	0,12%
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	133.602.694	22.081.921	0,03%	0,01%
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Syariah	187.255.450	1.359.009.510	0,05%	0,38%
Kementerian Pertanian	131.077.113	-	0,03%	-
Jumlah	4.669.977.178	7.147.188.518	1,19%	2,00%
Piutang ta'widh				
PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	7.091.416.074	-	1,81%	0,00%
PT Reasuransi Syariah Indonesia	1.104.213.834	1.606.427.204	0,28%	0,45%
PT Bank BRI Syariah	178.525.784	-	0,05%	0,00%
Jumlah	8.374.155.692	1.606.427.204	2,14%	0,45%
Piutang investasi				
PT Bank Syariah Mandiri	45.064.899	41.261.227	0,01%	0,01%
PT Bank BRI Syariah	29.193.337	30.744.767	0,01%	0,01%
PT Bank BNI Syariah	25.725.173	14.345.205	0,01%	0,00%
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Syariah	13.391.781	14.345.205	0,00%	0,00%
Jumlah	113.375.189	100.696.405	0,03%	0,03%
Deposito berjangka mudharabah				
PT Bank Syariah Mandiri	89.700.000.000	80.650.000.000	22,92%	22,58%
PT Bank BNI Syariah	52.900.000.000	49.500.000.000	13,52%	13,86%
PT Bank BRI Syariah	45.000.000.000	45.200.000.000	11,50%	12,65%
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Syariah	10.500.000.000	11.000.000.000	2,68%	3,08%
Jumlah	198.100.000.000	186.350.000.000	50,62%	52,17%
Reksadana				
PT PNM Investment Management	70.084.943.750	59.487.433.372	17,91%	16,65%
Liabilitas				
Utang ta'widh				
PT Bank Syariah Mandiri	4.113.283.290	1.666.637.288	1,05%	0,47%
PT Bank BRI Syariah	2.670.908.949	450.204.835	0,68%	0,13%
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	49.820.550	-	0,01%	0,00%
PT Bank BNI Syariah	41.666.667	-	0,01%	0,00%
Jumlah	6.875.679.456	2.116.842.123	1,76%	0,59%
Utang penjaminan ulang				
PT Asuransi Kredit Indoneisa (Persero)	3.515.421.316	47.500.000	0,90%	0,01%
PT Reasuransi Syariah Indonesia	1.700.752.703	-	0,43%	0,00%
PT Reasuransi Nasional Indonesia - Unit Syariah	1.097.636.284	7.300.615	0,28%	0,00%
PT Asuransi Eksport Indonesia (Persero)	20.115.000	-	0,01%	0,00%
Jumlah	6.333.925.303	54.800.615	1,62%	0,02%

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	2017	2016	Percentase Terhadap Jumlah Pendapatan/ Beban yang Bersangkutan	
			2017	2016
Pendapatan usaha				
PT Bank Syariah Mandiri	74.450.989,940	65.257.465,309	42,23%	41,77%
PT Bank BRI Syariah	35.029.383,978	20.546.191,741	19,87%	13,15%
PT Bank BNI Syariah	21.128.091,513	16.926.730,718	11,98%	10,84%
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	13.263.530,076	17.919.168,057	7,52%	11,47%
PT Bank Tabungan Negara (Persero) - Unit Syariah	303.324,030	2.013.204,079	0,17%	1,29%
Jumlah	<u>144.175.319,538</u>	<u>122.662.759,904</u>	<u>81,78%</u>	<u>78,52%</u>
Pendapatan kafalah lain				
PT Bank BNI Syariah	61.450.000	40.890.090	44,53%	27,66%
PT Bank BRI Syariah	29.530.040	58.509.980	21,40%	39,58%
PT Bank Syariah Mandiri	15.596.000	9.948.020	11,30%	6,73%
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Syariah	560.000	1.320.000	0,41%	0,89%
Jumlah	<u>107.136.040</u>	<u>110.668.090</u>	<u>77,63%</u>	<u>74,87%</u>
Beban ta'widh				
PT Bank Syariah Mandiri	50.796.784,638	28.397.830,631	53,24%	50,82%
PT Bank BRI Syariah	20.803.121,757	11.834.510,724	21,80%	21,18%
PT Bank BNI Syariah	5.772.677,026	794.204,634	6,05%	1,42%
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	4.519.943,203	2.637.221,601	4,74%	4,72%
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Syariah	5.035.022	51.290.076	0,01%	0,09%
Jumlah	<u>81.897.561,647</u>	<u>43.715.057,665</u>	<u>85,83%</u>	<u>78,23%</u>
Beban penjaminan ulang				
PT Asuransi Kredit Indoensia (Persero)	8.201.229,468	5.446.433,494	17,56%	14,11%
PT Reasuransi Nasional Indonesia - Unit Syariah	6.285.417,641	677.541,458	13,46%	1,76%
Jumlah	<u>14.486.647,109</u>	<u>6.123.974,952</u>	<u>31,01%</u>	<u>15,86%</u>

29. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Aktivitas Perusahaan terpengaruh berbagai risiko keuangan yaitu risiko mata uang asing, risiko kredit dan risiko likuiditas. Program manajemen risiko Perusahaan secara keseluruhan difokuskan pada pasar keuangan yang tidak dapat diprediksi dan Perusahaan berusaha untuk meminimalkan efek yang berpotensi merugikan kinerja keuangan Perusahaan.

Manajemen risiko merupakan tanggung jawab Direksi. Direksi bertugas menentukan prinsip dasar kebijakan manajemen risiko Perusahaan secara keseluruhan serta kebijakan pada area tertentu seperti risiko mata uang asing, risiko kredit, dan risiko likuiditas.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Perusahaan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan akibat gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Perusahaan mengendalikan risiko kredit dengan cara melakukan hubungan usaha dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas, menetapkan kebijakan verifikasi dan otorisasi kredit, serta memantau kolektibilitas piutang secara berkala untuk mengurangi jumlah piutang tak tertagih.

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk komponen laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016:

	2017	2016
<i>Pinjaman yang diberikan dan piutang</i>		
Kas dan bank	35.696.848.403	7.344.338.348
Piutang lain-lain	-	29.476.969
Aset lain-lain - uang jaminan	<u>177.000.000</u>	<u>15.000.000</u>
Jumlah	<u>35.873.848.403</u>	<u>7.388.815.317</u>

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Perusahaan tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perusahaan dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang, serta terus menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

Liabilitas keuangan Perusahaan seluruhnya jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) tahun.

30. Aset dan Liabilitas Moneter Bersih dalam Mata Uang Asing

Tabel berikut mengungkapkan jumlah aset dan liabilitas moneter:

	2017		2016			
	Mata Uang Asing	Ekuivalen Rp	Mata Uang Asing	Ekuivalen Rp		
Aset						
Kas dan bank	USD	18.275	247.592.952	USD	18.275	245.546.125

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, kurs konversi yang digunakan Perusahaan diungkapkan pada Catatan 2 atas laporan keuangan.

31. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Susunan pengurus Perusahaan berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham yang diadakan tanggal 22 Januari 2018 yang didokumentasikan dalam Akta No. 37 oleh Hadijah,SH., notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	:	Budi Wisakseno
Komisaris	:	Yulison Marpaung
Direktur Utama	:	Soegiharto
Direktur Keuangan	:	Subagio Istiarno

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

32. Reklasifikasi Akun

Beberapa akun dalam laporan keuangan tahun 2016 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan tahun 2017, sebagai berikut:

	Sesudah Reklasifikasi	Sebelum Reklasifikasi
Laporan posisi keuangan		
Utang penjaminan ulang	54.800.615	-
Utang lain-lain	655.164.061	-
Utang pajak	196.461.562	101.010.456
Beban akrual	4.662.392.745	5.467.808.526
Pajak dibayar dimuka	1.097.457.810	-
Biaya dibayar dimuka	767.781.534	1.865.239.344
Biaya tangguhan	2.688.119.779	-
Aset lain-lain	1.087.690.466	3.775.810.245
Laba rugi dan penghasilan komprehensif lain		
Pendapatan kafalah		
Beban penjaminan ulang	38.605.917.821	-
Beban akuisisi	-	9.326.218.492
Beban kafalah		
Beban penjaminan ulang	-	38.605.917.821
Beban akuisisi	9.326.218.492	-

Reklasifikasi diatas tidak mempengaruhi laporan perubahan ekuitas Perusahaan tahun 2016.

	Sesudah Reklasifikasi	Sebelum Reklasifikasi
Sumber Dana Zakat		
Zakat dari dalam Pembiayaan Syariah	631.566.319	-
Zakat dari karyawan	-	-
Jumlah sumber dana Zakat	631.566.319	-
Penyaluran Dana Zakat kepada entitas pengelola zakat		
Penurunan dana Zakat	(988.143.500)	-
Saldo awal dana Zakat	(356.577.181)	-
Saldo akhir dana Zakat	868.428.937	-
	<u>511.851.756</u>	<u>-</u>

33. Standar Akuntansi Keuangan Baru

a. Diterapkan pada Tahun 2017

Perusahaan telah menerapkan amandemen Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) baru berikut, namun tidak mengakibatkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan:

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PSAK

1. PSAK No. 1, Penyajian Laporan Keuangan: Prakarsa Pengungkapan
2. PSAK No. 24, Imbalan Kerja
3. PSAK No. 60, Instrumen Keuangan: Pengungkapan

b. Telah Diterbitkan namun Belum Berlaku Efektif

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru dan amandemen PSAK yang berlaku efektif pada periode yang dimulai:

1 Januari 2018

PSAK

1. PSAK No. 2, Laporan Arus Kas: Prakarsa Pengungkapan
2. PSAK No. 46, Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi

1 Januari 2020

PSAK

1. PSAK No. 62, Kontrak Asuransi tentang Menerapkan PSAK No. 71: Instrumen Keuangan
2. PSAK No. 71, Instrumen Keuangan
3. PSAK No. 72, Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
4. PSAK No. 73, Sewa

Perusahaan masih mengevaluasi dampak penerapan PSAK di atas dan dampak terhadap laporan keuangan dari penerapan PSAK tersebut belum dapat ditentukan.



ASKRINDO
Syariah

PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah

Gedung Primagraha Persada

Jl. Gedung Kesenian No. 3-7, Sawah Besar

Jakarta Pusat - DKI Jakarta 10710

Telp.: (021) 3517525

www.askrindosyariah.co.id